



BADAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA

LAPORAN **TRIWULAN I** CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024





DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR ISTILAH	vii
KATA PENGANTAR	ix
RINGKASAN EKSEKUTIF	x
BAB I PEMETAAN SASARAN STRATEGIS	1
BAB II CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	6
A. Hubungan Antar Lembaga, Kerja Sama, Sosialisasi, dan Jaringan, serta Pembudayaan.....	6
A.1. Efektivitas Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama Dalam Rangka Pengarutamaan Ideologi Pancasila yang Ditindaklanjuti	6
A.2. Tingkat efektivitas konten sosialisasi dan komunikasi pada media berbasis elektronik.....	18
A.3. Penyelenggaraan Pembudayaan Ideologi Pancasila	29
B. Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila di Bidang Hukum, Advokasi, Apresiasi, dan Pengawasan Regulasi.....	35
B.1. Rekomendasi Arah Kebijakan Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila di Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi yang Ditindaklanjuti.	36
B.2. Rekomendasi Atas Hasil Pengawasan dan Kajian Kebijakan atau Regulasi yang Diduga Bertentangan dengan Nilai Pancasila.....	48
C. Perumusan Arah Kebijakan, Pengkajian, dan Standardisasi Materi PIP	54
C.1. Persentase hasil kajian PIP yang dimanfaatkan	55
D. Diklat PIP Bagi Aparatur Negara, Lembaga Pendidikan/Keagamaan Formal, dan Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal.....	73
D.1. Persentase hasil perencanaan pendidikan dan pelatihan PIP yang dimanfaatkan.	75
D.2. Persentase pemanfaatan standardisasi dan kurikulum Diklat PIP.	81
D.3. Persentase tenaga pengajar Diklat PIP yang tersertifikasi.....	85
D.4. Persentase peserta Diklat PIP yang melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di komunitasnya	87
E. Pengendalian dan Evaluasi PIP	95
E.1. Persentase Rekomendasi Pengendalian PIP yang dimanfaatkan.....	95
E.2. Persentase Rekomendasi Evaluasi Pembinaan PIP yang dimanfaatkan.	99



F. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Transparan, dan Akuntabel serta Pelayanan PIP yang Berkualitas	109
F.1. Pelaksanaan Manajemen Program, Keuangan, dan Kinerja	110
F.2. Pelaksanaan Manajemen Hukum dan Organisasi	116
F.3. Pelaksanaan Manajemen SDM, BMN, dan Ketatausahaan	129
F.4. Pelaksanaan Manajemen Fasilitas Dewan Pengarah dan Ketenagaahlian	138
F.5. Pelaksanaan Manajemen Pengawasan Internal	147
F.6. Pelaksanaan Manajemen Data dan Informasi	152
BAB III REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I TAHUN 2024	159
BAB IV EVALUASI DAN UPAYA PERBAIKAN	162
BAB V PENUTUP	189



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Ukuran Keberhasilan Sasaran Strategis BPIP	3
Tabel 2. 1. Indikator Keluaran Program terjalannya hubungan antar lembaga, kerja sama, sosialisasi, dan jaringan, serta pembudayaan	6
Tabel 2. 2. Kerja Sama Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah	7
Tabel 2.3. Kerja Sama Organisasi Sosial, Politik dan Komponen Masyarakat Lainnya	10
Tabel 2. 4. Indikator Keluaran Optimalisasi Kerja Sama Organisasi Sosial, Politik dan Komponen Masyarakat Lainnya	11
Tabel 2. 5. Dokumen Kerja Sama Organisasi Sosial, Politik dan Komponen Masyarakat Lainnya	14
Tabel 2. 6. Aktivitas Optimalisasi Kerja Sama Organisasi Sosial, Politik dan Komponen Masyarakat Lainnya	15
Tabel 2. 8. Indikator Keluaran Tingkat Efektivitas Konten Sosialisasi dan Komunikasi pada Media Berbasis Elektronik	20
Tabel 2. 9. Aktivitas Tingkat Efektivitas Konten Sosialisasi dan Komunikasi pada Media Berbasis Elektronik	24
Tabel 2. 10. Daftar Komunitas / Kelompok Masyarakat yang telah melaksanakan aktualisasi	30
Tabel 2. 11. Indikator Keluaran Penyelenggaraan Jaringan dan Pembudayaan Ideologi Pancasila	30
Tabel 2. 12. Aktivitas Penyelenggaraan Pembudayaan Ideologi Pancasila	31
Tabel 2. 13. Indikator Keluaran Program Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila di Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi	35
Tabel 2. 14. Indikator keluaran Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila di Bidang Hukum, Advokasi, Serta Pengawasan Regulasi yang Dimanfaatkan	36
Tabel 2. 15. Rekomendasi hasil internalisasi dan institusionalisasi Pancasila dalam kebijakan dan regulasi yang ditindaklanjuti	38
Tabel 2. 17. Rekomendasi advokasi PIP yang ditindaklanjuti	40
Tabel 2. 18. Aktivitas Pelaksanaan Analisis dan Penyelarasan Hukum Nasional terhadap Nilai- Nilai Pancasila	41
Tabel 2. 19. Aktivitas Penyusunan dan Pelaksanaan Advokasi PIP	45
Tabel 2. 20. Rekomendasi hasil penyelarasan rancangan kebijakan dan regulasi serta hasil kajian kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai pancasila yang ditindaklanjuti Ditindaklanjuti	48
Tabel 2. 21. Indikator keluaran Rekomendasi atas Regulasi yang Bertentangan dengan Nilai-Nilai Pancasila yang Ditindaklanjuti	49
Tabel 2. 22. Rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila	50
Tabel 2. 23. Aktivitas Rekomendasi Atas Hasil Pengawasan dan Kajian Kebijakan atau Regulasi yang Diduga Bertentangan dengan Nilai Pancasila	51
Tabel 2. 24. Indikator Keluaran Program Terwujudnya Perumusan Arah Kebijakan, Pengkajian, dan Standardisasi Materi PIP	55
Tabel 2. 25. Indikator Keluaran Persentase Hasil Kajian PIP yang dimanfaatkan ...	55
Tabel 2. 27. Aktivitas Pelaksanaan Pengkajian Kebijakan PIP	66
Tabel 2. 28. Pelaksanaan Pengkajian Materi PIP	69
Tabel 2. 29. Aktivitas Pelaksanaan Pengkajian Implementasi PIP	71



Tabel 2. 30. Indikator Keluaran Program Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan PIP Bagi Aparatur Negara, Lembaga Pendidikan/Keagamaan Formal, dan Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal	74
Tabel 2. 31. Indikator Keluaran Persentase hasil perencanaan pendidikan dan pelatihan PIP yang dimanfaatkan.....	75
Tabel 2. 32. Aktivitas Penyelenggaraan Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan PIP	78
Tabel 2. 33. Indikator Keluaran Persentase pemanfaatan standardisasi dan kurikulum Diklat PIP	82
Tabel 2. 34. Aktivitas pemanfaatan standardisasi dan kurikulum Diklat PIP ...	84
Tabel 2.35. Indikator Keluaran Persentase tenaga pengajar Diklat PIP yang tersertifikasi (ToT)	85
Tabel 2. 36. Aktivitas Persentase Peserta Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Pendidikan dan Pelatihan PIP yang kompetensinya meningkat	86
Tabel 2. 37. Indikator Keluaran Persentase peserta Diklat PIP yang melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di komunitasnya.....	88
Tabel 2. 38. Aktivitas Persentase peserta Diklat PIP yang melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di komunitasnya	89
Tabel 2. 39. Aktivitas Persentase Purna Paskibraka yang menjadi Duta Pancasila	90
Tabel 2. 39. Indikator Keluaran Program Terlaksananya Pengendalian Dan Evaluasi	95
Tabel 2. 40. Indikator Keluaran Persentase Rekomendasi Pengendalian PIP yang dimanfaatkan	96
Tabel 2. 41. Kegiatan Rekomendasi Pengendalian PIP yang dimanfaatkan	97
Tabel 2. 42. Indikator Persentase Rekomendasi Evaluasi Pembinaan PIP yang dimanfaatkan	100
Tabel 2. 43. Aktivitas Rekomendasi Evaluasi Pembinaan PIP	103
Tabel 2. 44. Aktivitas Rekomendasi Pengukuran Pelembagaan Pancasila	105
Tabel 2. 44. Indikator Keluaran Program Terwujudnya Penyelenggaraan Tata Kelola BPPI yang Bersih, Efektif, Transparan, dan Akuntabel.....	109
Tabel 2. 45. Indikator Keluaran Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Program, Keuangan dan Kinerja.....	110
Tabel 2. 46. Aktivitas Pelaksanaan Manajemen Program, Keuangan, dan Kinerja	113
Tabel 2. 47. Indikator Keluaran Pelaksanaan Manajemen Hukum dan Organisasi	116
Tabel 2. 48. Peraturan dan Produk Hukum Triwulan I Tahun 2024	121
Tabel 2. 49. Aktivitas Pelaksanaan Manajemen Hukum dan Organisasi	123
Tabel 2. 50. Capaian Target Pelaksanaan Manajemen SDM, BMN, dan Ketatausahaan.....	129
Tabel 2. 51. Aktivitas Pelaksanaan Manajemen SDM, BMN, dan Ketatausahaan.	134
Tabel 2. 52. Indikator Keluaran Pelaksanaan Manajemen Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat dan Administrasi	138
Tabel 2. 53. Aktivitas Pelaksanaan Manajemen Fasilitas , Hubungan Masyarakat dan Administrasi	144
Tabel 2. 54. Indikator Keluaran Pelaksanaan Manajemen Pengawasan Internal ..	147
Tabel 2. 55. Aktivitas Pelaksanaan Manajemen Pengawasan Internal.....	148
Tabel 2. 56. Indikator Keluaran Pelaksanaan Manajemen Data dan Informasi.....	152
Tabel 2. 57. Aktivitas Pelaksanaan Manajemen Data dan Informasi	156
Tabel 3. 1. Realisasi Anggaran berdasarkan Unit Kerja	160



Tabel 4. 1. Kendala dan Tindak Lanjut terwujudnya hubungan antar lembaga, kerja sama, sosialisasi, komunikasi dan jaringan, serta pembudayaan PIP	162
Tabel 4. 2. Kendala dan Tindak Lanjut terwujudnya internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi dan pengawasan regulasi	167
Tabel 4. 3. Kendala dan Tindak Lanjut terwujudnya perumusan arah kebijakan, pengkajian, dan standardisasi materi PIP	170
Tabel 4. 4. Kendala dan Tindak Lanjut terselenggaranya Diklat PIP bagi aparatur negara, lembaga pendidikan/keagamaan formal, dan lembaga pendidikan nonformal dan informal	174
Tabel 4. 5. Kendala dan Tindak Lanjut terlaksananya pengendalian dan evaluasi PIP	178
Tabel 4. 6. Kendala dan Tindak Lanjut terlaksananya Dukungan Manajemen	180



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Strategis BPIP.....	2
Gambar 3.1 Realisasi Anggaran Total	159
Gambar 3.2 Realisasi Anggaran per Program.....	160



DAFTAR ISTILAH

ADKASI	: Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia
APIP	: Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah
ARJUNA	: Akreditasi Jurnal Nasional
ASN	: Aparatur Sipil Negara
Bakesbangpol	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BNN	: Badan Narkotika Nasional
BPIP	: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPSDM	: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Diklat	: Pendidikan dan Pelatihan
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
GBHIP	: Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila
GMKI	: Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
IAP	: Indeks Aktualisasi Pancasila
IDEA	: <i>Indonesian E-Commerce Association</i>
IKU	: Indikator Kinerja Utama
K3HKP	: Kepatuhan, Kinerja, Korupsi, dan Hambatan Kelancaran Pembangunan
K/L	: Kementerian/Lembaga
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
Kemendikbud	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
KemenPANRB	: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kemenpora	: Kementerian Pemuda dan Olahraga
Kesbangpol	: Kesatuan Bangsa dan Politik
Lemhanas	: Lembaga Ketahanan Nasional
Mapel	: Mata Pelajaran
Medsos	: Media Sosial
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
NSPK	: Norma, standar, prosedur, dan kriteria
Ormas	: Organisasi Masyarakat
Orsospol	: Organisasi Sosial dan Politik
Paskibraka	: Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
PDP	: Purnapaskibraka Duta Pancasila
PEMDA	: Pemerintah Daerah
Perpres	: Peraturan Presiden
PIP	: Pembinaan Ideologi Pancasila
PJK	: Pancasila Jurnal Keindonesiaan
PKS	: Perjanjian Kerja Sama
PMPRB	: Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
PN	: Prioritas Nasional
POLRI	: Kepolisian Republik Indonesia



PPKn	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Renstra	: Rencana Strategis
RO	: Rincian <i>Output</i>
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RRI	: Radio Republik Indonesia
RUU	: Rancangan Undang – Undang
SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SDM	: Sumber Daya Manusia
SINTA	: <i>Science and Technology Index</i>
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SPBE	: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SPIP	: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
TA	: Tahun Anggaran
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
ToT	: <i>Training of Trainer</i>
TVRI	: Televisi Republik Indonesia
UGM	: Universitas Gadjah Mada
UI	: Universitas Indonesia
UNY	: Universitas Negeri Yogyakarta
UIN	: Universitas Islam Negeri
UKM	: Usaha Kecil Menengah
UMKM	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UNDANA	: Universitas Nusa Cendana
UNWIRA	: Universitas Katolik Widya Mandira
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian



KATA PENGANTAR

Laporan Capaian Program & Kegiatan merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bahwa Kepala dan Wakil Kepala melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden melalui Ketua Dewan Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Laporan Capaian Program & Kegiatan Triwulan I Tahun 2024 bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas kinerja hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) terhadap penggunaan anggaran BPIP periode Januari – Maret 2024.

Laporan Capaian Program & Kegiatan merupakan bentuk evaluasi yang dilakukan selama pelaksanaan program atau kegiatan berlangsung, sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BPIP untuk dapat memenuhi setiap sasaran program dan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disusun sebelumnya (Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja). Segala hal yang termuat dalam laporan ini kiranya dapat memberi manfaat dalam Pembinaan Ideologi Pancasila, mewujudkan Pancasila sebagai leitstar atau bintang penuntun menuju cita-cita kemerdekaan Indonesia, juga sebagai pandangan hidup (*weltanschauung*) sehingga nilai-nilai Pancasila teraktualisasi dalam laku hidup rakyat Indonesia.

Jakarta, April 2024

KEPALA,

YUDIAN WAHYUDI

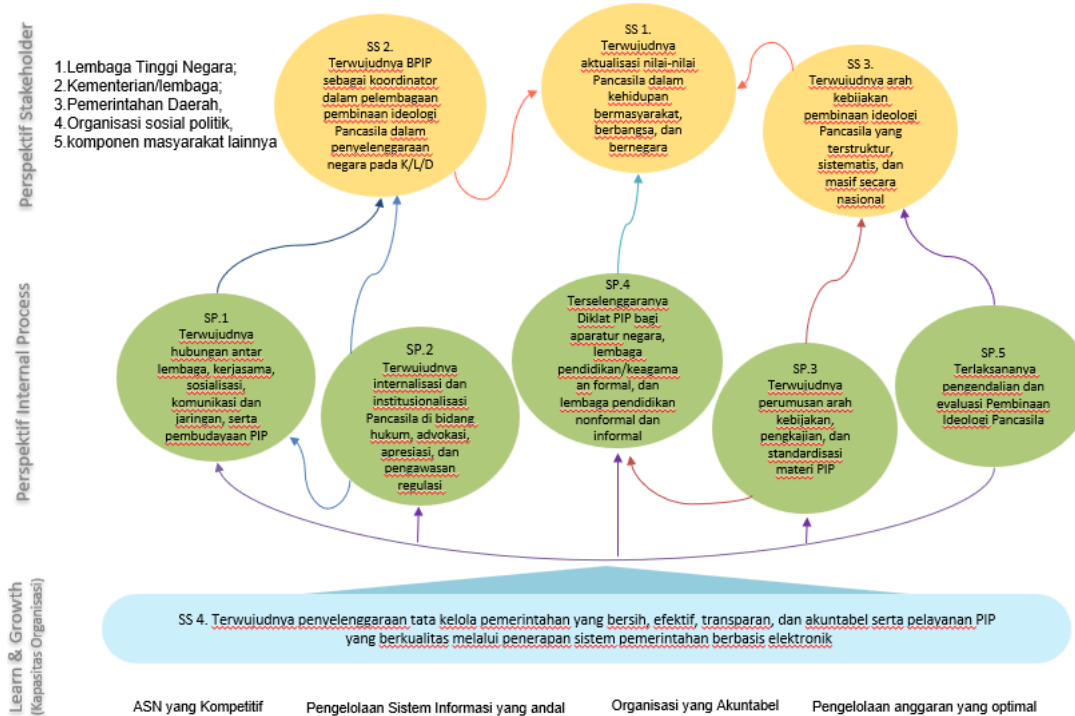
RINGKASAN EKSEKUTIF

Sasaran strategis BPIP sebagaimana telah dimandatkan dalam Rencana Strategis BPIP 2020-2024 adalah:

1. Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Terwujudnya BPIP sebagai koordinator dalam pelebagaan PIP dalam penyelenggaraan negara pada Kementerian/Lembaga/Daerah;
3. Terwujudnya arah kebijakan PIP yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional;
4. Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola BPIP yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan PIP yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Keempat sasaran strategis tersebut dapat terwujud dengan dukungan sasaran program Kedeputan dan Sekretariat Utama. Sasaran Program dicapai dengan berbagai kegiatan teknis. Hubungan sasaran strategis dan sasaran program PIP dipetakan berikut ini:

PETA STRATEGIS BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA



PETA STRATEGIS BPIP



Dari Tahun 2020 sampai dengan periode saat ini berikut adalah capaian dari keempat sasaran strategis tersebut :

CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 2020-2024					
SASARAN STRATEGIS (INDEKS KINERJA UTAMA (IKU))	Periode				
	2020	2021	2022	2023	TW I 2024
Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara					
Nilai Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP)	Penyusunan Indikator	76,78	72,93	77,49	Tahap pengukuran
Terwujudnya BPIP sebagai koordinator dalam pelebagaan PIP dalam penyelenggaraan negara pada K/L/Pemda					
Persentase K/L/Instansi di Pemerintah Pusat dan Provinsi yang melaksanakan institusionalisasi PIP	20%	26%	60%	79%	86%
Terwujudnya arah kebijakan PIP yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional					
Rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden	5 Rek	5 Rek	5 Rek	5 Rek	Tahap Penyusunan
Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan pembinaan ideologi Pancasila yang berkualitas melalui penerapan SPBE					
Nilai Reformasi Birokrasi	44,14	60,15	63,7	66,82	Belum Diukur
Indeks Sistem Merit	Belum dilakukan	0,61	0,63	0,75	Belum Diukur
Opini Laporan Keuangan BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Nilai SAKIP	B	B	B	B	Belum Diukur
Nilai Profesionalisme ASN	30	41,37	48,8	64,26	Belum Diukur
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Penyusunan Indikator	79,21%	89,12%	89,12%	Belum Diukur

CAPAIAN SASARAN STRATEGIS BPIP

Keberhasilan capaian sasaran strategis terwujud karena dukungan capaian kinerja sasaran program, dimana merupakan kinerja pelaksanaan kegiatan yang melekat pada masing-masing sasaran. Pelaksanaan kegiatan periode Triwulan I Tahun 2024 adalah:

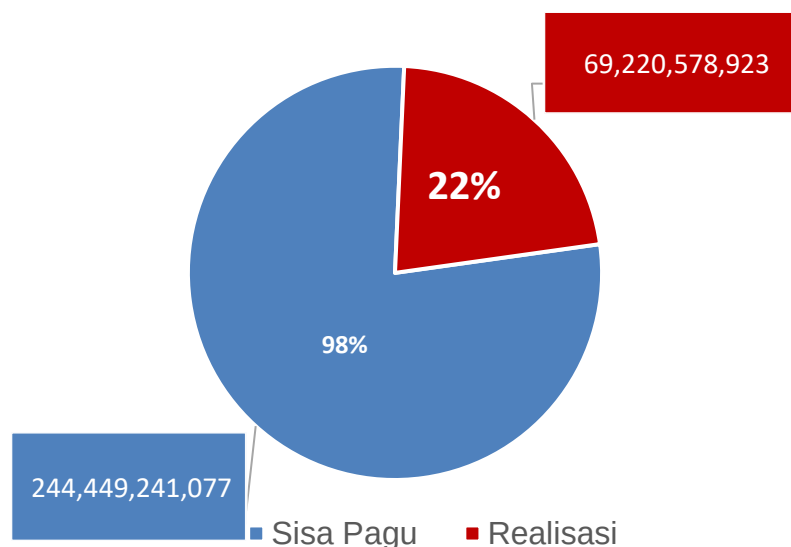
1. Terwujudnya hubungan antar lembaga, kerja sama, sosialisasi , komunikasi dan jaringan, serta pembudayaan PIP;
 - a. Persentase penilaian atas efektivitas Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama dalam rangka pengarusutamaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti dengan capaian 79%;
 - b. Tingkat efektivitas konten sosialisasi dan komunikasi pada media berbasis elektronik dengan capaian 25%;
 - c. Persentase penilaian atas efektivitas jaringan dan pembudayaan nilai Pancasila dengan capaian 11,4%.
2. Terwujudnya internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, apresiasi, dan pengawasan regulasi;

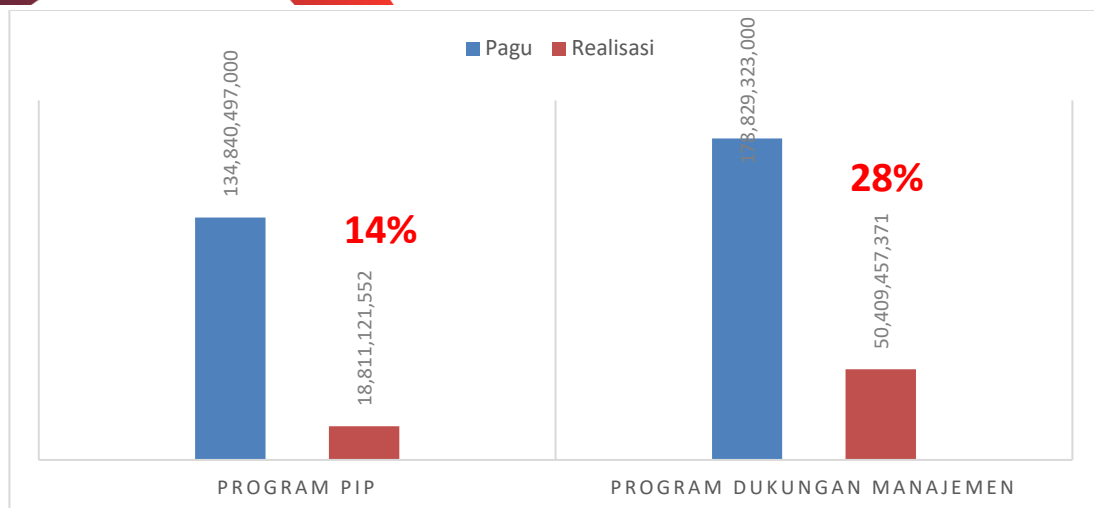


- a. Jumlah rekomendasi arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi dan pengawasan regulasi yang ditindaklanjuti dengan capaian 25,6%;
- b. Jumlah rekomendasi hasil penyelarasan rancangan kebijakan dan regulasi serta hasil kajian kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai pancasila yang ditindaklanjuti dengan capaian 25%.
3. Terwujudnya perumusan arah kebijakan, pengkajian, dan standardisasi materi PIP berupa Persentase hasil kajian PIP yang dimanfaatkan dengan capaian 19,4%.
4. Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan PIP bagi aparatur negara, lembaga pendidikan atau keagamaan formal, dan lembaga pendidikan atau keagamaan nonformal dan informal;
 - a. Persentase hasil perencanaan pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dimanfaatkan dengan capaian 58,6% ;
 - b. Persentase pemanfaatan standardisasi dan kurikulum Diklat PIP dengan capaian 28,5%;
 - c. Persentase tenaga pengajar Diklat PIP yang tersertifikasi dengan capaian 25%;
 - d. Persentase peserta Diklat PIP yang melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di komunitasnya dengan capaian 25%;
5. Terlaksananya pengendalian dan evaluasi PIP;
 - a. Persentase dokumen Pengendalian Kebijakan Strategis dan program Teknis PIP yang dimanfaatkan dengan capaian 25%;
 - b. Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Kebijakan Strategis dan program Teknis PIP yang ditindaklanjuti dengan capaian 19,8%.
6. Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan PIP yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan.
 - a. Layanan koordinasi perencanaan, penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dan analisis, serta pelaporan akuntabilitas kinerja dengan capaian 25%;
 - b. Layanan pengawasan intern di lingkungan BPIP dengan capaian 25%;

- c. Layanan koordinasi pengelolaan barang milik negara, pembinaan mental sumber daya manusia, pengelolaan karier dan kinerja sumber daya manusia, kerumahtanggaan dengan capaian 25%;
- d. Layanan dukungan teknis dan administrasi bagi Dewan Pengarah, Staf Khusus Dewan Pengarah, Dewan Pakar, dan Kelompok Ahli serta Hubungan Masyarakat dan Administrasi dengan capaian 25%;
- e. Layanan koordinasi dan penyusunan produk hukum, dokumentasi dan informasi hukum, dan pembinaan penataan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi dengan capaian 25%;
- f. Layanan pengelolaan data dan informasi dan pengembangan sistem informasi berbasis kemajuan teknologi dalam penyelenggaraan PIP dengan capaian 25%.

Hingga akhir periode Triwulan I Tahun 2024, berdasarkan aplikasi SAKTI per tanggal 31 Maret 2024 realisasi anggaran BPPIP adalah 22% atau sebesar 69.220.578.923,00 dari alokasi pagu DIPA TA 2024 sebesar Rp313.669.820.000,00 Berikut adalah data realisasi anggaran BPPIP periode Triwulan I Tahun 2024:





Realisasi Anggaran BPIP

Beberapa rekomendasi atas hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan selama Triwulan I Tahun 2024, antara lain adalah (i) Perlu adanya penyempurnaan tata laksana guna mendukung pelaksanaan tugas; (ii) mengoptimalkan sumberdaya dan potensi yang ada untuk dapat meningkatkan kinerja pada tahun selanjutnya; (iii) Mendorong pembentukan arah kebijakan PIP; (iv) Pembangunan sistem manajemen terintegrasi diklat PIP berbasis teknologi informasi dan komunikasi; (v) Menyusun pedoman evaluasi PIP.

Pada Triwulan I Tahun 2024 optimalisasi pelaksanaan kegiatan diupayakan sesuai dengan *timeline* kegiatan, bila terdapat kendala teknis dan non teknis yang ada pada pelaksanaan kegiatan, akan dilakukan perbaikan sesuai rencana aksi agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai guna terus membangun penguatan akuntabilitas kinerja, BPIP akan terus mengoptimalkan potensi yang ada untuk disinergikan dengan lembaga tinggi negara, kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya, sehingga tercipta aturan, arahan dan praktek yang tepat dalam revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila.



BAB I | PEMETAAN SASARAN STRATEGIS

Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 masuk dalam Program Prioritas Revolusi Mental dan PIP dengan sasaran memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern dan berkarakter. Kegiatan Prioritas berupa PIP, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Cakupan kebijakan dan strategi nasional yang ditempuh, yaitu:

1. PIP, penguatan pendidikan kewargaan, nilai-nilai kebangsaan, dan bela negara;
2. Peningkatan peran dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai perumus kebijakan umum PIP;
3. Harmonisasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila;
4. Membersihkan unsur-unsur yang anti ideologi negara.

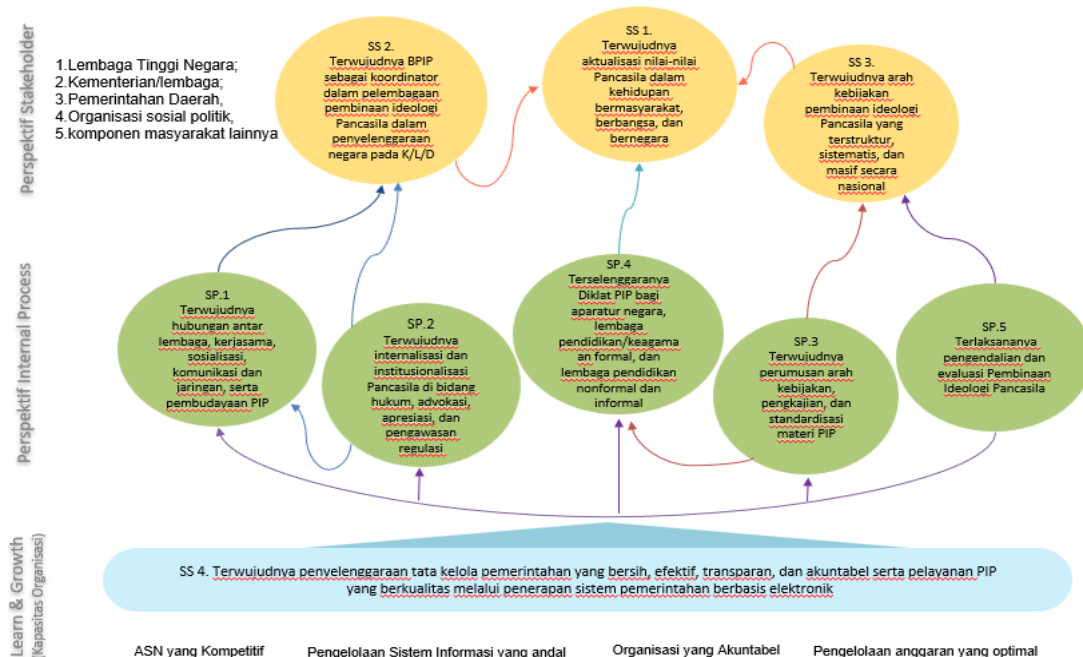
BPIP mendukung sepenuhnya pencapaian visi dan misi Presiden yaitu untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. BPIP dengan program PIP menuju pada *outcome* hingga *impact* aktualisasi nilai-nilai Pancasila, sehingga Pancasila menjadi satu-satunya ideologi negara dan teraktualisasikan dalam setiap kebijakan, peraturan perundang-undangan serta praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Rencana strategis pelaksanaan Program PIP diarahkan mewujudkan 4 sasaran strategis BPIP, yaitu:

1. Terwujudnya BPIP sebagai koordinator dalam pelebagaan PIP dalam penyelenggaraan negara pada Kementerian/Lembaga/ Daerah;
2. Terwujudnya arah kebijakan PIP yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional;
3. Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
4. Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola BPIP yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan PIP yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Keempat sasaran strategis tersebut diwujudkan melalui dukungan sasaran program Kedeputan teknis dan Sekretariat Utama dukungan kapasitas organisasi. Sasaran program dicapai dengan berbagai kegiatan. Peta strategis keterkaitan sasaran-sasaran melalui pendekatan perspektif *stakeholder*, pelaksanaan program dan kegiatan, serta dukungan kapasitas organisasi tampak pada Peta Strategis BPIP berikut ini.

PETA STRATEGIS BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA



Gambar 1.1 Peta Strategis BPIP

Tujuan sasaran-sasaran strategis BPIP sebagaimana telah dipetakan di atas, yaitu:

1. PIP melalui arah kebijakan penguatan PIP secara nasional;
2. BPIP sebagai koordinator PIP dalam menyelenggaraan negara pada K/L/instansi di Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui: PIP; harmonisasi peraturan dan perundang-undangan; serta menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara untuk membersihkan unsur-unsur yang anti ideologi negara;
4. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan PIP yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik.

Ukuran keberhasilan sasaran strategis BPIP adalah, sebagai berikut:

Tabel 1. 1. Ukuran Keberhasilan Sasaran Strategis BPIP

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024
Mewujudkan arah kebijakan penguatan PIP secara nasional melalui undang-undang tentang Haluan PIP	Terwujudnya arah kebijakan PIP yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional	Rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden	5 Rekomendasi
Mewujudkan BPIP sebagai koordinator dalam pelebagaan PIP dalam penyelenggaraan negara pada K/L/Instansi di Pemerintah Pusat dan Daerah	Terwujudnya BPIP sebagai koordinator dalam pelebagaan PIP dalam penyelenggaraan negara pada K/L/Instansi di Pemerintah Pusat dan Daerah	Persentase K/L/Instansi di Pemerintah Pusat dan Provinsi yang melaksanakan institusionalisasi PIP	100%



Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024
Menguatkan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui: PIP; harmonisasi peraturan dan perundang-undangan; serta menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara untuk membersihkan unsur-unsur yang anti ideologi negara	Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	Nilai Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP)	77
Menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan PIP yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Nilai Reformasi Birokrasi	83
		Indeks Sistem Merit	0,81
		Opini Laporan Keuangan BPK	WTP
		Nilai SAKIP	BB
		Indeks Profesionalisme ASN	83
		Indeks Kepuasan Masyarakat	90%

Kinerja tersebut didukung dengan pelaksanaan kegiatan yang tercakup dalam Program PIP dan Program Dukungan Manajemen dengan sasaran program, yaitu:

1. Terwujudnya hubungan antar lembaga, kerja sama, sosialisasi, komunikasi dan jaringan, serta pembudayaan PIP;
2. Terwujudnya internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, apresiasi, dan pengawasan regulasi;
3. Terwujudnya perumusan arah kebijakan, pengkajian, dan standardisasi materi PIP;



4. Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan PIP bagi aparatur negara, lembaga pendidikan/keagamaan formal, dan lembaga pendidikan/keagamaan nonformal dan informal;
5. Terlaksananya pengendalian dan evaluasi PIP;
6. Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan PIP yang berkualitas.

**BAB
II**

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TRIWULAN I

A. Hubungan Antar Lembaga, Kerja Sama, Sosialisasi, dan Jaringan, serta Pembudayaan

Sebagai Lembaga yang diberi mandat dalam PIP maka fungsi koordinasi dan sinkronisasi melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Ukuran keberhasilan Sasaran Program Terjalinnya Hubungan Antar Lembaga, Kerja Sama, Sosialisasi, dan Jaringan, serta Pembudayaan:

Tabel 2. 1. Indikator Keluaran Program terjalinnya hubungan antar lembaga, kerja sama, sosialisasi, dan jaringan, serta pembudayaan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2024	REALISASI TRIWULAN I	KET
Persentase penilaian atas efektivitas HAL dan kerja sama dalam rangka pengarusutamaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti	100% (24K/L)	79% (19 K/L)	 79%
Tingkat efektivitas konten sosialisasi dan komunikasi pada media berbasis elektronik	4 Nilai	(25%) Nilai	 25%
% penilaian atas efektivitas pembudayaan nilai Pancasila	70% (100%=150 Pokmas)	8% (12 Pokmas)	 11,4%

Realisasi capaian kinerja program tersebut diperoleh dan dicapai sebagai berikut :

A.1. Efektivitas Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama Dalam Rangka Pengarusutamaan Ideologi Pancasila yang Ditindaklanjuti

Indikator Keberhasilan Program:

Persentase penilaian atas efektivitas HAL dan kerja sama dalam rangka pengarusutamaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti. Target Tahun 2024 adalah 100% (24 K/L).

Hingga Triwulan I Tahun 2024 capaian target tersebut adalah sebesar 79% (19 K/L/Pemda/Orsospol) dilakukan optimalisasi sebesar 11 K/L/Instansi di Pemerintah Pusat dan Daerah serta 8 Organisasi Sosial dan Politik serta Organisasi dengan uraian capaian adalah:

- a. Optimalisasi Kerja Sama Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah;

Pada Triwulan I tahun 2024 setelah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap optimalisasi kerja sama pembinaan ideologi Pancasila terhadap Kesepakatan yang telah di laksanakan khusus untuk Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah terdapat sebanyak sebanyak 11 Kementerian/Lembaga/Pemda/Orsospol) termasuk pemerintah daerah yang sudah sangat aktif melaksanakan dalam bentuk kegiatannya sebagai berikut :

Tabel 2. 2. Kerja Sama Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

No.	Kementerian/Lembaga/Pemda	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
1.	Kementerian Dalam Negeri	a. Keynote speaker dalam kegiatan “pendidikan dan pelatihan Wawasan Kebangsaan bagi ASN”, 29 Januari 2024	Sestama
2.	Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi	a. Undangan Kepakaran Narasumber Pengembang Kurikulum Ahli Madya pada kegiatan Rapat Koordinasi Standarisasi Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila, Yogyakarta, 6 Februari 2024	Deputi 4



No.	Kementerian/Lembaga/Pemda	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
3.	Pemerintah Kabupaten Kuningan	Gotong Royong membangun Ekonomi Pancasila melalui Festival Kuliner dan Budaya, 24 Februari 2024	Deputi 1
4.	Kementerian Hukum dan HAM	a. Penguatan PIP bagi Petugas dan Warga Binaan Lapas IIB Kayu Agung, sebagai bentuk Tindak Lanjut Kerja Sama dengan Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham, 27 Februari 2024 b. Sosialisasi Penguatan PIP bagi Petugas Lapas dan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Nusakambangan, Cilacap 27 Maret 2024	Deputi 1
5.	Pemerintah Kabupaten Pati	Pelaksanaan Peresmian Taman Pancasila dan Tugu Pancasila di Pati, 2 Maret 2024	Deputi 1
6.	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	a. Monitoring Materi PIP melalui Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila jenjang SD, SMP, SMA di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat NTT, 7 Maret 2024 b. Pelaksanaan DKT "finalisasi Draf Buku Hermeneutika	Deputi 3



No.	Kementerian/Lembaga/Pemda	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
		Karya-karya Sukarno di Ende-Menggali Falsafah Pancasila melalui surat-surat dan Tonil, NTT, 8 Maret 2024	
7.	Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang	Pelaksanaan Seminar PIP dengan tema "Pancasila sebagai dasar Ideologi Negara dan Pandangan Hidup Berbangsa dan bernegara di Kabupaten Aceh Tamiang, 8 Maret 2024	Deputi 1
8.	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	Pelaksanaan Seminar Kebangsaan "Pancasila sebagai Ideologi Pemersatu Bangsa" Riau, 19 Maret 2024	Deputi 1
9.	KPU	Pengendalian PIP dalam Pesta Demokrasi Tahun 2024, Undip (Jateng) 27 Maret 2024	Deputi 5
10.	Badan Pengawas Pemilu	Pengendalian PIP dalam Pesta Demokrasi Tahun 2024, Undip (Jateng) 27 Maret 2024	Deputi 5
11.	Sulawesi Utara	Kunjungan Apresiasi Indeks Aktualisasi Pancasila, 2 April 2024	Deputi 5

- b. Optimalisasi Kerja Sama Organisasi Sosial, Politik dan Komponen Masyarakat Lainnya.

Hingga Triwulan I tahun 2024 Jumlah total optimalisasi kerja sama setelah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap Kesepakatan yang telah di laksanakan khusus untuk universitas dan

organisasi sosial politik dan masyarakat ada sebanyak 8 Universitas/Orsospolmas yang sudah aktif melaksanakan dalam bentuk kegiatannya sebagai berikut:

**Tabel 2.3. Kerja Sama Organisasi Sosial, Politik dan
Komponen Masyarakat Lainnya**

No.	Universitas/Orsos polmas	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
1.	Universitas Gadjah Mada	a. Monitoring Program Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa Penggerak Pancasila, 21 Januari 2024 b. Undangan Kepakaran Narasumber Dosen Fakultas Filsafat pada kegiatan Rapat Koordinasi Standarisasi Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila, Yogyakarta, 6 Februari 2024 c. Sosialisasi Pancasila melalui Bedah Buku "Pancasila dari Indonesia Untuk Dunia", bekerjasama dengan PSP UGM, Yogyakarta, 19 Februari 2024	a. Deputi 1 b. Deputi 4 c. Deputi 1
2.	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	a. Sosialisasi Pancasila bagi Gen Z, 22 Januari 2024 b. Sarasehan Pancasila, 2 April 2024	Deputi 1
3.	Universitas Negeri Malang	Sosialisasi Salam Pancasila sebagai Salam Kebangsaan, 28 Januari 2024	Deputi 1
4.	Universitas Pendidikan Indonesia	a. Undangan Kepakaran Narasumber Guru Besar UPI pada kegiatan Rapat Koordinasi Standarisasi Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila, Yogyakarta, 6 Februari 2024	a. Deputi 4 b. Deputi 1



No.	Universitas/Orsos polmas	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
		b. Sosialisasi Pancasila melalui Bedah Buku "Pancasila dari Indonesia Untuk Dunia" Bandung, 19 Februari 2024	
5.	Universitas Brawijaya	Sosialisasi Pancasila melalui Bedah Buku "Pancasila dari Indonesia Untuk Dunia", Malang, 26 Februari 2024	Deputi 1
6.	IAIN Langsa	Pelaksanaan Seminar Pancasila dalam perspektif lokal dan global, 9 Maret 2024	Deputi 1
7.	UIN Maulana Malik Ibrahim (Maliki)	Stadium General "Moderasi Beragama dan Penguatan Nilai-nilai Pancasila" Malang, 21 Maret 2024	Deputi 1
8.	Universitas Diponegoro	Pengendalian PIP dalam Pesta Demokrasi Tahun 2024, 27 Maret 2024	Deputi 5

Kegiatan-kegiatan di atas adalah pembentuk indikator keberhasilan.

Tabel 2. 4. Indikator Keluaran Optimalisasi Kerja Sama Organisasi Sosial, Politik dan Komponen Masyarakat Lainnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase rekomendasi kerja sama dan hubungan antar lembaga tinggi negara, Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah dan organisasi sosial	Kesepakatan koordinasi dan sinkronisasi hubungan dengan lembaga tinggi negara, Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah bidang prioritas	20	2	10% (Kesepakatan)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
politik serta komponen masyarakat lainnya bidang prioritas yang ditindaklanjuti	Kesepakatan koordinasi dan sinkronisasi hubungan dengan organisasi sosial, politik, serta komponen masyarakat lainnya bidang prioritas	25	2	8% (Kesepakatan)
Persentase rekomendasi kerja sama dan hubungan antar lembaga tinggi negara, Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah dan organisasi sosial politik serta komponen masyarakat lainnya bidang non prioritas yang ditindaklanjuti	Kesepakatan pengembangan hubungan kemitraan antar lembaga tinggi negara, Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial politik, serta komponen masyarakat lainnya (non prioritas)	4	0	0% (Kesepakatan)
	Kesepakatan dengan organisasi sosial politik serta komponen masyarakat lainnya bidang non-prioritas	3	1	33% (Kesepakatan)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Triwulan I tahun 2024 yaitu:

Tahun ini dokumen Kerja sama yang harus dipenuhi sebanyak 24 dokumen kesepakatan yang terdiri dari dokumen kesepakatan Kementerian/Lembaga/Provinsi yang menjadi Prioritas Nasional sebanyak 20 Dokumen, sedangkan yang tidak menjadi Prioritas Nasional sebanyak 4 Dokumen.

Untuk dokumen Kesepakatan dengan Organisasi Masyarakat yang menjadi Prioritas Nasional sebanyak 25 Dokumen dan sedangkan yang tidak menjadi Prioritas Nasional sebanyak 3 Dokumen.

Pada Periode Triwulan I Tahun 2024 ini Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja sama jika dilihat berdasarkan skala prioritas untuk Kesepakatan koordinasi dan sinkronisasi hubungan

dengan lembaga tinggi negara, Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah bidang prioritas sebesar 2 kesepakatan dari target 20 kesepakatan atau sebesar 10%, dengan metode perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{capaian kesepakatan}}{20 \text{ target kesepakatan}}$$

$$= \frac{2 \text{ kesepakatan}}{20 \text{ target kesepakatan}}$$

$$= 10\%$$

Untuk Kesepakatan koordinasi dan sinkronisasi hubungan dengan organisasi sosial, politik, serta komponen masyarakat lainnya bidang prioritas mencapai 2 kesepakatan dari target 25 atau sebesar 8%, dengan metode perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{capaian kesepakatan}}{25 \text{ target kesepakatan}}$$

$$= \frac{14 \text{ kesepakatan}}{25 \text{ target kesepakatan}}$$

$$= 8\%$$

Untuk Kesepakatan pengembangan hubungan kemitraan antar lembaga tinggi negara, Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial politik, serta komponen masyarakat lainnya (non prioritas) mencapai 0 paket kesepakatan dari target 4 kesepakatan atau sebesar 0% dengan metode perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{capaian kesepakatan}}{4 \text{ target kesepakatan}}$$

$$= \frac{0 \text{ kesepakatan}}{4 \text{ target kesepakatan}}$$

$$= 0\%$$

dan Untuk Kesepakatan dengan organisasi sosial politik serta komponen masyarakat lainnya bidang non-prioritas mencapai 1

paket kesepakatan dari target 3 kesepakatan atau sebesar 33% dengan metode perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{capaian kesepakatan}}{3 \text{ target kesepakatan}}$$

$$= \frac{1 \text{ kesepakatan}}{3 \text{ target kesepakatan}}$$

$$= 33\%$$

Adapun capaian jumlah dokumen kerja sama hingga Triwulan I tahun 2024 adalah sebanyak 5 (lima) dokumen kerja sama yang sudah ditandatangani dari 52 dokumen yang menjadi *output* Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan kerja Sama dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 5. Dokumen Kerja Sama Organisasi Sosial, Politik dan Komponen Masyarakat Lainnya

NO	Jenis Kerja Sama	PIHAK	Tanggal Kerja Sama	PN/Non PN
1	Perjanjian Kerja Sama	Yayasan Anak Bangsa Indonesia	30 Januari 2024	Non PN
2	Nota Kesepakatan	Kabupaten Kuningan	24 Februari 2024	PN
3	Nota Kesepakatan	Kabupaten Pati	2 Maret 2024	PN
4	Perjanjian Kerja Sama	IAIN Langsa	9 Maret 2024	PN
5	Perjanjian Kerja Sama	UIN Maulana Malik Ibrahim	22 Maret 2024	PN

Aktivitas dan kilas peristiwa selama dalam rangka capaian kinerja Efektivitas HAL dan kerja sama dalam rangka pengarusutamaan Ideologi Pancasila yaitu:

Tabel 2. 6. Aktivitas Optimalisasi Kerja Sama Organisasi Sosial, Politik dan Komponen Masyarakat Lainnya

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Penandatanganan Naskah Kerjasama dengan Yayasan Anak Bangsa Indonesia (Jakarta, tanggal 30 Januari 2024)	
2.	FGD Review Perban Kerjasama No. 6 Th 2021 dan Penyusunan Juknis Kerjasama (Jakarta, tanggal 1 s.d.2 Februari 2024)	
3.	Penjajakan Kerja Sama dengan Pemkab Kuningan Jawa Barat (Kuningan, tanggal 5 Februari 2024)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
4.	FGD Internalisasi Mitra Kerjasama dengan Pemda (Jakarta, tanggal 12 Februari 2024)	
5.	Penjajakan Kerjasama dengan BKPSDM Bali terkait sistem informasi manajemen talenta (Bali, tanggal 16 Februari 2024)	
6.	Penandatanganan Naskah Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kuningan (Kuningan, tanggal 24 Februari 2024)	
7.	Penandatanganan Naskah Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Pati (Pati, tanggal 2 Maret 2024)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
8.	Koordinasi Tindak Lanjut Kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada, (Yogyakarta, tanggal 4 s.d. 5 Maret 2024)	
9.	FGD Internalisasi Peluang Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga (Jakarta, tanggal 6 s.d. 8 Maret 2024)	
10.	Penandatanganan Naskah Kerjasama dengan IAIN Langsa (Aceh, tanggal 9 Maret 2024)	
11.	Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara BPIP dengan UIN Maulana Malik Ibrahim (Malang, tanggal 22 Maret 2024)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
12.	Penjajakan Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Sumedang, tanggal 22 Maret 2024)	
13.	Penjajakan Kerjasama dengan IAIN Palopo (Sulawesi Selatan, tanggal 27 s.d. 29 Maret 2024)	
14.	Diskusi Kelompok Terpumpun Manajemen Kerjasama Berbasis Teknologi Informasi (Jakarta, tanggal 1 s.d. 2 April 2024)	

A.2. Tingkat efektivitas konten sosialisasi dan komunikasi pada media berbasis elektronik

Indikator Keberhasilan Program

Tingkat efektivitas konten sosialisasi dan komunikasi pada media berbasis elektronik. Target Tahun 2024 adalah 5 Nilai.

Pada Triwulan I Tahun 2024 capaian target tersebut adalah sebesar 100% Nilai dengan uraian capaian bahwa saat ini masih dilakukan proses sosialisasi dan komunikasi dan penilaian dilakukan di akhir tahun untuk semua konten yang dibuat. Untuk menentukan tingkatan nilai di atas dengan formulasi :

$$\text{Nilai Capaian Target} = \frac{\text{jumlah viewers (n)}}{\text{jumlah konten (n)}}$$

Adapun kategori nilai tersebut adalah sebagai berikut:

- 1 = 0-5 nilai (sangat tidak efektif)
- 2 = 6-10 nilai (tidak efektif)
- 3 = 11-15 nilai (cukup efektif)
- 4 = 16-20 nilai (efektif)
- 5 = 21-25 nilai (sangat efektif)

Hingga Tiruwan I Tahun 2024 dukungan Deputy I terhadap capaian IKU tersebut Sangat Efektif hal ini terlihat pada capaian optimalisasi Tingkat efektivitas konten sosialisasi dan komunikasi pada media berbasis elektronik. Target Tahun 2024 adalah 5 (Lima) Nilai. Hingga Triwulan I Tahun 2024 capaian target tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 7. Indikator Efektivitas Konten Sosialisasi dan Komunikasi pada Media Berbasis Elektronik

NO	Judul	Tahun	Qty	Viewers
1	Sosialisasi Nilai-Nilai Luhur Pancasila melalui Bedah Buku 'Pancasila dari Indonesia untuk Dunia	2024	1	190
2	Seminar Nasional dan Bedah Buku: "Pancasila dari Indonesia untuk Dunia" di Kampus UGM Yogyakarta	2024	1	194
3	Bedah Buku: Pancasila dari Indonesia untuk Dunia	2024	1	143
4	Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila di Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Jawa Timur	2024	1	126
Jumlah			4	653
Nilai (view/qty konten)			163.25	
Kategori Nilai			5	



Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Triwulan I Tahun 2024 adalah:

Tabel 2. 8. Indikator Keluaran Tingkat Efektivitas Konten Sosialisasi dan Komunikasi pada Media Berbasis Elektronik

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase konten sosialisasi PIP yang ditindaklanjuti	Layanan sosialisasi kepada Kementerian/Lembaga/Daerah	4	52%	52% (Layanan)
Persentase strategi komunikasi terhadap isu PIP yang ditindaklanjuti	Layanan komunikasi melalui media massa	4	25%	25% (Layanan)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Triwulan I tahun 2024 yaitu:

	Target	JUMLAH CAPAIAN	URAIAN
Layanan sosialisasi kepada Kementerian/Lembaga/daerah:		52%	layanan
- Penyusunan materi	2	2	Paket
- Sosialisasi Pancasila di daerah	37	13	Lokus
- Sosialisasi di KL	4	2	K/L
- Sosialisasi pada Hari Besar	4	1	Kegiatan
Layanan komunikasi melalui media massa:		25%	layanan
- Penyusunan materi komunikasi	2	0	Paket
- Pengembangan komunikasi melalui media TV	3	4	Program
- Pengembangan komunikasi melalui media cetak dan online	15	0	Program



	Target	JUMLAH CAPAIAN	URAIAN
- Pengembangan komunikasi melalui media radio	2	0	Program

a. Layanan sosialisasi kepada Kementerian/Lembaga/Daerah

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdiri dari 4 layanan yang dirincikan pada masing-masing komponen, diantaranya:

1) Penyusunan Materi Sosialisasi di Media Sosial

Hingga Triwulan I 2024 telah mencapai 2 (dua) *output* kegiatan dengan uraian paket yaitu:

No	Nama Kegiatan	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan
1.	Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Strategi Materi Sosialisasi dan Komunikasi dalam Penguatan dan Pembinaan Ideologi Pancasila di Solo	19 s.d. 21 Januari 2024
2.	Diskusi Kelompok Terpumpun Strategi Sosialisasi Pancasila di Ruang Publik di Yogyakarta	15 s.d. 17 Februari 2024

2) Sosialisasi Pancasila di Daerah

Pada Triwulan I Tahun 2024 telah mencapai 13 (tiga belas) *output* dimana uraian lokus diantaranya :

No	Nama Kegiatan	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan
1.	Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Generasi Z dengan tema "Meneguhkan Eksistensi Demokrasi Pancasila Demi Terwujudnya Negara Yang Maju dan Bermartabat" di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Yogyakarta, DIY, 22 Januari 2024
2.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Sebagai Salam Kebangsaan "Memperkokoh Mental Mahasiswa Menuju Pesta Demkorasi 2024 Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila", di Universitas Negeri Malang dan Koordinasi Persiapan Acara Sosialisasi PIP melalui Bedah Buku Pancasila untuk Dunia di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur	Malang, 29 Januari 2024



No	Nama Kegiatan	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan
3.	Sosialisasi Nilai-Nilai Luhur Pancasila Melalui Bedah Buku "Pancasila Dari Indonesia Untuk Dunia" di Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Jawa Barat	Bandung, 19 Februari 2024
4.	Sosialisasi Nilai-Nilai Luhur Pancasila Melalui Bedah Buku "Pancasila Dari Indonesia Untuk Dunia" di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Yogyakarta, 21 Februari 2024
5.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Seminar Pancasila untuk Dunia: "To Build the World A New" di Universitas Brawijaya, Malang	Malang, Jawa Timur, 26 Februari 2024
6.	Sosialisasi Penguatan Pembinaan Ideologi Pancasila "Peduli Stunting Sebagai Wujud Implementasi Nilai-nilai Pancasila Dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045" di Kab. Grobogan, Jawa Tengah	Grobogan, Jawa Tengah, tanggal 01 Maret 2024
7.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila di Pemerintah Kab. Aceh Tamiang, Aceh	Aceh Tamiang, Aceh, 08 Maret 2024
8.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila di Pondok Pesantren Al-Hidayah, Kab. Aceh Tamiang Provinsi Aceh	Aceh Tamiang, Aceh, 08 Maret 2024
9.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila di IAIN Zawiyah Cot Kala Kota Langsa, Provinsi Aceh	Langsa, Aceh, 09 Maret 2024
10.	Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila di Ponpes Kananga Kab, Pandeglang, Banten	Pandeglang, 16 Maret 2024
11.	Sosialisasi dan Penguatan Ideologi Pancasila di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di Malang	Malang, 22 Maret 2024
12.	Kegiatan Sosialisasi kepada Warga Binaan dan Petugas Lembaga Permayarakatan di Lembaga Permayarakatan Nusakambangan Tanggal 27 Maret 2024	Cilacap, 27 Maret 2024
13.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan di Nusakambangan" dan "Seminar Penguatan Moderasi Beragama Dalam Mewujudkan Kedamaian dan Keakraban Perspektif Maqashid Al-Syari'ah di Cilacap	Cilacap, 28 Maret 2024

3) Sosialisasi Pancasila di Lingkungan Kementerian/Lembaga

Pada Triwulan I tahun 2024 telah mencapai 2 (dua) *output* dimana dengan uraian yaitu:

No	Nama Kegiatan	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan	Keterangan (Jumlah Peserta)
1.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan dan Warga Binaan Pemasyarakatan LP Kelas IIB di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	Ogan Komeling Ilir, 27 Februari 2024	200 Orang
2.	Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Rangka Penguatan Nilai Kebangsaan Sinergi BPIP bersama Mabes AD “Pancasila sebagai Ideologi Pemersatu Bangsa Indonesia” di Pekanbaru, Riau	Pekanbaru, 19 Maret 2024	500 Orang

4) Sosialisasi Pancasila Pancasila Pada Peringatan Hari Besar Nasional

Pada Triwulan I tahun 2024 telah mencapai 1 (satu) *output* dimana dengan uraian kegiatan diantaranya yaitu:

No	Nama Kegiatan	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
1.	Seminar Kebangsaan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam rangka Perayaan Hari Nyepi Tahun Saka 1946/2024 “Implementasi Pancasila dalam Perayaan Hari Suci Agama – Agama di Indonesia”	Jakarta, 31 Maret 2024	100 Orang

b. Layanan komunikasi melalui media massa

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdiri dari 4 layanan yang dirincikan pada masing-masing komponen, diantaranya:

1) Pengembangan Komunikasi melalui Media TV

Pada Triwulan I Tahun 2024 telah mencapai 7 (tujuh) *output* kegiatan dengan uraian program diantaranya yaitu:

No	Nama Kegiatan	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan
1.	Peliputan Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Bedah Buku “Pancasila dari Indonesia Untuk Dunia” di Universitas Pendidikan Indonesia	Bandung pada tanggal 19 Februari 2024
2.	Peliputan Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Bedah Buku “Pancasila dari Indonesia Untuk Dunia” di Universitas Gadjah Mada	Yogyakarta, pada tanggal 21 Februari 2024
3.	Peliputan Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Bedah Buku “Pancasila dari Indonesia Untuk Dunia” di Universitas Brawijaya	Malang, pada tanggal 26 Februari 2024
4.	Peliputan Kegiatan Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila melalui Bedah Buku “Islam dan Pancasila	Jakarta

Tabel 2. 9. Aktivitas Tingkat Efektivitas Konten Sosialisasi dan Komunikasi pada Media Berbasis Elektronik

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Strategi Materi Sosialisasi Dan Komunikasi Dalam Penguatan Dan Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 19 s.d. Januari 2024)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
2.	Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Generasi Z BPIP RI bersama Pusat Studi Pancasila dan Bela Negara UIN Sunan Kalijaga di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta, tanggal 22 Januari 2024)	
3.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Sebagai Salam Kebangsaan "Memperkokoh Mental Mahasiswa Menuju Pesta Demkorasi 2024 Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila", di Universitas Negeri Malang (Malang, tanggal 29 Januari 2024)	
4.	Diskusi Kelompok Terpumpun Optimalisasi Media Ruang Publik Sebagai Sarana Sosialisasi Pancasila (Yogyakarta, tanggal 15 s.d. 17 Februari 2024)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
5.	Sosialisasi Nilai-Nilai Luhur Pancasila Melalui Bedah Buku “Pancasila Dari Indonesia Untuk Dunia” di Universitas Pendidikan Indonesia, (Bandung, tanggal 19 Februari 2024)	
6.	Sosialisasi Nilai-Nilai Luhur Pancasila Melalui Bedah Buku “Pancasila Dari Indonesia Untuk Dunia” di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (Yogyakarta, tanggal 21 Februari 2024)	
7.	Sosialisasi Nilai-Nilai Luhur Pancasila Melalui Bedah Buku “Pancasila Dari Indonesia Untuk Dunia” di Universitas Brawijaya (Malang, tanggal 26 Februari 2024)	
8.	Sosialisasi Penguatan Pembinaan Ideologi Pancasila “Peduli Stunting Sebagai Wujud Implementasi Nilai-nilai Pancasila Dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045” di Kab. Grobogan (Jawa Tengah, tanggal 1 Maret 2024)	



No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
9.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila di Pemerintah Kab. Aceh Tamiang (Aceh, tanggal 8 Maret 2024)	
10.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila di Pondok Pesantren Al-Hidayah (Aceh, tanggal 8 Maret 2024)	
11.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila di IAIN Zawiyah Cot Kala Kota Langsa (Aceh, tanggal 9 Maret 2024)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
12.	Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila di Ponpes Kananga Kab, Pandeglang (Banten, tanggal 16 Maret 2024)	
13.	Sosialisasi PIP dalam Rangka Penguatan Nilai Kebangsaan Sinergi BPIP bersama Mabes AD melalui seminar dengan tema "Pancasila sebagai Dasar Ideologi Bangsa" di Pekanbaru (Riau, tanggal 19 Maret 2024)	
14.	Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila melalui Bedah Buku "Islam dan Pancasila Perspektif Maqashid Syariah (Malang, tanggal 22 Maret 2024)	
15.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan di Nusakambangan" (Cilacap, tanggal 27 Maret 2024)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
16.	Seminar Penguatan Moderasi Beragama Dalam Mewujudkan Kedamaian dan Keakraban Perspektif Maqashid Al-Syari'ah (Cilacap, tanggal 28 Maret 2024)	
17.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dalam rangka Perayaan Hari Nyepi Tahun Saka 1946/2024" (Jakarta, tanggal 31 Maret 2024)	

A.3. Penyelenggaraan Pembudayaan Ideologi Pancasila

Indikator Keberhasilan Program

Persentase penilaian atas efektivitas pembudayaan nilai Pancasila. Target Tahun 2024 adalah 70%. Target tersebut adalah target tahunan dan bukan merupakan target akumulasi dari tahun 2020 sampai dengan 2024. sasaran Pembudayaan setiap tahun berbeda-beda, misal dari target 150 pokmas tahun 2024 berbeda dengan target 100 pokmas di tahun 2023. Target 70% tahun 2024 adalah mereprentasikan keberhasilan pembudayaan kepada 150 sasaran tersebut.

Pada Triwulan I Tahun 2024 capaian target tersebut adalah sebesar 11,4% (12 Pokmas dari 150 Pokmas yang dilakukan pembudayaan). Uraian capaian adalah masyarakat yang telah

menerima pembudayaan PIP sebanyak 12 kelompok masyarakat telah mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dengan uraian capaian adalah:

Tabel 2. 10. Daftar Komunitas / Kelompok Masyarakat yang telah melaksanakan aktualisasi

No.	Nama Pokmas/Komunitas
1.	Yayasan Darma Bakti Karya
2.	Pondok Pesantren Tahsinul Akhlaq Bahrul Ulum
3.	PCNU Surabaya
4.	Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Muhammadiyah Gersikan Tambaksari
5.	Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika
6.	Badan Kerja Sama Antar Gereja Kabupaten Pati
7.	Yayasan Subur Makmur Sejahtera
8.	Gabungan Organisasi Wanita Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (GOW PKK) Kabupaten Pati
9.	Yayasan Al Khidmah Kabupaten Pati
10.	Permadani (Persaudaraan Masyarakat Budaya Nasional Indonesia)
11.	Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Pati
12.	Yayasan Maqam Ki Ageng Penjawi

Capaian IKU sasaran program tersebut didukung oleh kegiatan Penyelenggaraan Jaringan dan Pembudayaan Ideologi Pancasila.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pada Triwulan I Tahun 2024 adalah:

Tabel 2. 11. Indikator Keluaran Penyelenggaraan Jaringan dan Pembudayaan Ideologi Pancasila

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase rekomendasi hasil pembudayaan Pancasila yang ditindaklanjuti	Rekomendasi hasil pembudayaan Pancasila	1	14%	14% (Rekomendasi)
Persentase jaringan yang mengaktualisasikan Pancasila	Fasilitasi Pembinaan Ideologi Pancasila melalui relawan Gerakan kebajikan Pancasila	150	12	8% (Kelompok Masyarakat)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Triwulan I tahun 2024 yaitu:

- a. Persentase rekomendasi hasil pembudayaan Pancasila yang ditindaklanjuti

Tersusunnya Rekomendasi hasil pembudayaan Pancasila yang ditindaklanjuti, yaitu saat ini masih tahap penyusunan modul Pedoman Penguatan Karakter Pancasila bagi Siswa dan Orangtua sebagai bagian dari rekomendasi hasil pembudayaan Pancasila.

- b. Persentase jaringan yang mengaktualisasikan Pancasila

Tahun 2024 ini target dari kelompok target yang melaksanakan aktualisasi Pancasila setelah pembudayaan yaitu 150 kelompok. Untuk Triwulan I Tahun 2024 tercapai 12 kelompok masyarakat atau sebesar 8% dari total keseluruhan capaian.

Aktivitas dan kilas peristiwa dalam rangka capaian kinerja Persentase penilaian atas efektivitas pembudayaan nilai Pancasila Triwulan I Tahun 2024 adalah:

Tabel 2. 12. Aktivitas Penyelenggaraan Pembudayaan Ideologi Pancasila

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Penghargaan Pembinaan Ideologi Pancasila "Rapat Penyusunan Peta Jalan (Road Map) Penjaringan Ikon Prestasi Pancasila Tahun 2024 (Jakarta, tanggal 19 s.d. 19 Januari 2024)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
2.	Inovasi Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila "Penyusunan Buku Pedoman Penguatan Karakter Pancasila Modul I: Hidup Mulia" (Jakarta, tanggal 5 s.d. 7 Februari 2024)	
3.	Koordinasi dalam Rangka Haul W.R. Supratman dengan Dinas Sosial Kota Surabaya dan Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Jawa Timur Terkait Buku Teks Utama Pancasila di Surabaya (Surabaya, tanggal 26 s.d. 29 Februari 2024)	
4.	Temu Wicara Bersama Komunitas Budaya dalam rangka Pembudayaan Gotong Royong di Kabupaten Pati (Pati, tanggal 29 Februari s.d. 3 Maret 2024)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
5.	Inovasi Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila "Evaluasi dan Simulasi Modul I : Hidup Mulia serta Penyusunan Buku Pedoman Penguatan Karakter Pancasila Modul II: Tumbuh Mandiri (Jakarta, tanggal 3 s.d. 6 Mareti 2024)	
6.	Rapat Konsolidasi Ikon Prestasi Pancasila Tahun 2024 (Jakarta, tanggal 13 s.d. 15 Maret 2024)	
7.	Rapat Teknis Ikon Prestasi Pancasila Tahun 2024 dan Kirab Pancasila (Jakarta, tanggal 18 s.d. 20 Maret 2024)	



No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
8.	Pembudayaan Gotong Royong dalam Rangka Ngaji Pancasila dan Haul WR. Supratman Bersama Tokoh Lintas Agama dan Santri (Jakarta, tanggal 19 s.d. 24 Maret 2024)	
9.	Penguatan Jaringan Relawan Pancasila Melalui Evaluasi Pedoman Pembudayaan Program KKN Mahasiswa Desa Berdikari (Jakarta, tanggal 25 s.d. 27 Maret 2024)	

B. Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila di Bidang Hukum, Advokasi, Apresiasi, dan Pengawasan Regulasi

Melembagakan Pancasila pada setiap peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mendorong terjadinya pelembagaan Pancasila dalam setiap penyusunan program pembangunan nasional, dasar peraturan, perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah. Pancasila sebagai falsafah, pandangan hidup, dan ideologi kenegaraan Indonesia mengandung cita hukum tersendiri yang secara terus menerus dilakukan internalisasi dan institusionalisasi. Bahwa nilai-nilai Pancasila harus dipandang sebagai norma dasar bernegara (*grundnorm/staatsfundamentalnorn*) yang menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Indikator Keberhasilan Sasaran Program Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila di Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi adalah termanfaatkan dan ditindaklanjuti capaian keluaran yang dihasilkan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 13. Indikator Keluaran Program Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila di Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2024	REALISASI	Ket
Jumlah rekomendasi arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi dan pengawasan regulasi yang ditindaklanjuti	1 Rekomendasi	25.6%	 25.6%
Jumlah rekomendasi hasil penyelarasan rancangan kebijakan dan regulasi serta hasil kajian kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai pancasila yang ditindaklanjuti	20 Rekomendasi	25%	 25%

Realisasi capaian kinerja program tersebut diperoleh dan dicapai sebagai berikut :

B.1. Rekomendasi Arah Kebijakan Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila di Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi yang Ditindaklanjuti.

Indikator Keberhasilan:

Jumlah rekomendasi arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi dan pengawasan regulasi yang ditindaklanjuti. Target Tahun 2024 adalah pemanfaatan 1 Rekomendasi.

Pada Triwulan I Tahun 2024 capaian target tersebut adalah sebesar 25,6% (rata-rata persentase capaian *output*) dengan uraian capaian sebagai berikut:

Capaian IKU sasaran program tersebut didukung oleh kegiatan:

- Pelaksanaan Analisis dan Penyelarasan Hukum Nasional terhadap Nilai-Nilai Pancasila
- Penyusunan dan Pelaksanaan Advokasi PIP

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Triwulan I Tahun 2024 adalah:

Tabel 2. 14. Indikator keluaran Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila di Bidang Hukum, Advokasi, Serta Pengawasan Regulasi yang Dimanfaatkan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase rekomedasi hasil analisis dan penyelarasan peraturan perundang-undangan terhadap nilai-nilai Pancasila	Rekomendasi rancangan produk hukum yang bertentangan dengan nilai Pancasila	3	25%	25% (Rekomendasi) tiga bidang Polhukam, Bidang Ekomarinvest, bidang PMK)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase rekomendasi hasil internalisasi dan institusionalisasi Pancasila dalam kebijakan dan regulasi yang ditindaklanjuti	Rekomendasi arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila dalam hukum nasional dan peraturan daerah	1	20%	20% (Rekomendasi)
Persentase rekomendasi advokasi PIP yang ditindaklanjuti	Rekomendasi advokasi PIP terhadap Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial/politik dan komponen masyarakat lainnya serta purnapaskibraka	3	32%	32% (Rekomendasi)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Triwulan I tahun 2024 yaitu:

- Persentase rekomedasi hasil analisis dan penyelarasan peraturan perundang-undangan terhadap nilai-nilai Pancasila

Pancasila sebagai paradigma dalam pengetahuan sebagai landasan dalam pembangunan nasional. Untuk mewujudkan dalam pembangunan, nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Untuk itu, dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai Pancasila harus ditempatkan sebagai nilai bersifat meta-yuridis yang melandasi lahirnya norma-norma hukum di bawah UUD 1945 yang mengikat semua warga, kementerian dan lembaga.

Menyadari hal tersebut, sangat diperlukan pemahaman yang utuh dan mendasar terhadap kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil yang diharapkan dari pemahaman itu, nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan modal oleh bangsa Indonesia

untuk melakukan pembangunan nasional yang secara garis besar meliputi pembangunan di bidang : (a)Polhukam; (b) Ekomarivest; (c) PMK. Artinya, pembangunan nasional harus benar-benar merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata bangsa Indonesia, dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berdaulat secara politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan dan bersendikan gotong royong.

Untuk saat ini rekomedasi hasil analisis dan penyelarasan peraturan perundang-undangan terhadap nilai-nilai Pancasila masih dalam tahap koordinasi awal, kajian dan penyusunan sehingga capaian sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar 25%. Berikut adalah proses rekomendasi dari hasil yang dicapai sampai dengan :

Tabel 2. 15. Rekomendasi hasil internalisasi dan institusionalisasi Pancasila dalam kebijakan dan regulasi yang ditindaklanjuti

No.	Judul Rancangan Peraturan Daerah	Keterangan
1.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan	Koordinasi Awal 25%
2.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Kutai Kartanegara	Koordinasi Awal 25%an
3.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Magelang tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Koordinasi Awal 25%
4.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tentang Pembangunan Industri Kota Surakarta	Koordinasi Awal 25%
5.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DI Yogyakarta	Koordinasi Awal 25%an
6.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Koordinasi Awal 25%
7	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai	Koordinasi Awal 25%
8.	Rancangan Peraturan Daerah di Sumatera Barat Indonesia Dan Perlindungan Bahasa Daerah Dan Satra Daerah	Koordinasi Awal 25%

Dari tabel diatas terdapat 8 peraturan yang masih dalam tahap penyelarasan dari 10 rancangan peraturan yang harus ditindaklanjuti sehingga capaian sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar 25%.

Keterangan :

0-10%	Perencanaan	Belum Terlaksana
11-25%	Koordinasi Awal	Akan dilaksanakan
26-50%	Inisisasi dan Kajian	Akan dilaksanakan
51-100%	Tahapan Penyelesaian	Telah dilaksanakan

b. Persentase rekomendasi hasil internalisasi dan institusionalisasi Pancasila dalam kebijakan dan regulasi yang ditindaklanjuti

Dukungan Deputy Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi terhadap capaian IKU tersebut adalah menghasilkan 1 Rekomendasi arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila dalam hukum nasional dan peraturan daerah yang dimana pada Triwulan I ini masih dalam tahap Penyusunan Arah Kebijakan Internalisasi dan Institusionalisasi Nilai Pancasila di Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi sehingga capaian sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 20%.

Keterangan :

0-10%	Perencanaan	Belum Terlaksana
11-25%	Koordinasi Awal	Akan dilaksanakan
26-50%	Inisisasi dan Kajian	Akan dilaksanakan
51-100%	Tahapan Penyelesaian	Telah dilaksanakan

c. Persentase rekomendasi advokasi PIP yang ditindaklanjuti

Hingga Triwulan I tahun 2024 Dukungan Deputy Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi terhadap capaian IKU tersebut adalah menghasilkan 3 Rekomendasi advokasi PIP terhadap Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial/politik dan komponen masyarakat lainnya serta purnapaskibraka duta Pancasila yang terdiri dari 6 kajian rancangan peraturan perundang-undangan terbagi dalam 3 bidang kajian yakni bidang Polhukam, bidang Ekomarivest, dan bidang PMK berikut adalah proses dari hasil yang dicapai sampai Triwulan I 2024 :

Tabel 2. 17. Rekomendasi advokasi PIP yang ditindaklanjuti

No.	Judul Kajian Rekomendasi Advokasi Penyelesaian Dan Penanggulangan Masalah	Keterangan
1.	Penanganan masalah dan kendala tindak kekerasan atau bullying di lingkungan Pendidikan	Dalam tahap proses inventarisasi masalah
2.	Penanganan Masalah dan Kendala dalam bidang Keagamaan	Dalam tahap proses pendampingan masalah
3.	Advokasi Goes To School	Dalam tahap proses inisiasi
4.	Pendampingan terhadap kelompok rentan dan masyarakat adat	Dalam tahap proses kajian
5.	Advokasi PIP pada Purnapaskibraka	Dalam tahap proses inisiasi
6.	Advokasi PIP diwilayah 3 T (tertinggal, terdepan dan terluar)	Dalam tahap proses kajian

Untuk Triwulan I tahun 2024 rekomedasi advokasi PIP yang ditindaklanjuti masih dalam tahap proses inisiasi, kajian dan pendampingan sehingga capaian sampai dengan Triwulan I tahun 2024 adalah sebesar 32%.

Keterangan :

0-10%	Perencanaan	Belum Terlaksana
11-25%	Koordinasi Awal	Akan dilaksanakan
26-50%	Inisisasi dan Kajian	Akan dilaksanakan
51-100%	Tahapan Penyelesaian	Telah dilaksanakan

Aktivitas dan kilas peristiwa dalam rangka capaian kinerja pada Triwulan I 2024 adalah:

Tabel 2. 18. Aktivitas Pelaksanaan Analisis dan Penyelarasan Hukum Nasional terhadap Nilai- Nilai Pancasila

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Koordinasi Terkait Internalisasi dan Institusionalisasi Nilai Pancasila bagi JFT Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Bangka Belitung, tanggal 12 Januari 2024).	
2.	Koordinasi Internalisasi dan Institusionalisasi Nilai-Nilai Pancasila di Karaton Kasunan Surakarta Hadiningrat dan Persiapan Penyelarasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta dan Kabupaten Klaten (Jawa Tengah, tanggal 17 s.d 21 Januari 2024).	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
3.	Konsultasi Pansus DPRD Kab. Kutai Kartanegara bersama BPIP terkait Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Pancasila (Jakarta, tanggal 18 Januari 2024).	
4.	Persiapan Kegiatan Internalisasi dan Institusionalisasi Indikator Nilai Pancasila Melalui Bimbingan Teknis Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan di Provinsi Sumatera Barat (Sumatera Barat, tanggal 5 s.d 8 Februari 2024).	
5.	Pengimplementasian Internalisasi dan Institusionalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Koordinasi Persiapan Kegiatan Bimbingan Teknis Penyelarasan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Bangka Belitung, tanggal 12 Februari 2024).	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
6.	Penyelarasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kutai Kartanegara, tanggal 16 Februari 2024).	
7.	Persiapan Kegiatan Penyelarasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2024 (Yogyakarta, tanggal 20 Februari 2024).	
8.	Penyelarasan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Morotai, tanggal 20 Februari 2024).	
9.	Audiensi DPRD Kab. Bondowoso dlm rangka konsultasi pembahasan Ranperda tentang PPWK (Jakarta, tanggal 28 Februari 2024).	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
10.	Penyelarasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Surakarta tahun 2023 – 2043 (Surakarta, tanggal 22 Februari 2024).	
11.	Koordinasi dan Persiapan Bimbingan Teknis Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulawesi Selatan, tanggal 29 Februari s.d. 3 Maret 2024).	
12.	Penyelarasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (Magelang, tanggal 6 s.d. 9 Maret 2024).	
13.	Kegiatan Internalisasi dan Institusionalisasi Nilai Pancasila Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Sumatera Barat (Sumatera Barat, tanggal 17 s.d. 20 Maret 2024).	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
14.	Penyelarasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan (Pekalongan, tanggal 21 s.d. 23 Maret 2024).	
15.	Kegiatan Penyusunan Arah Kebijakan Internalisasi dan Institusionalisasi Nilai Pancasila di Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi (Jakarta, tanggal 25 s.d. 26 Maret 2024).	

Tabel 2. 19. Aktivitas Penyusunan dan Pelaksanaan Advokasi PIP

No	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Program Advokasi Goes To School Sebagai Bentuk Advokasi Penanganan dan Penyelesaian Permasalahan Pembinaan Ideologi Pancasila di (Sumatera Utara, tanggal 6 s.d. 8 Februari 2024)	

No	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
2.	Koordinasi Program Advokasi Goes To School dalam rangka Pencegahan, Penanganan Penyelesaian Permasalahan dan Kendala PIP pada Lingkungan Pendidikan di Provinsi Maluku (Maluku, tanggal 19 s.d. 21 Februari 2024)	
3.	Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Program Advokasi Goes To School sebagai Bentuk Advokasi, Penanganan dan Penyelesaian Permasalahan Pembinaan Ideologi Pancasila di Sekolah di Kabupaten Kuningan (Kuningan, tanggal 22 s.d. 25 Februari 2024)	
4.	Koordinasi Advokasi Goes To School dalam Rangka Pencegahan, Penyelesaian dan Penanggulangan Masalah dan Kendala Pembinaan Ideologi Pancasila di Provinsi Sumatera Selatan (Jakarta, tanggal 26 s.d. 29 Februari 2024)	

No	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
5.	Koordinasi Advokasi Pencegahan, Penyelesaian dan Penanggulangan Masalah dan Kendala Pembinaan Ideologi Pancasila dalam rangka Penguatan Moderasi Beragama di Provinsi Jawa Timur (Jawa Timur, tanggal 3 s.d. 5 Maret 2024)	
6.	Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bandung (Bandung, tanggal 15 s.d. 17 Maret 2024)	
7.	Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Rangka Penguatan Kebijakan dan Regulasi guna Penyelesaian Perbuatan Sikap dan Permasalahan Lain Yang Bertentangan dengan Pancasila di Malang Raya (Malang, tanggal 21 s.d. 23 Maret 2024)	
8.	Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Penanganan dan Penyelesaian Permasalahan Bidang Ekonomi, Maritim dan Investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Bangka Belitung , tanggal 26 s.d. 29 Maret 2024)	

B.2. Rekomendasi Atas Hasil Pengawasan dan Kajian Kebijakan atau Regulasi yang Diduga Bertentangan dengan Nilai Pancasila

Indikator Keberhasilan:

Jumlah rekomendasi hasil penyelarasan rancangan kebijakan dan regulasi serta hasil kajian kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai pancasila yang ditindaklanjuti. Target Tahun 2024 adalah tindak lanjut 20 rekomendasi.

Pada Triwulan I Tahun 2024 capaian target tersebut adalah sebesar 25%, yaitu tercapai 11 Rekomendasi hasil penyelarasan rancangan kebijakan dan regulasi serta hasil kajian kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai pancasila yang ditindaklanjuti yang masih dalam tahap perenaan dan koordinasi awal. Dokumen kajian dengan uraian capaian (perhitungan) adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 20. Rekomendasi hasil penyelarasan rancangan kebijakan dan regulasi serta hasil kajian kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai pancasila yang ditindaklanjuti
Ditindaklanjuti

No	Judul Rancangan Peraturan Daerah	Keterangan
1.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan	Koordinasi Awal 25%
2.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Kutai Kartanegara	Koordinasi Awal 25%an
3.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Magelang tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Koordinasi Awal 25%
4.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tentang Pembangunan Industri Kota Surakarta	Koordinasi Awal 25%
5.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DI Yogyakarta	Koordinasi Awal 25%n
6.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Koordinasi Awal 25%
7	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai	Koordinasi Awal 25%

No	Judul Rancangan Peraturan Daerah	Keterangan
8.	Rancangan Peraturan Daerah di Sumatera Barat Indonesia Dan Perlindungan Bahasa Daerah Dan Satra Daerah	Koordinasi Awal 25%
9.	Peraturan DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Yogyakarta	Koordinasi Awal 25%
10.	Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Tasikmalaya	Koordinasi Awal 25%
11.	UU Perimbangan Pusat dan Daerah	Koordinasi Awal 25%

Keterangan :

0-10%	Perencanaan	Belum Terlaksana
11-25%	Koordinasi Awal	Akan dilaksanakan
26-50%	Inisisasi dan Kajian	Akan dilaksanakan
51-100%	Tahapan Penyelesaian	Telah dilaksanakan

Capaian IKU sasaran program tersebut didukung oleh kegiatan:

Pelaksanaan Internalisasi, Institusionalisasi Pancasila dan Regulasi yang Bertentangan dengan Nilai-Nilai Pancasila.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pada Triwulan I Tahun 2024 adalah:

Tabel 2. 21. Indikator keluaran Rekomendasi atas Regulasi yang Bertentangan dengan Nilai-Nilai Pancasila yang Ditindaklanjuti

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan nilai pancasila yang ditindaklanjuti	Rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila	3	25%	25% (Rekomendasi)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Triwulan I Tahun 2024 yaitu:

Rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila tercapai sebesar 25%. Dimana sampai saat ini masih dalam proses koordinasi awal dan persiapan adalah :

Tabel 2. 22. Rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila

No.	Judul Kajian Rekomendasi Peraturan Eksisting	Keterangan
1.	Peraturan DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Yogyakarta	Koordinasi Awal 25%
2.	Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Tasikmalaya	Koordinasi Awal 25%
3.	UU Perimbangan Pusat dan Daerah	Koordinasi Awal 25%

Keterangan :

0-10%	Perencanaan	Belum Terlaksana
11-25%	Koordinasi Awal	Akan dilaksanakan
26-50%	Inisisasi dan Kajian	Akan dilaksanakan
51-100%	Tahapan Penyelesaian	Telah dilaksanakan

Aktivitas dan foto dokumentasi dalam rangka capaian kinerja rekomendasi atas regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila pada Triwulan I Tahun 2024 adalah:

Tabel 2. 23. Aktivitas Rekomendasi Atas Hasil Pengawasan dan Kajian Kebijakan atau Regulasi yang Diduga Bertentangan dengan Nilai Pancasila

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Koordinasi Persiapan dan Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan Bersama Direktorat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi Tahun Anggaran 2024	
2.	Koordinasi Lanjutan Persiapan dan Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi Tahun Anggaran 2024	
3.	Koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Sumedang dan Akademisi terkait pengawasan Kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan Nilai Pancasila	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
4.	Koordinasi dan pengumpulan data dan penjajakan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan dan regulasi Tahun Anggaran 2024 (TIM A DAN B) Pada kunjungan ini Dit. PRKR melaksanakan Penjajakan mengenai UU Perimbangan Pusat dan Daerah, serta koordinasi mengenai UU PL2B.	
5.	Kegiatan Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila Bersama Pemerintah Daerah Terkait Pengawasan Kebijakan dan Regulasi yang Bertentangan dengan Nilai Pancasila di Palembang dan Kabupaten Ogan Komering Ilir	
6.	Rapat Koordinasi Internal Direktorat Penyusunan rekomendasi Kebijakan dan Regulasi membahas Persiapan dan Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2024.	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
7.	Internalisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Rangka Evaluasi Kebijakan dan Regulasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Kementerian Hukum dan HAM.	
8.	Koordinasi Awal Dalam Rangka Penyusunan Kajian Dan Rekomendasi Terhadap Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Tasikmalaya bersama Universitas Pendidikan Indonesia	
9.	Koordinasi Awal Dalam Rangka Penyusunan Kajian Dan Rekomendasi Terhadap Peraturan DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Yogyakarta, Yogyakarta 26 s.d. 28 Maret 2024)	

C. Perumusan Arah Kebijakan, Pengkajian, dan Standardisasi Materi PIP

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP sebagai lembaga PIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP, Deputy Bidang Pengkajian dan Materi memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan arah kebijakan PIP, pengkajian dan perumusan standardisasi materi PIP. Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi pentingnya penyelenggaraan perumusan arah kebijakan PIP, pengkajian dan perumusan standardisasi materi PIP, diantaranya adalah:

1. Intensitas pembelajaran Pancasila selama era reformasi mengalami penurunan yang mengakibatkan kurangnya wawasan Pancasila di kalangan pelajar dan kaum muda;
2. Kurangnya efektivitas dan daya tarik pembelajaran Pancasila secara isi dan metodologi;
3. Masih adanya distorsi sejarah akibat kurangnya akses terhadap sumber otentik;
4. Rendahnya tingkat kedalaman literasi masyarakat Indonesia secara umum yang berakibat menurunnya daya pikir dan nalar kritis;
5. Pemahaman terhadap Pancasila belum sepenuhnya dikembangkan secara ilmiah baik melalui pendekatan intradisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin.

Berdasarkan urgensi atas tugas yang diemban oleh Deputy Bidang Pengkajian dan Materi, maka sasaran program Deputy Bidang Pengkajian dan Materi yang ditetapkan dalam Rencana Strategis BPIP Tahun 2020-2024 adalah berupa terwujudnya perumusan arah kebijakan, pengkajian, dan standardisasi materi PIP yang kemudian dapat diukur capaian kinerjanya melalui indikator kinerja utama berupa “persentase kajian PIP yang dapat dimanfaatkan”.

Ukuran keberhasilan Sasaran Program Terwujudnya Perumusan Arah Kebijakan, Pengkajian, dan Standardisasi Materi PIP adalah:

Tabel 2. 24. Indikator Keluaran Program Terwujudnya Perumusan Arah Kebijakan, Pengkajian, dan Standardisasi Materi PIP

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2024	REALISASI 2024	Ket
Persentase hasil kajian PIP yang dimanfaatkan	100%	22,3%	 22,3%

Realisasi capaian kinerja program tersebut diperoleh dan dicapai sebagai berikut :

C.1. Persentase hasil kajian PIP yang dimanfaatkan

Indikator Keberhasilan:

Persentase hasil kajian PIP yang dimanfaatkan. Target Tahun 2024 adalah 100%.

Pada Triwulan I Tahun 2024 capaian target tersebut adalah sebesar 19,4% $(16,6\% + 25\% + 16,7\%) / 3$ (rata-rata capaian hasil Kajian Kebijakan PIP, Kajian Materi PIP, dan Kajian Implementasi PIP).

Capaian IKU sasaran program tersebut didukung oleh kegiatan:

- Pelaksanaan Pengkajian Kebijakan PIP;
- Pelaksanaan Pengkajian Materi PIP;
- Pelaksanaan Pengkajian Implementasi PIP.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pada Tahun Triwulan I 2024 adalah:

Tabel 2. 25. Indikator Keluaran Persentase Hasil Kajian PIP yang dimanfaatkan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase rekomendasi kajian kebijakan PIP yang ditindaklanjuti	Rekomendasi Kajian Kebijakan Strategis PIP	2	16,6%	16,6% (Rekomendasi)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase NSPK tentang standarisasi materi, bahan ajar dan metode PIP yang ditindaklanjuti	NSPK Materi, Bahan Ajar dan Metode PIP	1	25%	25% (NSPK)
Persentase rekomendasi kajian implementasi PIP yang ditindaklanjuti	Rekomendasi Hasil Kajian Implementasi PIP	1	16,7%	25% (Rekomendasi)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Triwulan I tahun 2024 yaitu:

1. Persentase rekomendasi kajian kebijakan PIP yang ditindaklanjuti

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diukur dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) persentase rekomendasi kebijakan PIP yang ditindaklanjuti sebesar 100%, dengan rincian *output* yaitu dua (2) rekomendasi kebijakan strategis Pembinaan Ideologi Pancasila. Capaian kinerja sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 16,6%, dengan rincian perhitungan:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{capaian tahapan rekomendasi}}{2 \text{ rekomendasi kebijakan}} \\
 &= \frac{(33\%+0\%)}{2 \text{ rekomendasi kebijakan}} \\
 &= \frac{33\%}{2 \text{ rekomendasi kebijakan}} \\
 &= 16,6\%
 \end{aligned}$$

Sebagai catatan, rekomendasi yang telah ditetapkan sebagai output Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP adalah dokumen rekomendasi Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila tahun 2024-2029. Sementara itu, untuk satu rekomendasi lainnya adalah berupa rekomendasi kebijakan pembinaan ideologi Pancasila yang

berdasarkan pembagian timeline kegiatan akan dilaksanakan pada periode semester dua tahun 2024.

Berikut merupakan detail capaian kinerja Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP pada Triwulan I Tahun 2024, dengan mempertimbangkan kalender rencana kerja Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP yang telah disusun.

1) Kajian Kebijakan Strategis Pembinaan Ideologi Pancasila

Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan kajian kebijakan strategis Pembinaan Ideologi Pancasila berupa dokumen Arah Kebijakan PIP, Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila (GBHIP), dan Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pada tahun 2024, kajian kebijakan strategis pembinaan ideologi Pancasila akan berfokus pada penyusunan dokumen rekomendasi Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2025-2029.

Terkait dengan penyusunan dokumen rekomendasi Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2025-2029, Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila telah melakukan penyusunan sejak tahun 2023 dengan menysasar lingkup keterlibatan Kementerian/Lembaga dalam penyusunan matriks usulan peta jalan tersebut. Pada tahun 2023, sebanyak 26 Kementerian/Lembaga telah menyampaikan usulan matriks program atau kegiatan yang mendukung Peta Jalan PIP. Sementara target keseluruhan sebanyak 50 Kementerian/Lembaga dan Lembaga Tinggi Negara.

Untuk memenuhi aspek keterlibatan para pemangku kepentingan (50 Kementerian/Lembaga dan Lembaga Tinggi Negara), pada tahun 2024, tindak lanjut penyusunan dokumen rekomendasi Peta Jalan PIP tahun 2025-2029 akan menysasar lingkup keterlibatan berbagai Lembaga Tinggi Negara dan Kementerian/Lembaga dengan target minimal 24 Lembaga Tinggi Negara. Selain itu, penyusunan dokumen rekomendasi

Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2025-2029” pada tahun 2024 juga akan menyasar Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi).

Dalam proses penyusunan rekomendasi Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila, maka dilakukan tiga tahap yaitu:

1. Identifikasi program terkait PIP dari setiap lembaga tinggi negara, K/L dan Pemerintah Provinsi melalui penyusunan matriks usulan program PIP;
2. Penyusunan Dokumen Rancangan Peta Jalan PIP: Milestones, kerangka regulasi, pengorganisasian, dan anggaran;
3. Akseptasi seluruh lembaga tinggi negara, K/L, dan Pemprov dan penyusunan peraturan perundang-undangan AK PIP dan Peta Jalan PIP.

Sebagai bentuk tindak lanjut dari penyusunan Peta Jalan PIP yang telah dilakukan, Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP telah melaksanakan tahapan berupa identifikasi program terkait PIP dari lembaga tinggi negara dan Kementerian/lembaga. Hingga Triwulan I Tahun 2024, sebanyak 11 dari target 24 Lembaga Tinggi Negara dan Kementerian/Lembaga yang telah memberikan usulan matriks Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2025-2029. Selanjutnya, Direktorat Pengkajian Kebijakan berencana melaksanakan kunjungan kepada lembaga tinggi negara dan Kementerian/lembaga yang belum memberikan usulan matriks Peta Jalan PIP untuk memenuhi target keterlibatan 50 Kementerian/Lembaga dan Lembaga Tinggi Negara. Setelah target keterlibatan 50 Kementerian/Lembaga dan Lembaga Tinggi Negara, Direktorat Pengkajian Kebijakan akan melanjutkan penyusunan matriks usulan Peta Jalan PIP dengan melibatkan seluruh pemerintahan daerah (provinsi).

Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan, maka perhitungan capaian kinerja penyusunan dokumen rekomendasi Peta Jalan

Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2025-2029 pada Triwulan I 2024 adalah sebesar:

$$\frac{\text{tahapan hingga TW I}}{(1 \text{ dokumen} \times 3 \text{ tahapan penyusunan})} \times 100\%$$
$$= \frac{1}{3 \text{ tahapan penyusunan}} \times 100\%$$
$$= 33,3\%$$

Pada triwulan I, penyusunan dokumen rekomendasi Peta Jalan PIP tahun 2025-2029 masih dalam tahap 1, yaitu berupa Identifikasi program terkait PIP dari setiap lembaga tinggi negara, K/L dan Pemerintah Provinsi melalui penyusunan matriks usulan program PIP. Dalam hal ini maka berarti, telah dilaksanakan 1 tahapan dari total 3 tahapan keseluruhan, sehingga dapat dihitung capaian kinerja yang dicapai terkait penyusunan dokumen rekomendasi Peta Jalan PIP tahun 2025-2029 adalah sebesar 33,3%.

2) Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP dalam hal perencanaan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis pengkajian kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, pada tahun 2024 Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP melakukan beberapa kajian dan perumusan kebijakan PIP yaitu:

a) Kajian Naskah Autentik Risalah Sidang BPUPK dan PPKI

Dalam rangka penyusunan kajian Naskah Autentik Risalah Sidang BPUPK dan PPKI diperlukan tahapan: 1) Pengumpulan dan proses kurasi Naskah Autentik Risalah Sidang BPUPK dan PPKI; 2) Pencermatan lintas (cross check); 3) Gelar Naskah dengan lintas entitas; 4) Penyerahan dan Penetapan hasil kajian.

Penyusunan kajian naskah autentik risalah sidang BPUPK dan PPKI pada dasarnya telah dimulai pada tahun 2023 melalui proses kurasi (pengumpulan dan identifikasi) naskah-naskah otentik yang didapatkan dari National Archives of the Netherlands dan Arsip Nasional Republik Indonesia. Menindaklanjuti hasil kerja tahun 2023, maka pada tahun 2024 akan dilaksanakan tahap selanjutnya berupa pencermatan lintas dan uji kelayakan naskah dengan melibatkan ANRI dan pakar-pakar sejarah.

Hingga Triwulan I 2024, dalam rangka memperlancar proses pengumpulan/pencarian arsip autentik, telah dilakukan koordinasi dengan Deputi Konservasi ANRI dan mencapai kesamaan persepsi bahwa perlu adanya rencana kolaborasi dan gotong royong antara BPIP dan ANRI dalam proses penyusunan naskah autentik risalah sidang BPUPK dan PPKI melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip. Menindaklanjuti hal tersebut, pada triwulan I tahun 2024 telah disusun rencana kerjasama melalui Perjanjian Kerjasama antara BPIP dan ANRI tentang Pengelolaan dan Pendayagunaan Arsip dalam Rangka Penyusunan Naskah Autentik BPUPK dan PPKI.

b) Kajian Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Energi berdasarkan Pancasila.

Penyusunan dokumen Kajian Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Energi Berdasarkan Pancasila, akan dilaksanakan dalam lima tahap yaitu 1) penyusunan sistematika; 2) pelaksanaan kajian, 3) validasi dan akseptasi data; 4) finalisasi kajian, dan 5) akseptasi pimpinan.

Penyusunan dokumen Kajian Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Energi berdasarkan Pancasila, berdasarkan kalender kerja yang telah disusun oleh Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP, akan dilaksanakan pada periode semester kedua tahun 2024, menyusul dengan target

penyelesaian kajian naskah autentik risalah sidang BPUPK dan PPKI.

c) Kajian Nilai-Nilai Pancasila dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kajian ini bertujuan untuk menguraikan pasal-pasal yang ada dalam Batang Tubuh UUD NRI 1945 berdasarkan sila-sila Pancasila. Kegiatan ini akan melibatkan berbagai pakar/akademisi. Berdasarkan kalender kerja Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP, kegiatan Kajian Nilai-Nilai Pancasila dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga akan dilaksanakan pada periode semester II tahun 2024, menyusul dengan target proses finalisasi dan akseptasi dokumen rekomendasi Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila tahun 2025-2029.

d) Kajian Demokrasi Pancasila

Berdasarkan kalender kerja Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP, kegiatan kajian demokrasi Pancasila juga akan dilaksanakan pada periode semester II, menyusul dengan diselesaikannya rekomendasi peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila tahun 2025-2029.

3) Penyerapan Pandangan dan Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP dalam hal penyerapan pandangan dan pengelolaan aspirasi masyarakat, pada tahun 2024 Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP melakukan beberapa kegiatan yaitu:

a) Pengelolaan Jurnal Pancasila: Jurnal Keindonesiaan; Edisi khusus Pancasila: Jurnal Keindonesiaan dengan tema “Ekonomi Pancasila”; dan Jurnal Ilmiah Bhinneka Tunggal Ika: Pancasila Jurnal Internasional Berbahasa Indonesia;

- Pengelolaan jurnal ilmiah “Pancasila: Jurnal Keindonesiaan (PJK)” pada tahun 2024, sebagaimana



tahun-tahun sebelumnya akan melaksanakan dua kali penerbitan, yaitu pada periode April (Volumen 4 Nomor 1) dan Oktober (Volumen 4 Nomor 2). Hingga triwulan I tahun 2024, dalam rangka penerbitan jurnal Volume 4 Nomor 1 Edisi April 2024, telah dilakukan proses proofreading terhadap calon artikel yang telah setuju oleh mitra bestari. Selanjutnya pada tahapan akhir yaitu pelaksanaan publikasi Pancasila: Jurnal Keindonesiaan (PJK) dimaksud direncanakan dilaksanakan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 23 s.d. 26 April 2024;

- Edisi khusus Pancasila: Jurnal Keindonesiaan dengan tema “Ekonomi Pancasila”, direncanakan akan di publish di Hari Lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni 2024 dengan metode mengundang calon penulis yang merupakan pakar Ekonomi untuk menulis pada edisi khusus ini. Dalam periode triwulan I, telah dilakukan konfirmasi terhadap 9 dari 11 orang calon penulis jurnal edisi khusus yang merupakan para pakar dalam bidang ekonomi Pancasila. Calon artikel “Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Edisi Khusus” ditargetkan akan diterima pada tanggal 20 April 2024. Kegiatan pemaparan direncanakan dilaksanakan di Kota Yogyakarta pada tanggal 28 s.d. 1 Mei 2024.
- Penyusunan Jurnal Ilmiah Bhinneka Tunggal Ika: Pancasila Jurnal Internasional Berbahasa Indonesia bertujuan untuk mendukung tugas dan fungsi BPIP melaksanakan pengkajian pembinaan ideologi Pancasila dimana hasil kajian disusun dan diterbitkan dalam jurnal ilmiah dalam lingkup internasional.
- Hingga triwulan I tahun 2024, capaian kemajuan penyusunan Jurnal Ilmiah Bhinneka Tunggal Ika:

Pancasila Jurnal Internasional Berbahasa Indoensia telah sampai pada tahap perencanaan dan analisis sumber daya. Bhinneka Tunggal Ika: Pancasila Jurnal Internasional Berbahasa Indonesia direncanakan memiliki frekuensi terbit sebanyak 2 (dua) kali dalam satu tahun yaitu bulan Februari dan Agustus, untuk terbitan pertama akan dipublikasikan pada bulan Agustus tahun 2024.

b) Kajian Penyerapan Pandangan dan Pengelolaan Aspirasi Masyarakat terkait Pembinaan Ideologi Pancasila.

Kajian penyerapan pandangan dan pengelolaan aspirasi masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk menyusun model yang tepat dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyerapan pandangan dan penanganan aspirasi Masyarakat terkait pembinaan ideologi Pancasila. Hingga Triwulan I 2024, Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP telah melaksanakan brainstorming terkait model penyerapan pandangan dan penanganan aspirasi masyarakat dengan melibatkan beberapa kementerian/lembaga yang memiliki tugas dan fungsi tersebut. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaring masukan dan menajamkan konsep penyerapan pandangan dan pengelolaan aspirasi masyarakat terkait PIP.

2. Persentase NSPK tentang standardisasi materi, bahan ajar dan metode PIP yang ditindaklanjuti

Pada Triwulan I tahun 2024, Direktorat Pengkajian Materi PIP dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya pada Triwulan I ini masih dalam tahapan penelaahan materi terhadap draf-draf yang sedang disusun.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diukur dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) Persentase NSPK tentang standardisasi materi, bahan ajar, dan metode pembinaan ideologi Pancasila yang

ditindaklanjuti sebesar 100%, dengan rincian *output* yaitu satu (1) NSPK.

Secara umum strategi pencapaian luaran seluruh rangkaian kegiatan akan meliputi delapan (8) tahapan: 1) Identifikasi permasalahan/isu publik dan pengumpulan data primer/sekunder dalam penyusunan standar materi, bahan ajar dan metode pembinaan ideologi Pancasila sesuai dengan kelompok komponen masyarakat; 2) Perumusan sistematika standar materi, bahan ajar dan metode Pembinaan Ideologi Pancasila; 3) Perumusan (NSPK) kebijakan strategis dan program teknis dalam penyusunan standar materi, bahan ajar dan metode pembinaan ideologi Pancasila; 4) Koordinasi dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan terkait standar materi, bahan ajar dan metode Pembinaan Ideologi Pancasila; 5) Melakukan uji petik implementasi atas hasil perumusan standar materi, bahan ajar dan metode Pembinaan Ideologi Pancasila; 6) Perancangan naskah NSPK (Legalisasi) sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 7) Pemantauan dan evaluasi penyusunan/ perumusan standar materi, bahan ajar dan metode pembinaan ideologi Pancasila; dan 8) Penyusunan pelaporan / rekomendasi untuk mendukung keberlanjutan implementasi standar materi, bahan ajar dan metode pembinaan ideologi Pancasila.

Capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 25%, dengan rincian perhitungan:

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja} &= \frac{25\% + 25\% + 25\% + 25\%}{4 (\text{komponen kegiatan})} \times 100\% \\ &= 25\% \end{aligned}$$

3. Persentase rekomendasi kajian implementasi PIP yang ditindaklanjuti

Kegiatan Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila diukur dengan indikator kinerja kegiatan (IKK): “persentase rekomendasi kajian implementasi PIP yang ditindaklanjuti” sebesar 16,7%. *Output* atas kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila
2. Strategi Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila
3. Koordinasi Implementasi dan Pengkajian Pembinaan Ideologi Pancasila
4. Identifikasi Nilai Ideologi Pancasila dan Value Assessment
5. Diseminasi Hasil Pengkajian
6. Pengkajian Implementasi Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila

Hingga triwulan I, penyusunan rekomendasi kajian implementasi telah sampai pada aktivitas ke2 dengan rincian

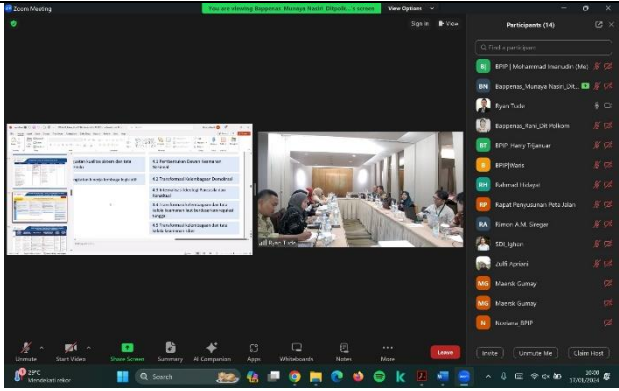
Kegiatan	Persentase Realisasi Kegiatan
Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila	75%
Strategi Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila	0%
Koordinasi Implementasi dan Pengkajian Pembinaan Ideologi Pancasila	0%
Identifikasi Nilai Ideologi Pancasila dan Value Assessment	25%
Diseminasi Hasil Pengkajian	0%
Pengkajian Implementasi Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	0%

$$\frac{\text{aktivitas hingga TW 1}}{6 \text{ aktivitas}} \times 100\% = 16,7\%$$

Aktivitas dan kilas peristiwa dalam rangka capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2024 adalah:

- a. Pelaksanaan Pengkajian Kebijakan PIP:

Tabel 2. 27. Aktivitas Pelaksanaan Pengkajian Kebijakan PIP

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Belanja Bahan Konsumsi dan Kudapan dalam rangka Rapat Penyusunan Program dan Kegiatan Kedeputan Bidang Pengkajian dan Materi Tahun 2024 (Jakarta, tanggal 9 Januari 2024)	
2.	Tindak Lanjut Dan Perencanaan Penyusunan Pelaksanaan Peta Jalan PIP 2024 (Jakarta, tanggal 16 s.d. 18 Januari 2024)	
3.	Rapat Diseminasi Dokumen Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 22 Januari 2024)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
4.	Brainstorming Penyusunan Naskah Otentik Sejarah Kelahiran Pancasila (Jakarta, tanggal 6 Februari 2024)	
5.	Optimalisasi Pengelolaan Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Volume 4 Nomor 1 April 2024 dan Perencanaan Penyusunan Jurnal Ilmiah Pancasila: Jurnal Internasional (Jakarta, tanggal 18 s.d. 21 Februari 2024)	
6.	Kick Off Meeting Penyusunan Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Lembaga Negara dan Kementerian/Lembaga (Jakarta, tanggal 21 s.d. 23 Februari 2024)	
7.	Belanja Barang Konsumsi Rapat Penetapan Kalender Kerja Deputy Bidang Pengkajian dan Materi Tahun 2024 (Jakarta, tanggal 28 Februari 2024).	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
8.	Menghadiri kegiatan Pengharmonisasian, Pembedaan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila (Bandung, tanggal 29 Februari s.d. 3 Maret 2024)	
9.	Rapat Usulan Tindak Lanjut MoU antara BPIP dan ANRI dalam Rangka Penyusunan Naskah Otentik Sidang BPUPK dan PPKI (Jakarta, tanggal 5 Maret 2024)	
10.	Rapat Pembuatan Domain/Website Pancasila: Jurnal Internasional (Jakarta, tanggal 7 Maret 2024)	
11.	Koordinasi Penelusuran Data Naskah Otentik Sejarah Pancasila Kepada Direktorat Preservasi ANRI (Jakarta, tanggal 13 Maret 2024)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
12.	Diskusi Awal Rencana Penyusunan Instrumen Penyerapan Pandangan dan Penanganan Aspirasi Masyarakat Terkait Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 14 s.d. 16 Maret 2024)	
13.	Melaksanakan Kajian Naskah Otentik Sejarah Persiapan Kemerdekaan Melalui Preservasi, Layanan Dan Pemanfaatan Arsip Nasional Dan Penyusunan Matriks Usulan Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila 2025-2029 Pada Lembaga Tinggi Negara Dan Kementerian/Lembaga (Jakarta, tanggal 25 s.d. 28 Maret 2024)	

b. Pelaksanaan Pengkajian Materi PIP;

Tabel 2. 28. Pelaksanaan Pengkajian Materi PIP

No	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Kegiatan Diskusi Buku-Buku Pancasila Produk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Penyerahan Buku-Buku Pancasila Perpustakaan Nasional (Jakarta, tanggal 23 Januari 2024)	

No	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
2.	Diskusi Kelompok Terpumpun Pembahasan Lanjutan Draf Materi Pancasila Bagi Calon Paskibraka Kajian Materi PIP (Kuningan, tanggal 22 s.d. 24 Februari 2024)	
3.	Diskusi Kelompok Terpumpun Telaah Materi Dan Finalisasi Hermeneutika Karya Sukarno Selama Masa Pengasingan Di Ende. (Jakarta, tanggal 28 s.d. 29 Februari 2024)	
4.	Finalisasi Draf Buku Hermeneutika Karya- Karya Sukarno Di Ende- Menggali Falsafah Pancasila Melalui Surat- Surat dan Tonil Dan Monitoring Materi Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila Di Wilayah Manggarai NTT (Manggarai, tanggal 6 s.d. Maret 2024)	

c. Pelaksanaan Pelaksanaan Pengkajian Implementasi PIP.

Tabel 2. 29. Aktivitas Pelaksanaan Pengkajian Implementasi PIP

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Kegiatan Forum Curah Pikir Hasil Kajian Implementasi Nilai Pancasila Pasca Reformasi Bersama Pusat Studi Pancasila (Yogyakarta, tanggal 18 s.d. 21 Januari 2024)	
2.	Kegiatan Forum Curah Pikir Hasil Kajian Implementasi Nilai Pancasila Pasca Reformasi Bersama Pusat Studi Pancasila di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Jakarta, tanggal 29 s.d. 30 Januari 2024)	
3.	Pendidikan Karakter Pancasila dan Rencana Pelaksanaan Untuk Evaluasi Kematangan Jiwa Pancasila Sebagai Jiwa Utama dan Kematangan Pancasila melalui Laboratorium Karakter (Yogyakarta, tanggal 6 s.d. 8 Februari 2024)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
4.	Kegiatan Kunjungan Lapangan Pengkajian Strategi Implementasi Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila pada satuan pendidikan Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) (Jawa Timur, tanggal 15 s.d. 18 Februari 2024)	
5.	Kegiatan Pengkajian Strategi Implementasi Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila pada satuan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) (Nusa Tenggara Barat, tanggal 20 s.d. 23 Februari 2024)	
6.	Kegiatan Forum Curah Pikir – Pusat Kajian Pancasila “Identifikasi Nilai Ideologi Pancasila Pada Kebijakan, Program Dan Kegiatan Lembaga Tinggi Negara, Kementerian / Lembaga, Pemerintah Daerah, Orsospol Dan Komponen Masyarakat Lainnya” (Jakarta, tanggal 19 s.d. 21 Maret 2024)	

D. Diklat PIP Bagi Aparatur Negara, Lembaga Pendidikan/Keagamaan Formal, dan Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal

Pengembangan kebijakan/regulasi merupakan salah satu prasyarat terwujudnya Sistem Nasional Pendidikan dan PIP yang terstruktur, sistemik, dan masif sehingga perlu dirumuskan pengaturan yang komprehensif. Program Teknis Perencanaan dan Kerja sama Pendidikan dan Pelatihan PIP merupakan implementasi dari Kebijakan Strategis yang telah ditetapkan. Perumusan program teknis dilakukan untuk memastikan advokasi kebijakan strategis yang dilakukan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan yakni terwujudnya pembumih Pancasila sebagai dasar negara sehingga nilai-nilai Pancasila teraktualisasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan nasional, serta kehidupan bermasyarakat. Program teknis tersebut perlu dielaborasi dalam program jangka panjang Sistem Nasional Diklat PIP dalam rangka mendukung terwujudnya pembumih Pancasila bagi aparatur negara dan seluruh komponen bangsa menuju sumber daya manusia unggul pada saat Indonesia Emas Tahun 2045. Sedangkan program teknis jangka menengah, jangka pendek, serta tahunan dielaborasi secara komprehensif dan cascading dimana secara agregat mendukung pencapaian tujuan jangka panjang tersebut.

Sumber daya manusia Indonesia Emas tahun 2045 diharapkan mempunyai kecerdasan yang lebih unggul dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain untuk mendukung Indonesia sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peradaban dunia. Pembangunan SDM unggul tersebut perlu dilakukan secara paripurna, tidak hanya membangun kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi juga membangun iman dan taqwa serta budaya sehingga menjadi insan-insan pembangunan yang religius, menguasai iptek, serta berbudaya luhur.

PIP bertujuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila kedalam seluruh sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, agar pelaksanaan PIP sesuai dengan standar kebijakan dan nilai-nilai Pancasila maka diperlukan pengendalian dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan PIP, implementasi kebijakan PIP, aktualisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat. dan pencegahan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Ukuran keberhasilan Sasaran Program Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan PIP Bagi Aparatur Negara, Lembaga Pendidikan/Keagamaan Formal, dan Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal adalah:

Tabel 2. 30. Indikator Keluaran Program Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan PIP Bagi Aparatur Negara, Lembaga Pendidikan/Keagamaan Formal, dan Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2024	REALISASI 2024	KET
Persentase hasil perencanaan pendidikan dan pelatihan PIP yang dimanfaatkan	100%	58.6%	 58,6%
Persentase pemanfaatan standardisasi dan kurikulum Diklat PIP	100%	28,5%	 28,5%
Persentase tenaga pengajar Diklat PIP yang tersertifikasi	100%	25%	 25%
Persentase peserta Diklat PIP yang melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di komunitasnya	60%	25%	 25%

Realisasi capaian kinerja program tersebut diperoleh dan dicapai sebagai berikut :

D.1. Persentase hasil perencanaan, standardisasi kurikulum pendidikan dan pelatihan PIP yang dimanfaatkan.

Indikator Keberhasilan:

Persentase hasil perencanaan pendidikan dan pelatihan PIP yang dimanfaatkan. Target Tahun 2024 adalah 100%.

Pada Triwulan I Tahun 2024 capaian target tersebut adalah sebesar 58.6% (rata2 capaian hasil indikator kinerja kegiatan perencanaan dan pelatihan PIP) dengan capaian berupa penyusunan kesepakatan perencanaan Diklat PIP.

Capaian IKU sasaran program tersebut didukung oleh kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan, Standardisasi Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan PIP.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pada Triwulan I Tahun 2024 adalah:

Tabel 2. 31. Indikator Keluaran Persentase hasil perencanaan pendidikan dan pelatihan PIP yang dimanfaatkan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET CAPAIAN		KET
Persentase rekomendasi perencanaan dan pengembangan Diklat PIP yang ditindaklanjuti	Rekomendasi Kebijakan Strategis Diklat PIP (PN)	3	2	66% (Rekomendasi)
Persentase Tenaga Pendidik dan Pelatih Diklat PIP yang Bersertifikat	Sertikasi Pendidik dan Pelatih Diklat PIP (PN)	200	60%	60% (Orang)
Persentase NSPK Akreditasi Penyelenggara Diklat PIP yang ditindaklanjuti	Akreditasi Lembaga Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila (PN))	10	50%	50% (Lembaga)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh yaitu:

a. Persentase rekomendasi kajian kebijakan PIP yang ditindaklanjuti

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diukur dengan jumlah rekomendasi yang dihasilkan. Sampai dengan Triwulan I tahun 2024 rekomendasi Kebijakan Strategis dan Program Teknis Diklat PIP yang telah ditindaklanjuti telah rampung 2 rekomendasi atau sebesar 66% dari target indikator kinerja kegiatan dengan rincian:

1. Revisi Peraturan BPIP Nomor 2 tahun 2020 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila telah disetujui oleh Kepala BPIP melalui Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;
2. Revisi Keputusan Kepala BPIP Nomor 67 tahun 2023 tentang Pedoman Sertifikasi Penceramah/ Fasilitator dan Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila menjadi Keputusan Kepala BPIP Nomor 17 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila berisikan prosedur pelaksanaan sertifikasi Pengajar Diklat PIP telah sampai tahap pembahasan dengan Biro Hukum dan Organisasi (BHO) BPIP yang selanjutnya menunggu persetujuan dari Kepala BPIP. Pada Triwulan II tahun 2024 kami akan berkoordinasi lebih intens dengan BHO BPIP agar Keputusan Kepala BPIP Nomor 17 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila dapat segera disetujui oleh Kepala BPIP;
3. Rancangan Juknis Desiminasi Pengelolaan Diklat PIP berisikan mekanisme bagi lembaga penyelenggara Diklat PIP dalam melakukan Pengelolaan Diklat PIP. Dokumen Rancangan Juknis Desiminasi Pengelolaan Diklat PIP masih dalam tahap penyusunan dengan melibatkan akademisi, kementerian/lembaga/pemerintahan daerah, dan pemangku

kepentingan lainnya. Pada Triwulan II Tahun 2024 kami sudah menjadwalkan agenda untuk melaksanakan DKT Bersama melibatkan akademisi, kementerian/lembaga/pemerintahan daerah, dan pakar untuk menuntaskan penyusunan Rancangan Juknis Desiminasi Pengelolaan Diklat PIP.

b. Persentase Tenaga Pendidik dan Pelatih Diklat PIP yang Bersertifikat

Persentase Tenaga Diklat PIP yang bersertifikat dengan rincian output sertifikasi pendidik dan pelatih Diklat PIP dari target 200 orang, terdapat 677 orang peserta telah dilakukan asesmen dan saat ini dalam proses penelusuran rekam jejak oleh Badan Intelejen Negara (BIN) atau sebesar kurang lebih 60% dari proses sertifikasi pengajar Diklat PIP. Jumlah peserta Sertifikasi Tenaga Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila tahun 2024 yang telah mengikuti asesmen Tim Asesor yaitu 752 orang dengan rincian peserta sertifikasi maheswara Diklat PIP sebanyak 492 orang dan sertifikasi penceramah Diklat PIP sebanyak 260 orang dari berbagai Kementerian, Lembaga, Instansi, Perguruan Tinggi, dan Organisasi Sosial dan Organisasi Politik se-Indonesia. Berdasarkan hasil asesmen Tim Asesor, sebanyak 677 orang saat ini sedang dalam tahap rekam jejak oleh BIN. Tujuan dari penyelenggaraan sertifikasi Pengajar Diklat PIP adalah tersedianya Pengajar Diklat PIP sebagai upaya mewujudkan penjaminan mutu terhadap kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia pada penyelenggaraan Diklat PIP. Pada Triwulan II tahun 2024 kami akan berkoordinasi dengan BIN untuk mempercepat proses penelusuran rekam jejak kepada 677 orang peserta sertifikasi pengajar Diklat PIP.

c. Persentase NSPK Akreditasi Penyelenggara Diklat PIP yang ditindaklanjuti

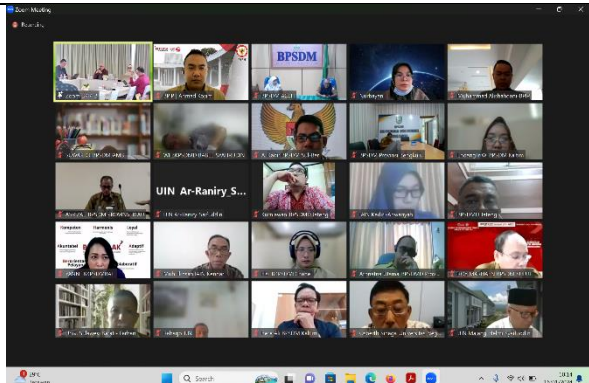
Akreditasi Lembaga Diklat PIP dari target 10 lembaga terdapat 12 lembaga calon peserta akreditasi penyelenggara Diklat PIP mengikuti bimbingan teknis dan penilaian mandiri proses akreditasi penyelenggara Diklat PIP dan sudah diserahkan data calon lembaga akreditasi

penyelenggara Diklat PIP kepada Tim Asesor atau sebesar kurang lebih 50% dari target proses akreditasi penyelenggara Diklat PIP. Akreditasi Lembaga Penyelenggara Diklat PIP yang ditindaklanjuti dengan target 10 lembaga pada tahun 2024 telah sampai tahap penyampaian data Calon Lembaga Penyelenggara Diklat PIP kepada Tim Asesor. Dari target 10 lembaga akreditasi penyelenggara Diklat PIP tahun 2024 terdapat 12 lembaga diklat akan mengikuti proses Akreditasi penyelenggara Diklat PIP. Proses selanjutnya yaitu visitasi Calon Lembaga Penyelenggara Diklat PIP (pemeriksaan data dukung) dan melakukan penilaian oleh Tim Asesor Akreditasi Penyelenggara Diklat PIP kepada Calon Penyelenggara Diklat PIP terjadwal akan dilakukan pada triwulan II tahun 2024. Tujuan Akreditasi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila adalah tersedianya lembaga penyelenggara Diklat PIP pada lembaga negara, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah dan diharapkan memiliki kesamaan pandangan tentang ideologi Pancasila serta pembangunan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila guna menciptakan generasi emas Indonesia tahun 2045.

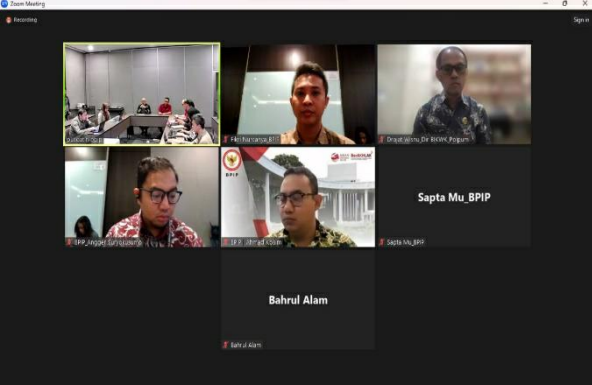
Aktivitas dan kilas peristiwa dalam rangka capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2024 adalah:

Tabel 2. 32. Aktivitas Penyelenggaraan Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan PIP

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Rapat Perencanaan Sertifikasi Penceramah/Fasilitator Dan Pengajar Pendidikan Dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2024 (Jakarta, tanggal 10 Januari 2024)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
2.	Rapat Rapat Koordinasi Pembahasan Draft Pengumuman Hasil Verifikasi dan Asesmen Calon Peserta Sertifikasi Pengajar Pendidikan Dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 11 Januari 2024)	
3.	Rapat Koordinasi dengan Tim Asesor Sertifikasi dan Sosialisasi Pedoman Sertifikasi Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan Pemerintah Daerah Provinsi Seluruh Indonesia (Jakarta, tanggal 15 s.d. 17 Januari 2024)	
4.	Penyelenggaraan Diklat Pengajar Diklat PIP Tingkat Dasar dan Menengah bagi 95 Orang Calon Maheswara Pratama dan Madya- Jakarta, (Jakarta, tanggal 30 Januari s.d. 2 Februari 2024)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
5.	Kegiatan Verifikasi Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP Tahap Pertama (Bogor, tanggal 15 s.d. 17 Februari 2024)	
6.	Kegiatan Verifikasi dan validasi dokumen pengajuan sertifikasi penceramah/fasilitator dan pengajar Diklat PIP oleh tim sekretariat (Jakarta, tanggal 19 s.d. 24 Februari 2024)	
7.	Kegiatan Rapat Kerja Tim Akreditasi Penyelenggara Diklat PIP (Jakarta, tanggal 26 s.d. 28 Februari 2024)	
8.	Kegiatan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Akreditasi Penyelenggara Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila Periode Pertama Tahun 2024 (Nusa Tenggara Barat, tanggal 6 s.d. 9 Maret 2024)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
9.	Kegiatan rancangan pengintegrasian sistem sertifikasi pengajar dan akreditasi penyelenggara diklat PIP (Jakarta, tanggal 13 s.d. 15 Maret 2024)	
10.	Kegiatan Asesmen Peserta Sertifikasi Penceramah/ Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP Tahun 2024 (Jakarta, tanggal 19 s.d. 22 Maret 2024)	
11.	Kegiatan Rapat Verifikasi dan Penilaian Data Akreditasi Penyelenggara Diklat PIP Periode I Tahun 2024 (Jakarta, tanggal 25 s.d. 28 Maret 2024)	

D.2. Persentase pemanfaatan standardisasi dan kurikulum Diklat PIP.

Indikator Keberhasilan:

Persentase pemanfaatan standardisasi dan kurikulum Diklat PIP.
Target Tahun 2024 adalah 100%.

Pada Triwulan I Tahun 2024 capaian target tersebut adalah sebesar 28,5%.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pada Tahun Triwulan I 2024 adalah:

Tabel 2. 33. Indikator Keluaran Persentase pemanfaatan standardisasi dan kurikulum Diklat PIP

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase Pendidikan dan Pelatihan PIP yang memanfaatkan standardisasi dan kurikulum Diklat PIP	NSPK Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (PN))	7	2	28,5% (NSPK)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Triwulan I tahun 2024 yaitu:

Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan tersebut yaitu Persentase Pendidikan dan Pelatihan PIP yang memanfaatkan standardisasi dan kurikulum Diklat PIP dengan rincian output NSPK standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila sebanyak 7 NSPK. Berdasarkan Peraturan BPPI Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila serta Penyelenggaraan Diklat yang membutuhkan petunjuk teknis sesuai dengan sasaran Diklat agar bisa lebih spesifik sesuai dengan karakteristik kelompok sasaran, sehingga output NSPK yang disusun yaitu melakukan perbaikan regulasi terkait Keputusan Kepala BPPI Nomor 34 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan, Pembelajaran, Penilaian, dan Evaluasi dan Pemantauan PIP dan Keputusan Kepala Nomor 35 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Diklat bagi Pengajar Diklat PIP Diklat serta Penyusunan Petunjuk Teknis Diklat PIP sesuai kelompok sasarannya.

Capaian Output Kegiatan tersebut dengan target output adalah 7 NSPK, sampai dengan TW I tahun 2024 dengan mempertimbangkan kebutuhan standar dan kurikulum diklat, maka disusun:

Terselesaikannya dokumen NSPK Petunjuk Teknis (Juknis) yang akan digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila berupa:

1. Revisi Keputusan Kepala Nomor 34 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan, Pembelajaran, Penilaian, dan Evaluasi dan Pemantauan PIP; dan
2. Revisi Keputusan Kepala Nomor 35 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Diklat bagi Pengajar Diklat PIP;

Tersusunnya dokumen NSPK Petunjuk Teknis (Juknis) yang masih dalam tahapan penyusunan berupa:

1. NSPK Diklat PIP bagi Aparatur Sipil Negara;
2. NSPK Diklat PIP bagi Kepala Desa;
3. NSPK Diklat PIP bagi Organisasi Keguruan;
4. NSPK Diklat PIP bagi Komponen Masyarakat Lainnya; dan
5. Petunjuk Teknis Evaluasi Paska Diklat.

Petunjuk teknis yang telah disusun tersebut selanjutnya akan dimanfaatkan oleh Direktorat Pelaksanaan Diklat dalam pelaksanaan Diklat PIP dan Diklat bagi Pengajar Diklat PIP. Petunjuk teknis tersebut memuat cara pelaksanaan Diklat PIP sesuai sasarannya yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penilaian, serta pemantauan dan evaluasi Diklat. Untuk mengetahui bagaimana kebermanfaatan dokumen petunjuk teknis yang telah disusun, dalam beberapa kegiatan pelaksanaan Diklat, akan dimonitoring dan evaluasi menggunakan instrumen monitoring dan evaluasi yang merupakan lampiran dari Dokumen Petunjuk Teknis Diklat PIP. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut akan menjadi masukan dalam pelaksanaan Diklat PIP yang selanjutnya.

Pencapaian *output* kegiatan Direktorat Standardisasi dan Kurikulum Diklat sampai Triwulan I tahun 2024 adalah 2 NSPK terselesaikan, sehingga persentase capaiannya adalah 28,5% dari target *output* sebanyak 7 NSPK. Cara penghitungan capaian *output*

tersebut adalah dengan membandingkan antara jumlah dokumen NSPK yang telah dihasilkan dibagi dengan target *output*.

Aktivitas dan kilas peristiwa dalam rangka capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2024 adalah:

Tabel 2. 34. Aktivitas pemanfaatan standardisasi dan kurikulum Diklat PIP

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Kegiatan Koordinasi Penyusunan Standar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 16 s.d. 19 Januari 2024)	
2.	Kegiatan Koordinasi Penyusunan Standardisasi Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Yogyakarta, tanggal 5 s.d. 8 Februari 2024)	
3.	Kegiatan Penyusunan Juknis Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Aparatur Sipil Negara (Jakarta, tanggal 29 Februari s.d. 2 Maret 2024)	

D.3. Persentase tenaga pengajar Diklat PIP yang tersertifikasi

Indikator Keberhasilan:

Persentase tenaga pengajar Diklat PIP yang tersertifikasi ToT).
Target Tahun 2024 adalah 100% .

Pada Triwulan I Tahun 2024 capaian target tersebut adalah sebesar 25% $((386:1500) \times 100\%)$. Pada Triwulan I tahun 2024 Diklat bagi Pengajar Diklat PIP dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Pedoman Sertifikasi Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dimana pada saat ini masih dalam tahap persiapan.

Capaian IKU sasaran program tersebut didukung oleh kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan PIP.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pada Triwulan I Tahun 2024 adalah:

Tabel 2.35. Indikator Keluaran Persentase tenaga pengajar Diklat PIP yang tersertifikasi (ToT)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase Peserta Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Pendidikan dan Pelatihan PIP yang kompetensinya meningkat	Peserta Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Pendidikan dan Pelatihan PIP (PN)	1500	386	25% (Orang)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh Triwulan I tahun 2024 yaitu:

Target indikator kinerja ini pada tahun 2024 adalah 100%. Hingga Triwulan I tahun 2024 capaian target tersebut adalah dari target 1.500 orang peserta luring dan daring Pendidikan dan Pelatihan Pengajar

Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila, telah tercapai sebanyak 386 orang peserta atau sebesar 25% telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila, dengan uraian capaian sebagai berikut:

1. Diklat Bagi Pengajar Diklat PIP - Pelaksanaan Diklat Pengajar dan Penceramah Diklat PIP Tingkat Menengah dan Dasar , yang dilakanakan di Jakarta pada tanggal 29 Januari s.d. 2 Pebruari 2024, dengan peserta sebanyak 94 Orang; dan
2. Pelaksanaan Diklat Pengajar PIP Berbasis BTU Pendidikan Pancasila Bagi Guru SD, SMP, dan SMA di Provinsi DKI Jakarta, yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 25 s.d. 27 Maret 2024, dengan peserta sebanyak 287 Orang

Aktivitas dan kilas peristiwa dalam rangka capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2024 adalah:

Tabel 2. 36. Aktivitas Persentase Peserta Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Pendidikan dan Pelatihan PIP yang kompetensinya meningkat

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Penyelenggaraan Diklat Pengajar Diklat PIP Tingkat Dasar dan Menengah bagi 99 Orang Calon Maheswara Pratama dan Madya (Jakarta, tanggal 30 Januari s.d. 2 Februari 2024)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
2.	Penyelenggaraan DKT Koordinasi penyusunan modul dan bahan ajar untuk Pembelajaran Aktif PIP, PIP Purnapaskibraka, Materi Umum PIP dan Materi Pengayaan PIP (Jakarta, tanggal 15 Februari 2024)	
3.	Finalisasi penyusunan modul dan bahan ajar untuk Pembelajaran Aktif PIP, PIP Purnapaskibraka (Jakarta, tanggal 27 Februari s.d. 1 Maret 2024)	
4.	Diklat bagi Pengajar PIP Berbasis BTU Pendidikan Pancasila untuk Guru jenjang Pendidikan Dasar, Menengah, Atas dan Sekolah Khusus di Provinsi DKI Jakarta (Jakarta, tanggal 25 s.d. 27 Maret 2024)	

D.4. Persentase peserta Diklat PIP yang melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di komunitasnya

Indikator Keberhasilan:

Persentase peserta Diklat PIP yang melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di komunitasnya. Target Tahun 2024 adalah 60%.

Pada Triwulan I Tahun 2024 capaian target tersebut adalah sebesar 25%, dengan uraian capaian (perhitungan) adalah bahwa penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan masih dalam persiapan.

Capaian IKU sasaran program tersebut didukung oleh kegiatan:

- Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan PIP
- Penyelenggaraan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pada Triwulan I Tahun 2024 adalah:

Tabel 2. 37. Indikator Keluaran Persentase peserta Diklat PIP yang melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di komunitasnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET CAPAIAN		KET
Persentase Peserta Diklat PIP yang kompetensinya meningkat	Peserta Pendidikan dan Pelatihan PIP	500	25%	25% (Orang)
Persentase Purna Paskibraka yang menjadi Duta Pancasila	Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan Paskibraka dan Purnapaskibraka Duta Pancasila	6600	25%	25% (Orang)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan capai yang telah diperoleh Triwulan I tahun 2024 yaitu:

- Persentase Peserta Diklat PIP yang kompetensinya meningkat

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diukur dengan jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan PIP. Sampai dengan Triwulan I tahun 2024 jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan PIP yang kompetensinya meningkat masih dalam persiapan disebabkan pada Triwulan I Tahun 2024 ini difokuskan pada penyusunan modul dan bahan ajar untuk Pembelajaran Aktif PIP, Diklat PIP Purnapaskibraka, Materi Umum Diklat PIP dan Materi Pengayaan Diklat PIP, dan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU ini akan mulai dilaksanakan pada periode Triwulan II Tahun 2024. Sehingga capaian Triwulan I Tahun 2024 adalah sebesar 25%:

b. Persentase Purna Paskibraka yang menjadi Duta Pancasila

Purnapaskibraka Tahun 2024 (Paskibraka tahun 2023) saat ini masih dalam pendataan karena masih menunggu Paskibraka tahun 2023 menyelesaikan tugas pada tanggal 1 Juni. Purnapaskibraka yang telah menyelesaikan tugas 1 Juni 2024 selanjutnya akan diberikan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Diklat PIP). Purnapaskibraka yang lulus Diklat PIP ini yang kemudian diangkat menjadi Purnapaskibraka Duta Pancasila (PDP).

Purnapaskibraka yang menjadi Duta Pancasila sampai dengan TW I Tahun 2024 masih dalam proses persiapan. Uraian capaian (perhitungan) adalah sebesar 25%.

Aktivitas dan kilas peristiwa dalam rangka capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2024 adalah:

Tabel 2. 38. Aktivitas Persentase peserta Diklat PIP yang melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di komunitasnya

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Pembekalan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2022 Provinsi Banten (Banten, tanggal 14 s.d. 16 Maret 2024)	

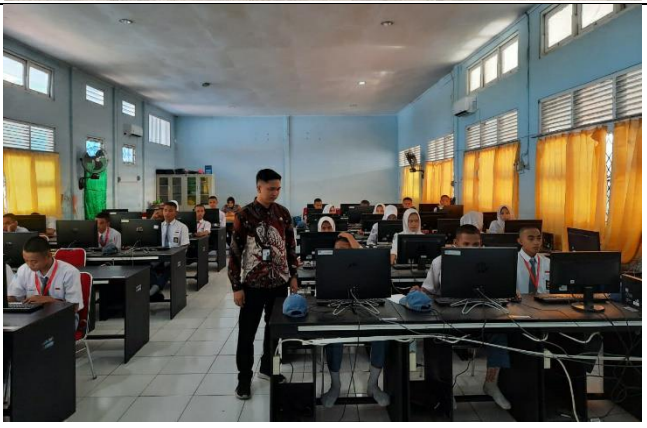
Tabel 2. 39. Aktivitas Persentase Purna Paskibraka yang menjadi Duta Pancasila

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Peningkatan Peran Purnapaskibraka Duta Pancasila Tingkat Pusat Tahun 2024 (Jakarta, tanggal 18 s.d. 23 Januari 2024)	
2.	Rapat Koordinasi Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tahun 2024 (Jakarta, tanggal 29 Januari s.d. 1 Februari 2024).	
3.	Bimbingan Teknis Aplikasi Transparansi dalam Rangka Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tahun 2024 (Jakarta, tanggal 1 s.d. 3 Februari 2024)	
4.	Rapat Koordinasi Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Pusat Tahun 2024 (Jakarta, tanggal 15 s.d. 17 Februari 2024).	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
5.	Menghadiri Undangan Kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi Transparansi Paskibraka 2024 Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kupang, tanggal 15 s.d. 17 Februari 2024).	
6.	Rapat Koordinasi Pembentukan Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Provinsi dan Kabupaten/Kota (Jakarta, tanggal 19 s.d. 21 Februari 2024).	
7.	Laporan Menghadiri Undangan Narasumber Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Seleksi Paskibraka Se-Provinsi Aceh (Aceh, tanggal 21 Februari 2024).	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
8.	Sosialisasi Program Paskibraka se-Jabodetabek (Jakarta, tanggal 29 Februari s.d. 1 Maret 2024)	
9.	Menghadiri Undangan Permintaan Pendampingan Seleksi Paskibraka Kota Bandar Lampung (Lampung, tanggal 3 s.d. 5 Maret 2024)	
10.	Survei Spesifikasi Duplikat Bendera Pusaka (Solo, tanggal 4 s.d. 6 Maret 2024)	
11.	Pembekalan Pembinaan Ideologi Pancasila Kepada Purnapaskibraka Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 dan Rapat Penyusunan Petunjuk Teknis Pembentukan Paskibraka Tingkat Pusat Tahun 2024 (Jakarta, tanggal 7 s.d. 9 Maret 2024)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
12.	Rapat Persiapan Diklat Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Paskibraka Tingkat Pusat Tahun 2024 (Jakarta, tanggal 14 s.d. 16 Maret 2024)	
13.	Kegiatan Monitoring dan Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pengibaran Duplikat Bendera Pusaka di Ibu Kota Nusantara (IKN, tanggal 20 s.d. 23 Maret 2024)	
14.	Pembentukan DPPI Daerah dan Penyusunan Peraturan Organisasi DPPI (Jakarta, tanggal 20 s.d. 23 Maret 2024)	
15.	Kegiatan Pendampingan dan Fasilitasi Seleksi Paskibraka Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara (Simalungun, tanggal 24 s.d. 27 Maret 2024)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
16.	Menghadiri Permohonan Pendampingan dan Fasilitasi Seleksi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan Seleksi Intelegensi Umum di Kabupaten Toba (Toba, tanggal 25 s.d. 28 Maret 2024)	
17.	Menghadiri dan Mengawasi Pelaksanaan Tes Pancasila & Wawasan Kebangsaan dan Tes Inteligensi Umum Pembentukan Paskibraka Kota Ternate Tahun 2024 di Kota Ternate (Ternate, tanggal 25 s.d. 29 Maret 2024)	
18.	Pendampingan pada Seleksi Calon Paskibraka 2024 di Kabupaten Donggala (Donggala, tanggal 26 s.d. 29 Maret 2024)	

E. Pengendalian dan Evaluasi PIP

PIP bertujuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila kedalam seluruh sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, agar pelaksanaan PIP sesuai dengan standar kebijakan dan nilai-nilai Pancasila maka diperlukan pengendalian dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan PIP, implementasi kebijakan PIP, aktualisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat. dan pencegahan tindakan yang bertentangan dengan nilai- nilai Pancasila.

Ukuran keberhasilan Sasaran Program Terlaksananya Pengendalian Dan Evaluasi PIP adalah:

Tabel 2. 39. Indikator Keluaran Program Terlaksananya Pengendalian Dan Evaluasi

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	REALISASI	KINERJA
Persentase Rekomendasi Pendalian PIP yang dimanfaatkan	100%	25%	 25%
Persentase Rekomendasi Evaluasi Pembinaan PIP yang dimanfaatkan	100%	100%	 100%

Realisasi capaian kinerja program tersebut diperoleh dan dicapai sebagai berikut :

E.1.Persentase Rekomendasi Pengendalian PIP yang dimanfaatkan.

Indikator Keberhasilan:

Persentase Rekomendasi Pengendalian PIP yang dimanfaatkan. Target Tahun 2024 adalah 100%.

Pada Triwulan I Tahun 2024 capaian target tersebut adalah sebesar 25% .

Capaian IKU sasaran program tersebut didukung oleh kegiatan:

- Terlaksananya Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila

- b. Terlaksananya Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Purna Paskibraka

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pada Triwulan I Tahun 2024 adalah:

Tabel 2. 40. Indikator Keluaran Persentase Rekomendasi Pengendalian PIP yang dimanfaatkan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase rekomendasi hasil pengendalian pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti	Rekomendasi hasil pengendalian pelaksanaan PIP	1 (20 Dokumen Laporan)	25%	25% (Rekomendasi)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Triwulan I tahun 2024 yaitu:

- a. Persentase rekomendasi hasil pengendalian pelaksanaan PIP yang ditindaklanjuti

Rekomendasi Hasil Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila akan terdiri dari 3 (tiga) klaster yaitu Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan. Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi, dan Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Pengkajian Materi dan Pendidikan dan Pelatihan.

Saat ini pelaksanaan Rekomendasi Hasil Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila sudah selesai dan menghasilkan 5 Dokumen Laporan Pengendalian dipersentasikan adalah sebesar 25%. Berikut adalah dokumen laporan teesebut:

1. Laporan Rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Malang;
2. Laporan Rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Pati;
3. Laporan Rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Kab.Kuningan;

4. Laporan Rekomendasi Internal;
5. Laporan Rekomendasi kepada Universitas Diponegoro;

Aktivitas dan kilas peristiwa dalam rangka kegiatan pengendalian pada Triwulan I Tahun 2024 adalah:

Tabel 2. 41. Kegiatan Rekomendasi Pengendalian PIP yang dimanfaatkan

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Menghadiri Kegiatan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan BPIP (Solo, tanggal 18 s.d. 20 Januari 2024)	
2.	Menghadiri Undangan di Universitas Pendidikan Indonesia (Bandung, tanggal 23 Januari 2024)	
3.	Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 29 s.d. 30 Januari 2024)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
4.	Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Usulan Langkah Dan Strategi Peningkatan Ekonomi Kreatif (Malang, tanggal 19 s.d. 22 Februari 2024)	
5.	Pelaksanaan Pengendalian PIP Eksternal di Kabupaten Kuningan Untuk Pelaksanaan Issue Demokrasi, Ekonomi Pancasila dan Kebudayaan (Kuningan, tanggal 22 s.d. 24 Februari 2024)	
6.	Kegiatan Pelaksanaan Pengendalian PIP Internal Untuk Pembahasan Lanjutan Draf Materi Pancasila bagi Calon Paskibraka (Kuningan, tanggal 23 s.d. 25 Februari 2024)	
7.	Setneg CAB (Sekretariat Negara Capacity Building) (Jakarta, tanggal 27 Februari s.d. 1 Maret 2024)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
8.	Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) Kepada UMKM Lokal (Pati, tanggal 1 s.d. 3 Maret 2024)	
9.	Pengendalian PIP Melalui Usulan Langkah dan Strategi Ekonomi Kreatif (Jambi, tanggal 5 s.d. 8 Maret 2024 di Jambi)	
10.	Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Pesta Demokrasi Tahun 2024 (Semarang, tanggal 25 s.d. 28 Maret 2024)	

E.2. Persentase Rekomendasi Evaluasi Pembinaan PIP yang dimanfaatkan.

Indikator Keberhasilan:

Persentase Rekomendasi Evaluasi Pembinaan PIP yang dimanfaatkan. Target Tahun 2024 adalah 100%.

Pada Triwulan I Tahun 2024 capaian target tersebut adalah sebesar 19,8% $((25\%+16\%+16\%+11\%+30\%+21\%)/6) \times 100\%$ rata-rata capaian indikator.

Capaian IKU sasaran program tersebut didukung oleh kegiatan:

- Pelaksanaan Evaluasi PIP.
- Pelaksanaan Pengukuran Pelembagaan Pancasila.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pada Triwulan I Tahun 2024 adalah:

Tabel 2. 42. Indikator Persentase Rekomendasi Evaluasi Pembinaan PIP yang dimanfaatkan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET CAPAIAN	KET
Persentase Rekomendasi evaluasi Pelaksanaan PIP yang ditindaklanjuti	Rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan PIP	1 25%	25% (Rekomendasi) Identifikasi permasalahan dan penentuan skala prioritas atau urgensi permasalahan yang akan dilakukan evaluasi, dianalisis dan disusun rekomendasinya
	Rekomendasi hasil evaluasi pendidikan dan tenaga kependidikan yang terindikasi menentang Ideologi Negara (PN)	1 16%	16% (Rekomendasi) 16% output telah terselesaikan untuk mencapai 1 rekomendasi. Adapun dengan jumlah peserta Evaluasi dan Penanganan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Terindikasi Menentang Ideologi Negara 129 responden



INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
	Rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaraan negara dan ASN yang terindikasi menentang Ideologi Negara (PN)	1	16%	16% (Rekomendasi) 16% output telah terselesaikan untuk mencapai 1 rekomendasi. Adapun dengan jumlah peserta Evaluasi dan Penanganan Penyelenggara Negara dan ASN Yang Terindikasi Menentang Ideologi Negara 116 responden
	Rekomendasi hasil evaluasi Ormas, organisasi dan perusahaan asing, serta media yang menentang Ideologi Negara (PN)	1	11%	11% (Rekomendasi) 11% output telah terselesaikan untuk mencapai 1 rekomendasi. Adapun presentase dicapai dengan penyusunan metode Evaluasi Hal-Hal yang Bertentangan dengan Ideologi Pancasila di Lingkungan Media bersama KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) dan KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah).
Persentase Pengukuran Pelembagaan Pancasila yang ditindaklanjuti	Rekomendasi Hasil pengukuran Pelembagaan Pancasila	1	30%	30% (Rekomendasi)
Persentase Rekomendasi Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila yang ditindaklanjuti	Rekomendasi Hasil pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila	1	21%	21% (Rekomendasi)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Triwulan I tahun 2024 yaitu:

- a. Persentase rekomendasi evaluasi Pelaksanaan PIP yang ditindaklanjuti

Dalam tahapannya rekomendasi evaluasi pelaksanaan PIP yang ditindaklanjuti sudah mencapai 17% yang berasal dari rata-rata capaian Rincian Output dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase rekomendasi evaluasi} = \frac{RO1 + RO2 + RO3 + RO4}{\text{Jumlah RO}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase rekomendasi evaluasi} = \frac{25 + 16 + 16 + 11}{4} \times 100\%$$

$$\text{Persentase rekomendasi evaluasi} = 17\%$$

- b. Persentase Pengukuran Pelembagaan Pancasila yang ditindaklanjuti

Dalam tahapannya Pengukuran Pelembagaan Pancasila yang ditindaklanjuti sudah mencapai 30% dimana saat ini memasuki tahap finalisasi metodologi pengukuran pelembagaan Pancasila dengan melibatkan akademisi dari UGM, UPI, IPDN dan K/L dari BPS, Bappenas, dan Kemenkumham, :

- c. Persentase Rekomendasi Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila yang ditindaklanjuti

Dalam tahapannya Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila yang ditindaklanjuti sudah mencapai 21% dimana saat ini memasuki Progress perhitungan IAP tahun 2023 yaitu perhitungan dan normalisasi sila ke-3 dan Progress Perhitungan IAP tahun 2023 Kota Palu yaitu perhitungan dan normalisasi sila 1 sd 3:

Aktivitas dan kilas peristiwa dalam rangka capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2024 adalah:

Tabel 2. 43. Aktivitas Rekomendasi Evaluasi Pembinaan PIP

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Forum Curah Pikir Hasil Kajian Implementasi Nilai Pancasila Pasca Reformasi Bersama Pusat Studi Pancasila (Yogyakarta, tanggal 19 s.d. 21 Januari 2024)	
2.	Audiensi Dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Dalam Rangka Pemutakhiran Instrumen Evaluasi Media (Jakarta, tanggal 29 Januari 2024)	
3.	Rapat Evaluasi Pembinaan Statistik Sektoral (EPSS) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Dan Badan Pusat Statistik (Jakarta, tanggal 31 Januari 2024)	
4.	Rapat Penyusunan Rekomendasi Hasil Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2023 (Jakarta, tanggal 12 Februari 2024)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
5.	Kunjungan Staf Khusus Presiden Kolaborasi Hasil Evaluasi BPIP (Jakarta, tanggal 21 Februari 2024)	
6.	Penyusunan Metode Evaluasi Hal - Hal Yang Bertentangan Dengan Ideologi Pancasila Di Lingkungan Media (Bandung, tanggal 18 s.d. 21 Februari 2024)	
7.	Penyusunan Rekomendasi Evaluasi PIP Tahun 2023 (Bekasi, tanggal 21 s.d. 23 Februari 2024)	
8.	Koordinasi Antar Instansi Menentukan Lokus Evaluasi Dengan BNPT, BAIS, dan BAISTRANAS (Jakarta, tanggal 7 Maret 2024)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
9.	Evaluasi Hal-Hal yang Bertentangan dengan Ideologi Pancasila di Lingkungan ASN, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Ormas dan Perusahaan Asing (Papua, tanggal 12 s.d. 15 Maret 2024)	
10.	Penyusunan Instrumen Evaluasi PIP (Jakarta, tanggal 25 s.d. 28 Maret 2024)	

Tabel 2. 44. Aktivitas Rekomendasi Pengukuran Pelembagaan Pancasila

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Koordinasi Pelaksanaan Koordinasi Awal Pelaksanaan Pengukuran Pelembagaan Pancasila Bersama Pusat Studi Pancasila Universitas Gajah Mada (Yogyakarta, tanggal 18 s.d. 20 Januari 2024)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
2.	Rapat Koordinasi Kegiatan Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila Tingkat Nasional Dan Tingkat Kota Palu Tahun 2023 (Jakarta, tanggal 29 s.d. 31 Januari 2024)	
3.	Koordinasi Pelaksanaan Koordinasi Awal Pelaksanaan Pengukuran Pelembagaan Pancasila Bersama Universitas Pendidikan Indonesia (Bandung, tanggal 1 s.d 2 Februari 2024)	
4.	Kick-Off Penyusunan Metodologi Pengukuran Pelembagaan Pancasila (Jakarta, tanggal 19 s.d 21 Februari 2024)	
5.	Penghitungan Capaian Indikator Aktualisasi Pancasila Tahun 2023 (Indikator Sila Ke-1 Ketuhanan Yang Maha Esa (Jakarta, tanggal 22 s.d 24 Februari 2024)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
6.	Koordinasi Pendampingan Penyusunan Metodologi Variabel Kebijakan Pengukuran Pelebagaan (Yogyakarta, tanggal 27 s.d 29 Februari 2024)	
7.	Rapat Tindak Lanjut Hasil Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila Kota Palu Tahun 2023 (<i>Cleaning And Merging Data</i>) (Jakarta tanggal 29 Februari s.d 2 Maret 2024)	
8.	Penyusunan Metodologi Pengukuran Pelebagaan Pancasila (Jakarta, tanggal 4 s.d 6 Maret 2024)	
9.	Tindak Lanjut Hasil Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila Tahun 2022 Provinsi D. I. Yogyakarta (Yogyakarta, tanggal 7 s.d 9 Maret 2024)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
10.	Penyusunan Metodologi Variabel Praktik Penyelenggaraan Negara (Jakarta, tanggal 19 s.d 21 Maret 2024)	
11.	Rapat Pendampingan Penyusunan Metodologi Pengukuran Pelembagaan Pancasila (Yogyakarta tanggal 26 s.d. 28 Maret)	
12.	Penghitungan dan Normalisasi Indeks Aktualisasi Pancasila Tahun 2023 (Indikator Sila Ke-2 Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab) (Jakarta. tanggal 21 s.d 23 Maret 2024)	

F. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Transparan, dan Akuntabel serta Pelayanan PIP yang Berkualitas

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya meliputi kegiatan Kesekretariatan yang diarahkan pada terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan BPIP yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan PIP yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Ukuran keberhasilan Terwujudnya Penyelenggaraan Tata Kelola BPIP Yang Bersih, Efektif, Transparan, dan Akuntabel adalah:

Tabel 2. 44. Indikator Keluaran Program Terwujudnya Penyelenggaraan Tata Kelola BPIP yang Bersih, Efektif, Transparan, dan Akuntabel

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	REALISASI	KET
Nilai Reformasi Birokrasi	83	66,82	Penilaian atas periode T.A. 2023
Indeks Sistem Merit	0,81	0,75%	Capaian Indeks Sistem merit Tahun 2023
Opini Laporan Keuangan BPK	WTP	WTP	Opini atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 oleh BPK
Nilai SAKIP	BB	B	Nilai evaluasi belum disampaikan oleh Kementerian PAN dan RB
Indeks Profesionalisme ASN	83	64,26%	Capaian Tahun 2023
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90%	80,42%	Survei terhadap <i>stakeholder</i>

Fokus layanan yang dilakukan dalam rangka dukungan manajemen BPIP diberikan kepada pihak internal BPIP dan K/L Pembina sebagai mitra BPIP dalam upaya penguatan kelembagaan BPIP adalah:

1. Layanan Perencanaan dan Keuangan
2. Layanan Hukum dan Organisasi;
3. Layanan Umum dan Sumber Daya Manusia;

4. Layanan Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi;
5. Layanan pengawasan Internal; dan
6. Layanan Pusat Data dan Informasi.

Indikator keberhasilan tata kelola BPIP menjadi perhatian: (i) Kementerian PAN dan RB, KASN, BKN dengan indeks RB, nilai implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), nilai sistem merit, nilai profesionalisme ASN; (ii) Badan Pemeriksa Keuangan dengan opini pada laporan keuangan, dan (iii) Kementerian Keuangan dan Bappenas terkait perencanaan, keuangan, dan monitoring dan evaluasi program dan anggaran.

Beberapa perkembangan capaian strategis tata kelola BPIP Triwulan I Tahun 2024, dicapai melalui kegiatan yaitu:

F.1. Pelaksanaan Manajemen Program, Keuangan, dan Kinerja

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Program, Keuangan, dan Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2024 adalah:

Tabel 2. 45. Indikator Keluaran Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Program, Keuangan dan Kinerja

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase pemenuhan dokumen perencanaan sesuai standar	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1	25%	25% (Dokumen)
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran (SBKU)	3	25%	25% (Dokumen)
Persentase laporan keuangan yang tepat waktu	Layanan Manajemen Keuangan	1	25%	25% (Dokumen)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase pemenuhan dokumen laporan kinerja sesuai standar	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	25%	25% (Dokumen)
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi (SBKU)	6	25%	25% (Dokumen)

Perhitungan kinerja pelaksanaan manajemen program, keuangan dan kinerja adalah periodisasi waktu pelayanan yang dilakukan selama 12 bulan (satu tahun) dan pelaporan-pelaporan yang diberikan setiap bulannya kepada instansi pembina. Hingga akhir Triwulan I periode 2024 telah terlaksana layanan selama 3 bulan dari 12 bulan yang dimana jika dipersentasikan adalah sebesar 25%. Layanan yang telah dilakukan Biro Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut:

a. Layanan Perencanaan dan Penganggaran

Dokumen Perencanaan yang berisi rencana program dan kegiatan, dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Biro Perencanaan dan Keuangan sudah melakukan layanan Perencanaan sebaik mungkin misalnya dari Revisi DIPA dan revisi POK dalam rangka optimalisasi anggaran. Berikut adalah dokumen dan layanan perencanaan dan penganggaran yang telah diselesaikan hingga Triwulan I Tahun 2024:

1. Revisi DIPA 3 (tiga) kali;
2. Revisi POK 4 (empat) kali;

3. Rapat Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Tahun 2024 dengan tema “Aktualisasi Pancasila Perkokoh Demokrasi Bangsa”;
4. Melaksanakan Rapat Persiapan Penyusunan Rencana Strategis BPIP Tahun 2025 – 2029;
5. Melaksanakan Rapat Kick Off Penyusunan Rencana Strategis BPIP Tahun 2025 – 2029.

b. Layanan Manajemen Keuangan

Dalam menjalankan Layanan Manajen Keuangan Biro Perencanaan dan keuangan pada Triwulan I Tahun 2024 telah melaksanakan dokumen dan layanan sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan Keuangan di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
2. Pelaksanaan Layanan Keuangan;
3. Pelaksanaan audit keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Pelaksanaan audit kinerja yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Rekonsiliasi laporan keuangan triwulan I di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
6. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Audited Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2023

c. Layanan Pemantauan dan Evaluasi

Dalam menjalankan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Biro Perencanaan dan keuangan pada Triwulan I tahun 2024 telah melaksanakan dokumen dan layanan sebagai berikut:

1. Penyusunan laporan capaian program dan kegiatan Tahun 2023;

2. Penyusunan laporan capaian program dan kegiatan Triwulan I Tahun 2024;
3. Pemenuhan Monev Pelaksanaan Anggaran melalui e-monev Bappenas dan smart-dja;
4. Penyusunan Laporan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (RAN P4GN);
5. Implementasi SAKIP berbasis elektronik melalui sistem APII Kinerja;
6. Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan;
7. Penyusunan tindaklanjut rekomendasi LHE implementasi SAKIP oleh KemenPANRB.
8. Koordinasi dan penyusunan laporan pada SISMONEV KP KSP setiap triwulan.

Aktivitas dalam rangka capaian kinerja pelaksanaan manajemen program, keuangan, dan kinerja pada Triwulan I Tahun 2024 adalah:

Tabel 2. 46. Aktivitas Pelaksanaan Manajemen Program, Keuangan, dan Kinerja

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran T.A 2024(Jakarta, 8 Januari 2024)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
2.	Sinergitas antar kementerian/lembaga BNPT (Program Penanggulangan Terorsime) (Jakarta, 11 Januari 2024)	
3.	Rapat Kerja BPIP (Kuningan, 24 s.d. 27 Januari 2024)	
4.	Rapat Persiapan Penyusunan Rencana Strategis BPIP Tahun 2025 – 2029 (Jakarta, 2 Februari 2024)	
5.	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, 6 Februari 2024)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
6.	Rapat Kick Off Penyusunan Rencana Strategis BPIP Tahun 2025 – 2029 (Jakarta, tanggal 13 Februari 2024)	
7.	Rapat Reviu Laporan Kinerja Unit Organisasi di Lingkungan BPIP (Jakarta, tanggal 15,16,19, 20 Februari 2024)	
8.	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Surabaya, tanggal 3 s.d. 7 Maret 2024)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
9.	Rapat Penyusunan Rekomendasi Kepada Presiden (Jakarta, tanggal 26 Maret 2024)	

F.2. Pelaksanaan Manajemen Hukum dan Organisasi

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Hukum dan Organisasi Pada Triwulan I Tahun 2024 adalah:

Tabel 2. 47. Indikator Keluaran Pelaksanaan Manajemen Hukum dan Organisasi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase rancangan produk hukum yang ditindaklanjuti	Layanan Hukum	1	25%	25% (Layanan)
Persentase rekomendasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi yang ditindaklanjuti	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	25%	25% (Layanan)

Perhitungan kinerja pelaksanaan manajemen hukum dan organisasi adalah periodisasi waktu pelayanan yang dilakukan selama 12 bulan (satu tahun) dan pelaporan-pelaporan yang diberikan setiap bulannya kepada instansi pembina. Hingga akhir periode Triwulan I tahun 2024 telah terlaksana layanan selama 3 bulan dari 12 bulan yang dimana jika dipersentasikan adalah

sebesar 25%. Uraian capaian kinerja Biro Hukum dan Organisasi sebagai berikut:

1. Persentase rancangan produk hukum dilaksanakan dengan rincian *output* layanan hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2023, tugas dan fungsi dalam kaitannya dengan pemberian layanan hukum meliputi 2 (dua) klasifikasi utama sebagai berikut:
 - a. Pemberian layanan hukum dalam kaitannya dengan penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum BPIP; dan
 - b. Pemberian layanan hukum dalam kaitannya dengan penelaahan hukum dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

Adapun masing-masing layanan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum

Rancangan peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah peraturan BPIP, sedangkan produk hukum BPIP meliputi Keputusan Dewan Pengarah/Kepala/Sekretaris Utama/Deputi BPIP, selain juga instruksi dan surat edaran.

Penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum BPIP dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 jo. Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Badan Pembinaan Ideologi

Pancasila. Tahapan kegiatan penyusunan Peraturan BPIP meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, pengundangan, pendokumentasian, dan penyebarluasan. Dalam perencanaan akan ditetapkan Program Penyusunan Peraturan BPIP Tahun 2024 dengan Keputusan Kepala BPIP. Tahap penyusunan dilakukan oleh pemrakarsa untuk selanjutnya dilakukan penyelarasan internal oleh Biro Hukum dan Organisasi. Tahap pembahasan merupakan pengharmonisasian oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelahnya Rancangan Peraturan BPIP akan ditetapkan oleh Kepala BPIP untuk selanjutnya diundangkan melalui pencatatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Tahap penyusunan keputusan dan produk hukum lainnya meliputi penyusunan dan pembahasan internal. Dalam tahap penyusunan dan pembahasan dapat melibatkan Kementerian/Lembaga, ahli, dan atau pihak lain yang terkait dengan materi produk hukum. Dalam beberapa penyusunan produk hukum memerlukan kegiatan studi banding dengan Kementerian/Lembaga dan/atau pemerintahan daerah sehingga produk hukum yang disusun tepat tujuan dan tepat sasaran serta dapat diimplementasikan.

b. Penelaahan Hukum dan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum

1) Penelaahan hukum merupakan kegiatan untuk melakukan kajian terhadap produk hukum dan berbagai permasalahan hukum, yang terdiri atas analisis hukum, evaluasi produk hukum, mediasi, dan pendampingan hukum serta asistensi penyusunan naskah kerja sama

berupa nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, kemitraan, dan naskah kerja sama lainnya.

Objek kajian penelaahan adalah lembaga (BPIP) maupun individual (Pegawai BPIP), termasuk juga kajian terhadap produk hukum BPIP dalam kerangka pembentukan atau evaluasi produk hukum BPIP. Sedangkan mediasi dan pendampingan hukum dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum yang memerlukan penanganan hukum baik litigasi maupun nonlitigasi.

Asistensi penyusunan naskah kerja sama dilaksanakan dalam rangka menguatkan materi kerja sama yang akan dituangkan dalam nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, kemitraan, dan naskah kerja sama lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan BPIP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pembinaan Ideologi Pancasila. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi potensi terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari.

- 2) Dalam kaitan pengelolaan informasi hukum di lingkungan BPIP meliputi pendokumentasian, penyebarluasan, dan pemeliharaan dokumen hukum. Dalam kaitan pengelolaan informasi hukum tersebut telah diundangkan Peraturan BPIP Nomor 6 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPIP, dimana BPIP diproyeksikan JDIH BPIP menjadi sentra informasi dan dokumentasi hukum terkait dengan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pelaksanaan urusan dokumentasi dan informasi hukum merupakan kegiatan pengelolaan produk hukum BPIP meliputi pendokumentasian, inventarisasi, dan penyediaan informasi produk hukum. Pendokumentasian produk hukum BPIP dilakukan

secara manual dan elektronik dalam JDIH BPIP yang telah terintegrasi dengan JDIHN. Sedangkan penyediaan informasi hukum dilakukan melalui berbagai sarana, yaitu dapat melalui pencetakan/penjilidan produk-produk hukum BPIP, pamflet, *standing banner*, dan berbagai media lain serta media elektronik, selain juga melakukan sosialisasi dan/atau internalisasi produk hukum yang telah diterbitkan BPIP. Pengembangan pendokumentasian dan penyebarluasan informasi hukum juga memerlukan pembangunan perpustakaan *offline* dan *online*.

Sebagai salah satu sarana penyediaan informasi hukum berbasis elektronik, Biro Hukum dan Organisasi melaksanakan pengelolaan dan pengembangan terhadap JDIH secara berkala sehingga seluruh produk hukum BPIP dan segala dokumen berkaitan dengan pembinaan ideologi Pancasila dapat terinformasikan dan diakses oleh masyarakat luas dengan serta-merta.

Seluruh pelaksanaan kegiatan pemberian Layanan Hukum dilakukan melalui berbagai tahapan yang harus dibangun secara bertahap, berkelanjutan dan perlu melibatkan koordinasi serta kerja sama dengan instansi lain (K/L/Pemda) serta didukung dengan tersedianya infrastruktur (sarana prasarana) yang memadai.

Pada Triwulan I tahun 2024, penyusunan rancangan Peraturan BPIP dengan rincian penyelesaian sebagai berikut:

No.	Jenis Produk Hukum	Jumlah	
		Rancangan	Ditetapkan dan Terdokumentasi
1	Peraturan Presiden	-	-
2	Peraturan BPIP	3	2
3	Keputusan Ketua Dewan Pengarah	-	-

No.	Jenis Produk Hukum	Jumlah	
		Rancangan	Ditetapkan dan Terdokumentasi
4	Keputusan Kepala BPIP	21	13
5	Keputusan Sekretaris Utama	12	4
6	Keputusan Deputy I	-	-
7	Keputusan Deputy II	-	-
8	Keputusan Deputy III	-	-
9	Keputusan Deputy IV	-	-
10	Keputusan Deputy V	-	-
11	Instruksi Kepala	-	-
12	Surat Edaran Kepala	-	-
13	Surat Edaran Sekretaris Utama dan Deputy	1	1
15	Nota Kesepahaman	2	-
16	Perjanjian Kerja Sama	3	-
17	Kemitraan	-	-
18	Telaah Hukum	-	-

Tabel 2. 48. Peraturan dan Produk Hukum Triwulan I Tahun 2024

NO.	JUDUL RANCANGAN	PROSES
Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan		
<i>Tidak mengajukan.</i>		
Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi		
1.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Arah Kebijakan Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila di Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi	-
2.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Perubahan atas Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2022	-
Deputi Bidang Pengkajian dan Materi		



NO.	JUDUL RANCANGAN	PROSES
3.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	Selesai pengharmonisasian
4.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Standar Kompetensi (Pembelajaran) Materi dan Metode Pendidikan Moral	-
5.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Standar Materi dan Metode Pembinaan Ideologi Pancasila Jenjang Pendidikan Formal (PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi)	-
6.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Standar dan Metode Pembinaan Ideologi Pancasila pada Lingkup Organisasi Masyarakat	-
7.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Standar dan Metode Pembinaan Ideologi Pancasila pada Lingkup Keluarga	-
8.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Standar Materi Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Hakim	-
9.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Standar Materi Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Aparatur Sipil Negara	-
10.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Standar Materi Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia	-
11.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Standar Materi Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Tentara Nasional Indonesia	-
12.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Standar Materi Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Kepala Daerah	-
13.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Standar Materi Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	-
14.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Standar Materi Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Diplomat	-

NO.	JUDUL RANCANGAN	PROSES
15.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Buku Referensi Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Perguruan Tinggi	-
Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan		
16.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	Diundangkan, Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2024
Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi		
<i>Tidak mengajukan</i>		
Sekretariat Utama		
17.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Perubahan atas Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum BPIP	Penyusunan oleh Pemrakarsa

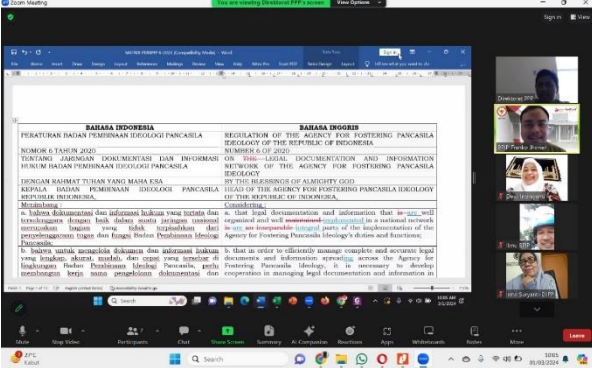
Aktivitas dan foto dokumentasi dalam rangka capaian kinerja pelaksanaan manajemen hukum dan organisasi pada Triwulan I Tahun 2024 adalah:

Tabel 2. 49. Aktivitas Pelaksanaan Manajemen Hukum dan Organisasi

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Koordinasi Sekretaris Utama dengan Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2024 (Jakarta, tanggal 3 Januari 2024)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
2.	Koordinasi Pembahasan Awal Rencana Kegiatan dan Pemetaan Kebutuhan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan BPIP (Jakarta, tanggal 5 Januari 2024)	
3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 16 Januari 2024)	
4.	Pengharmonisasian Rancangan Peraturan BPIP tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Rancangan Peraturan BPIP tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di ling. BPIP (Jakarta, tanggal 17 s.d. 21 Januari 2024)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
5.	Penyelarasan Internal Rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila (Karawang, tanggal 29 Januari s.d .2 Februari 2024)	
6.	Penerjemahan Peraturan BPIP tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Penyusunan Standar Operasional Prosedur JDIH, Telaahan Hukum, Sosialisasi Peraturan BPIP tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP, Kelas Jabatan di lingkungan BPIP, dan TND (Jakarta, tanggal 5 s.d. 7 Februari 2024)	
7.	Koordinasi Pengelolaan dan Penilaian JDIH BPIP Tahun 2024 dengan Pusat JDIH Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (Jakarta, tanggal 16 Februari 2024)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
8.	Koordinasi dan Kolaborasi Sistem Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) antara Kementerian Keuangan dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 26 Februari 2024)	
9.	Kegiatan Persiapan Evaluasi Kelembagaan Tahun 2024 dan Penyusunan Laporan Evaluasi Kelembagaan BPIP Tahun 2023 (Jakarta, tanggal 26 s.d. 29 Februari 2024)	
10.	Studi Banding Pengelolaan JDIH pada JDIH Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Jakarta, tanggal 29 Februari 2024)	
11.	Penerjemahan Peraturan Badan Pembinaan ideologi Pancasila Nomor 6 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila JDIH BPIP (Bandung, tanggal 1 Maret 2024)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
12.	Brainstorming dan Studi Komparasi Terkait dengan Penyederhanaan Birokrasi pada Instansi Pemerintah (Jakarta, tanggal 4 s.d. 8 Maret 2024)	
13.	Penyelarasan internal Rancangan Keputusan Kepala BPIP tentang Panduan Kuliah Kerja Nyata Tematik Habituasi Pancasila Penggerak Trisakti Desa Berdikari dan Rancangan Keputusan Kepala BPIP tentang Pedoman Sertifikasi Maheswara dan Penceramah Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 13 s.d. 15 Maret 2024)	
14.	Pembahasan Kinerja RB General BPIP dan Rencana Aksi Kegiatan RB Tahun 2024 (Daring, tanggal 18 s.d. 22 Maret 2024)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
15.	Penerjemahan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 6 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Prapenilaian JDIH BPIP, Pelibatan Jabatan Fungsional Analis Hukum dalam Penyelarasan Produk Hukum, Pembentukan Badan Hukum Koperasi BPIP, dan Finalisasi Penyusunan SOP terkait JDIH, Penelaahan Hukum, Penyebarluasan Produk Hukum, Mediasi, dan Pendampingan Hukum (Jakarta, tanggal 25 s.d. 28 Maret 2024)	

F.3. Pelaksanaan Manajemen SDM, BMN, dan Ketatausahaan

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Manajemen SDM, BMN, dan Ketatausahaan Pada Triwulan I Tahun 2024 adalah:

Tabel 2. 50. Capaian Target Pelaksanaan Manajemen SDM, BMN, dan Ketatausahaan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan kerumahtanggaan, layanan pengelolaan BMN, dan layanan manajemen SDM	Layanan BMN	1	25%	25% (Layanan)
	Layanan BMN (SBKU)	1	25%	25% (Layanan)
	Layanan Umum	1	25%	25% (Layanan)
	Layanan Perkantoran	1	25%	25% (Layanan)
	Layanan Sarana Internal	40	25%	25% (Layanan)
	Layanan Manajemen SDM	441	25%	25% (Layanan)
	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	95	25%	25% (Layanan)

Perhitungan kinerja pelaksanaan manajemen program, keuangan dan kinerja adalah periodisasi waktu pelayanan yang dilakukan selama 12 bulan (satu tahun) dan pelaporan-pelaporan yang diberikan setiap bulannya kepada instansi pembina. Hingga akhir Triwulan I Tahun 2024 telah terlaksana layanan selama 3 bulan dari 12 bulan yang dimana jika dipersentasikan adalah sebesar 25%. Beberapa capaian tersebut didukung sebagai berikut:

a. Barang Milik Negara

Merupakan layanan pengelolaan Barang Milik Negara yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengendalian, serta pengelolaan Barang Milik Negara. Berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, layanan BMN telah melakukan penyusunan beberapa laporan seperti Laporan Barang Pengguna Unaudited Tahun Anggaran 2023 dan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara. Laporan Barang Pengguna Unaudited Tahun Anggaran 2023 merupakan laporan yang berisi tentang akuntabilitas dan pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan akuntansi Barang Milik Negara yang meliputi Neraca, Laporan Barang Milik Negara, dan Catatan atas Laporan Barang Milik Negara. Sedangkan Laporan Pengawasan dan Pengendalian merupakan laporan pemantauan pengelolaan Barang Milik Negara yang meliputi Penetapan Status Penggunaan, Penghapusan, dan Tindak Lanjut Temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Sebelumnya.

Penyusunan Laporan yang telah dilakukan pada triwulan I diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dan manajemen dalam proses pengambilan keputusan khususnya terkait dengan pengelolaan Barang Milik Negara.

**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED
TAHUN ANGGARAN 2023**

UAPB : 122
UAKPB : 403992

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Tgl.Data : 26/03/24 6:00 AM
Tgl.Cetak : 26/03/24 8:25 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	2,194,056,917
132111	Peralatan dan Mesin	76,244,477,636
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(42,143,630,488)
162151	Software	1,951,126,700
162161	Lisensi	1,411,716,525
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	923,030,500
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	1,073,802,500
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	178,975,000
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(1,049,428,500)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(1,648,092,450)
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(125,964,652)
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	(142,907,500)
J U M L A H		38,867,162,188

b. Layanan Umum

Pengelolaan Barang Milik Negara yang menunjang tugas dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dimulai dari tahap perencanaan kebutuhan khususnya Kendaraan dan anggaran untuk pemeliharaan Barang Milik Negara yang saat ini berada pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Pada Triwulan I Tahun 2024, Layanan Umum masih berusaha untuk meningkatkan nilai Pencapaian Indek Tata Kelola Pengadaan (ITKP) dimana pada hasil dari Penilaian ITKP Tahun 2023 masih kurang memuaskan sebagai berikut:

No	Indikator	Target Penilaian	Nilai Pencapaian	Keterangan
1	Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan			
	a. Sistem Rencana Umum Pengadaan	10	10	Tercapai
	b. eTendering	5	3.88	Optimalisasi

No	Indikator	Target Penilaian	Nilai Pencapaian	Keterangan
	c. ePurchasing	5	0	Belum dilakukannya Proses Finisihing pengadaan melalui E katalog oleh PPK
	d. Toko Daring	1	1	
	e. Non etendering	5	5	
	f. eKontrak	5	4.91	
2	Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	30	0	- BPIP sudah memiliki formasi JF PPBJ yang terdiri dari 6 JF PPBJ Pertama dan 4 JF - Tahun 2023 2 orang pegawai BPIP mengikuti uji kompetensi (UKOM) JF PPBJ, namun hasil UKOM belum terbit. - Tahun 2024 mendapatkan 2 P3K JF PPBJ
3	Tingkat Kematangan UKPBJ	40	0	- BPIP belum memiliki LPSE Mandiri - Saat ini BPIP masih sebagai LPSE Agency Kementerian Hukum dan HAM
	Total	100	24.78	

Beberapa Rencana dalam peningkatan nilai ITKP tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan kuota Jabatan Fungsional Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (JFPBJ)
2. Peningkatan kompetensi SDM Pengadaan melalui pelatihan pengelolaan e-katalog bagi pelaku PBJ pada bulan Mei 2024
3. Peningkatan Tingkat Kematangan UKPBJ dengan memenuhi standar SPSE *Admin Agency*

4. Peningkatan produk dalam negeri di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

c. Layanan Perkantoran

Pada Triwulan I Tahun 2024, layanan perkantoran melakukan dukungan perkantoran seperti proses pembayaran gaji dan tunjangan/hak keuangan pejabat dan pegawai BPIP dari Dewan Pengarah hingga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri. Layanan perkantoran juga memberikan layanan berupa dekorasi kantor dan proses dukungan pemeliharaan peralatan dan mesin sehingga menunjang tugas dan fungsi pegawai. Pengelolaan kendaraan dinas seperti pemeliharaan dan pembayaran pajak dilakukan sehingga pejabat atau pegawai yang menggunakan fasilitas tersebut terasa aman pada saat menggunakan dan tidak mengalami hambatan.

d. Layanan Manajemen SDM

Pada Triwulan I Tahun 2024, Layanan manajemen SDM telah melakukan Layanan bagi seluruh Pegawai di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang rutin dilaksanakan setiap bulan adalah pembayaran Gaji dan Tunjangan bagi PNS pada Bulan Januari s.d Maret dan PPPK pada bulan Maret 2024 sebanyak 321 Orang serta Hak Keuangan Bagi Unsur Pimpinan, Dewan Pakar, Staf khusus, serta para Deputi sebanyak 21 Orang

e. Layanan Pendidikan dan Pelatihan

Pada Triwulan I Tahun 2024, 2.Layanan Pendidikan Pelatihan yang telah diusulkan sebanyak 27 Orang, dengan rincian: Pelatihan Kepemimpinan Tk. I sebanyak 2 Orang, Pelatihan Kepemimpinan Administrator sebanyak 3 Orang, Pelatihan Analis Khusus Kebijakan sebanyak 6 Orang, Pelatihan calon Analis Kebijakan sebanyak 4 Orang, Pelatihan Fungsional Pranata Komputer sebanyak 5 Orang, dan Pelatihan Fungsional

Perancang Peraturan perundang-undangan sebanyak 3 Orang, Pelatihan Fungsional Analis SDM Aparatur 2 Orang, Pelatihan Auditor Ahli Madya sebanyak 2 Orang. dari jumlah yang diusulkan ke Instansi Penyelenggara Pelatihan, yang telah dipanggil untuk mengikuti Pelatihan adalah Analis SDM Aparatur sebanyak 2 Orang dan Pelatihan Auditor Ahli Madya sebanyak 2 orang.

Aktivitas dan foto dokumentasi dalam rangka capaian kinerja pelaksanaan manajemen SDM, BMN, dan ketatausahaan pada Triwulan I Tahun 2024 adalah:

Tabel 2. 51. Aktivitas Pelaksanaan Manajemen SDM, BMN, dan Ketatausahaan

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Kegiatan Layanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	
2.	Kegiatan Layanan Dukungan Voucher Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
3.	Proses Pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor dan Plat Dinas Rahasia Untuk Pimpinan	
4.	Kegiatan Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Serta Rekonsiliasi Tahun Anggaran 2023 Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Pengguna Tahun Anggaran 2023 (Jakarta, tanggal 11 s.d. 12 Januari 2024)	
5.	Kegiatan Finalisasi Penyusunan SOP Persediaan dan Pembahasan Perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2024 (Yogyakarta, tanggal 18 s.d. 21 Januari 2024)	
6.	Pelantikan Pejabat Fungsional Arsiparis dan Analis Kebijakan Pada Tanggal 5 Februari 2024	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
7.	Sosialisasi dan Pemberian layanan BPJS bagi Pegawai BPIP (Jakarta, tanggal 12 s.d. 13 Februari 2024)	
8.	Kegiatan FGD Proses Bisnis Aplikasi Tertib Aset di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 5 s.d. 8 Maret 2024)	
9.	Kegiatan Rekonsiliasi Persiapan Penyusunan Laporan Barang Pengguna Audited Tahun Anggaran 2023 (Jakarta, tanggal 20 s.d. 22 Maret 2024)	
10.	Rapat Koordinasi Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Pengadaan (e-purchasing dan pencataan non tendering/ non purchasing) (Jakarta, tanggal 12 Maret 2024)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
11.	Penginputan Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) BPIP Tahun Anggaran 2024 (Jakarta, tanggal 29 Januari 2024 s.d. 1 Februari 2024)	
12.	Rapat Koordinasi Perencanaan Bimtek E-Katalog dengan badiklat (Jakarta, tanggal 19 Maret 2024)	
13.	Rapat Koordinasi Pelatihan e-katalog dan pencatatan non tendering melalui SPSE (Jakarta, tanggal 21 Maret 2024)	

F.4. Pelaksanaan Manajemen Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat dan Administrasi

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Fasilitas Dewan Pengarah dan Ketenagaahlian Pada Triwulan I Tahun 2024 adalah:

Tabel 2. 52. Indikator Keluaran Pelaksanaan Manajemen Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat dan Administrasi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase tingkat kepuasan terhadap dukungan teknis dan administrasi bagi dewan pengarah, staf khusus dewan pengarah, dewan pakar, dan kelompok ahli yang diberikan	Layanan Protokoler	1	25%	25% (Layanan)
Nilai indeks keterbukaan informasi publik BPIP	Layanan Hubungan masyarakat	1	25%	25% (Layanan)
	Layanan Hubungan masyarakat (SBKU)	1	25%	25% (Layanan)
Nilai pengawasan kearsipan	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	25%	25% (Layanan)

Perhitungan kinerja pelaksanaan manajemen fasilitas pimpinan, hubungan masyarakat, dan administrasi adalah periodisasi waktu pelayanan yang dilakukan selama 12 bulan (satu tahun) dan pelaporan-pelaporan yang diberikan setiap bulannya kepada instansi pembina. Hingga Triwulan I 2024 telah terlaksana layanan selama 3 bulan dari 12 bulan yang dimana jika dipersentasikan adalah sebesar 25%. Adapun layanan yang diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Layanan Protokoler dengan Indikator Kinerja kegiatan adalah Persentase kepuasan unsur pimpinan terhadap dukungan layanan keprotokolan dan administrasi yang diberikan, meliputi:
 1. Pendampingan Unsur Pimpinan;
 2. Pengurusan urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Unsur Pimpinan; dan
 3. Pembuatan Materi serta Protokol Kegiatan Unsur Pimpinan.

Adapun terdapat 12 (dua belas) Indikator Kinerja Layanan Protokoler sebagai alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana layanan protokoler memenuhi standar tertentu dan mencapai tujuan yang diinginkan dalam bentuk persentase kepuasan unsur pimpinan terhadap dukungan layanan keprotokolan dan administrasi yang diberikan dengan indikator kinerja yang telah terlaksana hingga tanggal 31 Desember 2023, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan:
Menilai kepuasan peserta, tamu, dan pihak terkait terhadap layanan protokoler.
- 2) Ketepatan Waktu:
Memastikan bahwa persiapan dan pelaksanaan layanan protokoler sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- 3) Kesesuaian dengan Protokol dan Etik Resmi:
Menilai sejauh mana layanan protokoler mematuhi protokol dan etik yang berlaku.
- 4) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya:
Menilai efisiensi dalam penggunaan anggaran dan sumber daya lainnya selama pelaksanaan layanan protokoler.
- 5) Ketepatan Informasi:
Memastikan bahwa informasi yang disampaikan dalam layanan protokoler akurat dan tepat waktu.
- 6) Manajemen Risiko dan Keamanan:

Menilai kemampuan dalam mengidentifikasi, mengelola, dan merespons risiko serta memastikan keamanan selama acara.

- 7) Koordinasi dan Kemitraan:
Menilai sejauh mana kolaborasi dan koordinasi antarinstansi atau pihak terkait dalam penyelenggaraan layanan protokoler.
- 8) Pelaporan dan Evaluasi:
Menilai kualitas pelaporan dan evaluasi terkait pelaksanaan layanan protokoler.
- 9) Pemanfaatan Teknologi:
Menilai sejauh mana teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan protokoler.
- 10) Ketersediaan dan Pelengkap Dokumentasi:
Menilai apakah semua dokumen dan catatan terkait protokoler telah tersedia dan lengkap.
- 11) Kemampuan Manajemen Krisis:
Menilai seberapa baik tim protokoler dapat menangani situasi darurat atau krisis selama acara.
- 12) Pelatihan dan Pengembangan SDM:
Menilai keterampilan dan pengetahuan staf yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan protokoler.

Penggunaan indikator kinerja guna mengukur dan meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta kualitas layanan protokoler yang diselenggarakan. Persentase indeks kinerja Layanan Protokoler pemerintahan dihitung dengan menggunakan formula berikut:

$$\text{Persentase Indeks Kinerja} = \left(\frac{\text{Skor yang Dicapai}}{\text{Skor Maksimum yang Dapat Dicapai}} \right) \times 100\%$$

- Skor yang Dicapai

Jumlah skor yang diperoleh dari hasil evaluasi atau pengukuran berbagai indikator kinerja. Skor ini diperoleh dari survei internal dan evaluasi kinerja lainnya.

- Skor Maksimum yang Dapat Dicapai
Jumlah maksimum skor yang dapat dicapai jika semua indikator kinerja memenuhi standar yang ditetapkan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Layanan Protokoler memperoleh skor 25 dari skor maksimum 100, maka persentase indeks kinerja dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Persentase Indeks Kinerja} = \left(\frac{25}{100} \right) \times 100\% = 25\%$$

Dengan demikian, indeks kinerja Layanan Protokoler pada Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi mencapai 25%. Persentase ini mencerminkan sejauh mana layanan protokoler memenuhi indikator kinerja yang telah ditetapkan bahwa semakin tinggi persentase, semakin baik kinerja Layanan Protokoler.

Layanan Protokoler telah dilaksanakan Triwulan I Tahun 2024. Kegiatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, dengan konsentrasi di wilayah DKI Jakarta dan Pulau Jawa. Adapun layanan yang dilakukan berfokus pada pendampingan Unsur Pimpinan, Pengurusan tata usaha dan rumah tangga, serta pembuatan materi (berupa *speech notes* dan/atau bahan paparan), rapat pimpinan dan protokol kegiatan Unsur Pimpinan yang sejalan dengan pendampingan unsur pimpinan.

- b. Layanan Hubungan Masyarakat dengan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Nilai Indeks Keterbukaan Informasi publik BPIP yang meliputi:
1. Penilaian atas sarana dan prasarana BPIP;
 2. Penilaian atas kualitas informasi yang diberikan BPIP kepada publik;

3. Penilaian atas jenis informasi yang diberikan BPIP kepada publik;
4. Penilaian atas komitmen BPIP melaksanakan tugas dan fungsinya;
5. Penilaian atas inovasi dan strategi dalam BPIP; dan
6. Penilaian atas digitalisasi di lingkungan BPIP.

Sebagai respons terhadap ekspektasi akan transparansi dan akuntabilitas, Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dari Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi menghadirkan hasil evaluasi keterbukaan informasi sebagai refleksi mendalam atas pelaksanaan amanah publik. Dalam penilaian ini, secara cermat mengevaluasi aspek-aspek kritis yang terdapat dalam seluruh lapisan keterbukaan informasi di lingkungan BPIP.

- c. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan dengan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Nilai Pengawasan Kearsipan sebagai pengukuran indeks kinerja. Tujuan dari pengukuran ini mencakup:
 1. Perencanaan dan Pengambil Keputusan:
Memastikan data dan informasi arsip yang akurat untuk mendukung perencanaan strategis dan pengambilan keputusan yang efektif.
 2. Dukungan Pelayanan Publik:
Menyediakan akses yang cepat dan akurat terhadap informasi arsip yang diperlukan untuk mendukung pelayanan publik.
 3. Pelindungan Terhadap Hak Keperdataan Rakyat:
Memastikan keamanan dan integritas dokumen penting seperti buku nikah, akta nikah, kartu keluarga, ijazah, dan sertifikat.

4. Bahan Pertanggungjawaban:

Menyediakan basis data yang dapat diandalkan untuk pertanggungjawaban dan pelaporan kegiatan organisasi.

5. Pelindungan Aset dan Kekayaan Intelektual:

Menjaga keberlanjutan dan keutuhan informasi yang berharga sebagai aset dan kekayaan intelektual organisasi.

6. Pembelajaran Bagi Generasi Sekarang dan yang Akan Datang:

Menyimpan dan menyajikan informasi yang berharga sebagai sumber pembelajaran bagi generasi saat ini dan yang akan datang.

7. Identitas dari Memori Kolektif:

Menyajikan dan memelihara arsip sebagai identitas dan memori kolektif masyarakat.

8. Pelindungan Eksistensi Bangsa (Arsip sebagai Simpul Pemersatu Bangsa):

Menggunakan arsip sebagai alat pemersatu dan penjaga eksistensi bangsa.

9. Sebagai Alat Bukti Hukum:

Menyediakan arsip sebagai bukti hukum yang sah dan dapat diandalkan.

Dengan mengukur indeks kinerja Layanan Penyelenggaraan Kearsipan melalui indikator ini, organisasi dapat memastikan bahwa sistem kearsipan berkontribusi secara positif pada tujuan-tujuan strategis yang lebih luas. Pencapaian Layanan Penyelenggaraan Kearsipan pada Triwulan I secara pengukuran Nasional telah berhasil mencapai predikat BB atau “Sangat Baik”.

Aktivitas dan foto dokumentasi dalam rangka capaian kinerja pelaksanaan manajemen fasilitasi pimpinan, hubungan masyarakat dan administrasi pada Triwulan I Tahun 2024 adalah:

**Tabel 2. 53. Aktivitas Pelaksanaan Manajemen Fasilitas ,
Hubungan Masyarakat dan Administrasi**

No.	Kegiatan, tanggal Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Rapat Koordinasi Biro Fasilitas , Hubungan Masyarakat dan Administrasi (Jakarta, tanggal 11 s.d. 13 Januari 2024)	
2.	Bimbingan Teknis Pengawasan Kearsipan Tahun 2024 (Jakarta, tanggal 30 Januari s.d. 2 Februari 2024)	
3.	Rapat Persiapan Hari Lahir Pancasila (Jakarta, tanggal 13 Februari 2024)	
4.	Rapat Teknis Persiapan Hari Lahir Pancasila I (Jakarta, tanggal 19 s.d. 20 Februari 2024)	

No.	Kegiatan, tanggal Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
5.	Rapat Teknis Persiapan Hari Lahir Pancasila II (Jakarta, tanggal 29 Februari s.d. 1 Maret 2024)	
6.	Sosialisasi Aplikasi Srikandi Versi 3 dan Pemberkasan Kearsipan pada Srikandi (Jakarta, tanggal 5 s.d. 8 Maret 2024)	
7.	Studi Komparatis PPID ke ANRI (Jakarta, tanggal 7 Maret 2024)	
8.	Bimbingan Teknis Keprotokoleran (Malang, tanggal 13 s.d. 16 Maret 2024)	

No.	Kegiatan, tanggal Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
9.	Kegiatan Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Pengawasan Kearsipan Tahun 2023 dan Persiapan LAKI (Jakarta, tanggal 20 s.d. 22 Maret 2024)	
10.	Pendampingan dan Layanan Keprotokolan Pimpinan (Januari s.d. Maret 2024)	
11.	Rapat Terbatas Unsur Pimpinan (Jakarta, bulan Januari s.d. Maret 2024)	
12.	Rapat Pleno Unsur Pimpinan (Jakarta, bulan Januari s.d. Maret 2024)	

No.	Kegiatan, tanggal Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
13.	Rapat Tim Kerja Dewan Pakar (Jakarta, 28 Maret 2024)	

F.5. Pelaksanaan Manajemen Pengawasan Internal

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Pengawasan Internal Pada Triwulan I Tahun 2024 adalah:

Tabel 2. 54. Indikator Keluaran Pelaksanaan Manajemen Pengawasan Internal

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	Layanan Audit Internal	1	25%	25% (Dokumen)
Nilai tingkat Maturitas SPIP (Skala 1 s.d. 5)	Laporan Hasil Penilaian Maturitas SPIP	2,5	25%	25% (Nilai)

Perhitungan kinerja pelaksanaan manajemen pengawasan internal adalah periodisasi waktu pelayanan yang dilakukan selama 12 bulan (satu tahun) dan pelaporan-pelaporan yang diberikan setiap bulannya kepada instansi pembina. Hingga Triwulan I Tahun 2024 telah terlaksana layanan selama 3 bulan dari 12 bulan yang dimana jika dipersentasikan adalah sebesar 25%.

Biro Pengawasan Internal telah melakukan beberapa rangkaian kegiatan diantaranya Pelaksanaan Audit, Reviu, Evaluasi, dan Monitoring (pemantauan) Peningkatan Kompetensi

dan Kapabilitas APIP di Lingkungan BPIP, dan kegiatan pengawasan lainnya.

Capaian indikator kinerja kegiatan pelaksanaan manajemen pengawasan internal pada indikator kinerja kegiatan persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti memiliki capaian dengan persentase 25%. (Layanan selama 3 bulan) Sedangkan nilai tingkat SPIP telah mencapai 25% (proses penilaian).

Aktivitas dan foto dokumentasi dalam rangka capaian kinerja pelaksanaan manajemen pengawasan internal pada Triwulan I Tahun 2024 adalah

Tabel 2. 55. Aktivitas Pelaksanaan Manajemen Pengawasan Internal

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Pembahasan dan Penyusunan Program Kerja Pengawasan Biro Pengawasan Internal Tahun 2024 (Jakarta, tanggal 3 Januari s.d. 10 Januari 2024).	
2.	Pengisian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Tahun 2024 (Jakarta, tanggal 9 Januari s.d. 10 Januari 2024).	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
3.	Pelaksanaan Penugasan Reviu Periode Januari Pelaksanaan Koordinasi Dan Pendampingan Tim Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan BPIP Tahun 2023 Bersama BPK (Jakarta, tanggal 8 Januari s.d. 26 Februari 2024).	
4.	Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Hasil Penilaian Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) BPIP T.A 2023 (Kuningan, tanggal 23 s.d. 31 Januari 2024).	
5.	Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan BPIP Tahun 2023 (Jakarta, tanggal 29 s.d. 31 Januari 2024).	
6.	Melaksanakan Reviu Laporan Kinerja Unit Organisasi Tahun 2023 (Jakarta, tanggal 15 s.d. 20 Februari 2024).	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
7.	Pelaksanaan Finalisasi Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPIP Tahun 2023 dan Internalisasi Sistem Pengendalian Internal (SPI) (Jakarta, tanggal 27 Februari s.d. 1 Maret 2024).	
8.	Pelaksanaan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Triwulan I Tahun 2024 di Lingkungan BPIP (Jakarta, tanggal 6 s.d. 9 Maret 2024)	
9.	Melaksanakan Kegiatan Tindak Lanjut Evaluasi Penilaian Mandiri atas Penguatan Kapabilitas APIP BPIP Tahun 2023 dan Internalisasi Penilaian Mandiri atas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terintegrasi (SPIPT) Tahun 2024 di Lingkungan BPIP (Jakarta, tanggal 13 s.d. 16 Maret 2024).	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
10.	Pelaksanaan Tindak Lanjut Evaluasi Penilaian Mandiri atas Penguatan Kapabilitas APIP BPIP Tahun 2023 dan Internalisasi Penilaian Mandiri atas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terintegrasi (SPIPT) Tahun 2024 (Jakarta tanggal 13 s.d. 16 Maret 2024).	
11.	Pelaksanaan Monitoring Kegiatan Internalisasi dan Institusionalisasi Nilai Pancasila dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Provinsi Sumatera Barat (Sumatera Barat, tanggal 17 s.d. 20 Maret 2024).	
12.	Pelaksanaan Monitoring Kegiatan Pembudayaan Gotong Royong Dalam Rangka Ngaji Pancasila dan Haul Wr. Supratman bersama Tokoh Lintas Agama dan Santri di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Surabaya, tanggal 21 s.d. 24 Maret 2024).	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
13.	Melakukan Pemantauan Kegiatan Kegiatan Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Pesta Demokrasi (Semarang, tanggal 25 s.d. 28 Maret 2024).	

F.6. Pelaksanaan Manajemen Data dan Informasi

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Data dan Informasi Pada Triwulan I Tahun 2024 adalah:

Tabel 2. 56. Indikator Keluaran Pelaksanaan Manajemen Data dan Informasi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Tingkat maturitas SPBE/ layanan data dan informasi	Layanan Data dan Informasi	1	25%	25% (Layanan)

Perhitungan kinerja pelaksanaan manajemen data dan informasi adalah periodisasi waktu pelayanan yang dilakukan selama 12 bulan (satu tahun) dan pelaporan-pelaporan yang diberikan setiap bulannya kepada instansi pembina. Hingga akhir Triwulan I tahun 2024 telah terlaksana layanan selama 3 bulan dari 12 bulan yang dimana jika dipersentasikan adalah sebesar 25%. Berikut adalah Layanan yang telah diberikan Pusat Data dan Teknologi sampai dengan :

Di Triwulan I Tahun 2024 ini, Pusat Data dan Teknologi Informasi, telah melakukan beberapa pencapaian guna mendukung tercapainya nilai indeks SPBE yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Saat ini sudah dilaksanakan beberapa kegiatan baik di bidang keamanan data dan informasi, maupun di bidang pengembangan aplikasi BPIP. Berikut rincian pencapaian hingga bulan Maret 2024, antara lain::

a. Tersusunnya Draft Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) BPIP

Pusat Data dan Teknologi Informasi tengah mengusulkan Kebijakan Internal di BPIP terkait SMKI, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai SPBE BPIP terutama pada indikator yang berkaitan dengan Keamanan Sistem Informasi, diantaranya pada Indikator 8, 22, dan 31



KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR TAHUN 202....
TENTANG
SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI (SMKI)
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

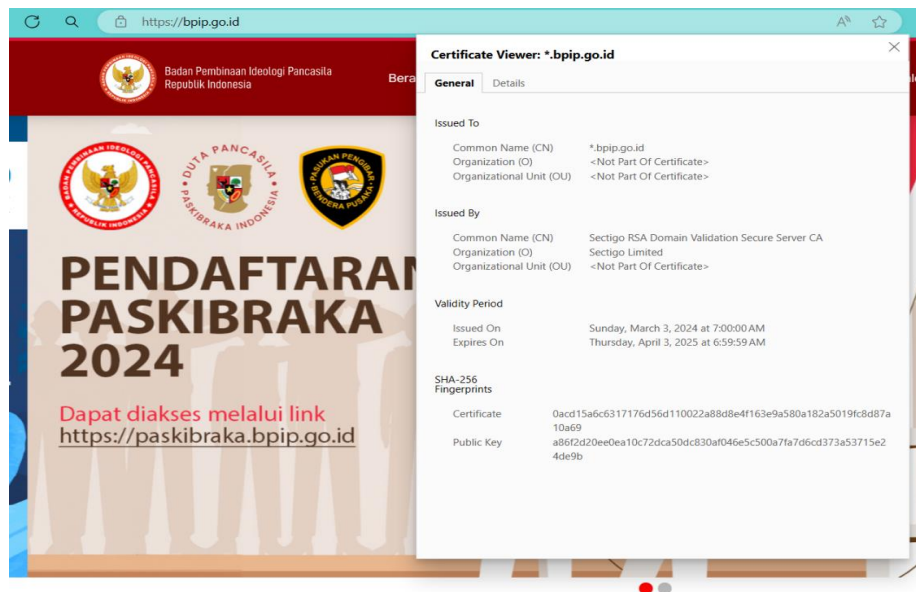
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan aset data dan informasi sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, maka perlu melakukan pengelolaan informasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

b. Pemasangan Secure Socket Layer (SSL) Website BPIP Periode 2024 – 2025

Pusat Data dan Teknologi Informasi telah melakukan pembaharuan periodiasi pada SSL untuk website-website BPIP untuk menjamin keamanan website BPIP:



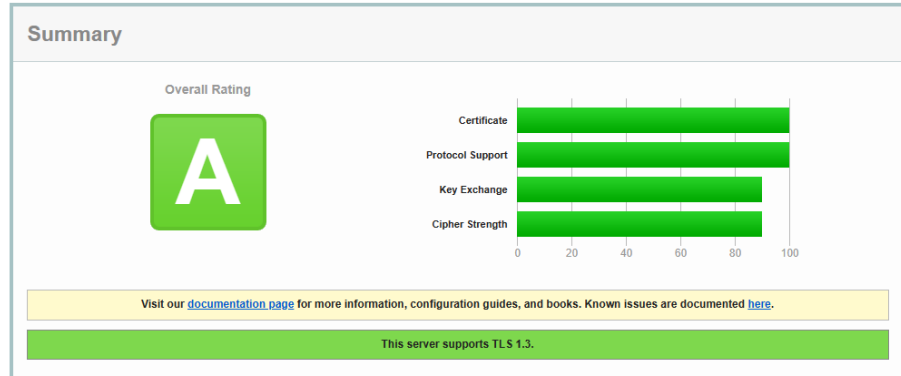
c. Upgrade Performa Secure Socket Layer (SSL) Website BPIP Periode 2024 – 2025

SSL BPIP saat ini mendukung versi TLS 1.3, dimana versi TLS 1.3 ini memiliki tingkat keamanan yang lebih baik dari versi sebelumnya (TLS 1.2) selain itu, versi TLS 1.3 ini memiliki kecepatan handshake yang jauh lebih cepat sehingga website dapat diakses lebih cepat dari sebelumnya.

SSL Report: sural.bpip.go.id (103.6.34.77)

Assessed on: Tue, 26 Mar 2024 05:01:14 UTC | [Hide](#) | [Clear cache](#)

[Scan Another »](#)



- d. Pelaksanaan Backup as a Service (BaaS) pada Website dan Server BPIP di Pusat Data Nasional Kementerian Kominfo

Pusat Data dan Teknologi Informasi BPIP juga sudah melakukan pengamanan data pada website dan server-server BPIP di PDN Kominfo. Dengan melakukan permohonan backup

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
DI REKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
DIREKTORAT LAYANAN APLIKASI INFORMATIKA PEMERINTAHAN
Indonesia Terkoneksi Semakin Digital Semakin Maju
Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta 11010 Telp/Fax. (021) 3441391. www.kominfo.go.id

Jakarta, 22 Februari 2024

**Layanan Pusat Data Nasional Sementara
(Government Cloud)**

Permohonan BaaS (Backup)

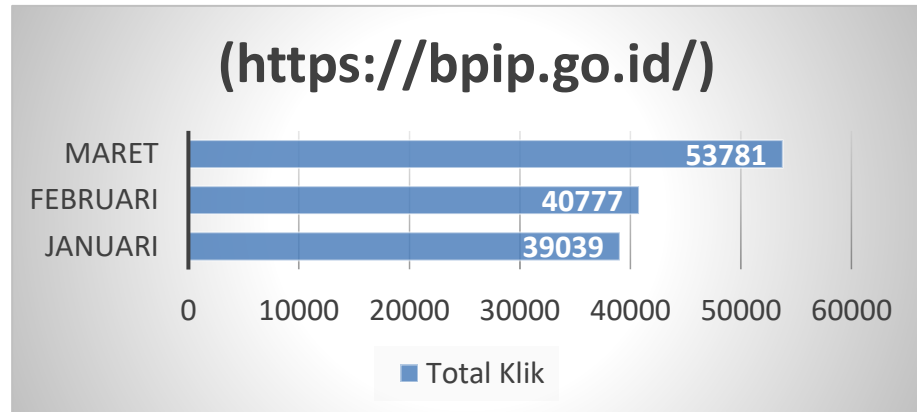
Menjawab adanya permohonan REQ-KMF-022024-05168 dengan no tiket **Badan Pembinaan Ideologi Pancasila** dari Kami dari pihak EOS Kominfo telah dipenuhi sebagai berikut :

No	List VM	Cpu (GHz)	Memory (GB)	Storage (GB)	Nama VM	IP VM	vApps Group
1	Server Sipendekar BPIP	10	8	100	VM17SIPENDEKAR	10.95.0.18	vAppDeputi-5
2	Server Simpati BPIP	10	12	1300	VM39SIMPATI-BPIP	10.95.0.40	vAppSestama
3	Server Simpul Kendali BPIP	8	8	125	VM45SIMPUL-BPIP	10.95.0.46	vAppDeputi-5
4	Server Serdadu BPIP	8	8	100	VM49SERDADU-BPIP	10.95.0.50	vAppDeputi-5

Name	Type	Objects
B2_BPIP_VM17SIPENDEKAR_050224	VMware Backup	1
B2_BPIP_VM45SIMPUL-BPIP_060224	VMware Backup	1
B2_BPIP_VM49SERDADU-BPIP_060224	VMware Backup	1
B2_BPIP_VM39SIMPATI-BPIP_060224	VMware Backup	1

e. Kunjungan website utama BPIP

Selama Triwulan I tahun 2024 website utama BPIP <https://bpip.go.id> telah dikunjungi sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini:



Aktivitas dan foto dokumentasi dalam rangka capaian kinerja pelaksanaan manajemen data dan informasi pada Triwulan I Tahun 2024 adalah:

Tabel 2. 57. Aktivitas Pelaksanaan Manajemen Data dan Informasi

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Rapat Koordinasi Terkait Cyber Security (Jakarta, tanggal 11 Januari 2024)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
2.	Koordinasi Teknis Strategi Optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik BPIP (Surakarta, tanggal 19 Januari 2024)	
3.	Rapat Koordinasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkungan BPIP (Jakarta, tanggal 31 Januari 2024)	
4.	Rapat Koordinasi Teknis Penguatan Keamanan Sistem Informasi di Lingkungan BPIP (Bandung, tanggal 4 s.d. 6 Februari 2024)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
5.	Rapat Evaluasi EPSS 2023 dan Penguatan Pelaksanaan EPSS 2024 dan Pembahasan Surat Keputusan Kepala BPIP dalam Rangka Penguatan SPBE serta Pembahasan Pembuatan Aplikasi Aset di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 26 s.d. 29 Februari 2024)	
6.	Rapat Penguatan SPBE Tahun 2024 dan Pembinaan Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkungan BPIP (Jakarta, 13 s.d. 16 Maret 2024)	

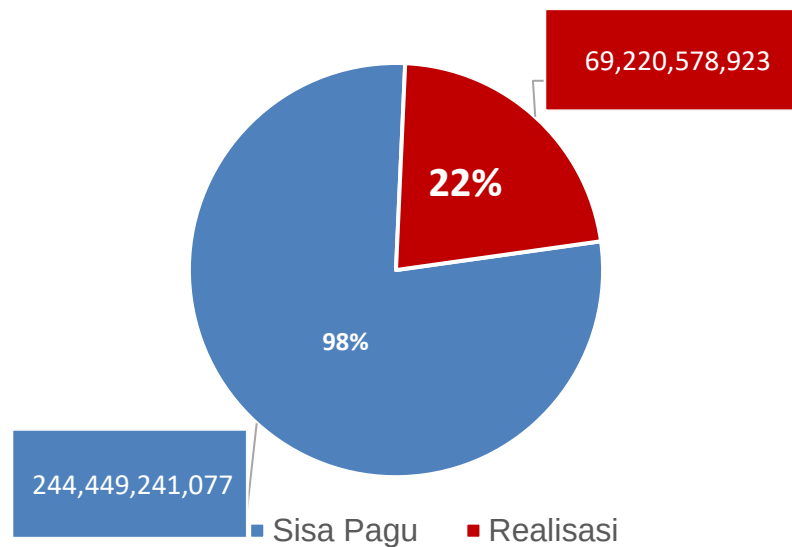
BAB III | REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I TAHUN 2024

Tahun Anggaran 2024 BPIP mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp313.669.820.000,00 (tiga ratus tiga belas miliar enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah). Anggaran digunakan mendukung 2 Program, yaitu:

- Program PIP, sebesar Rp134.840.497.000,00;
- Program Dukungan Manajemen, sebesar Rp178.829.323.000,00.

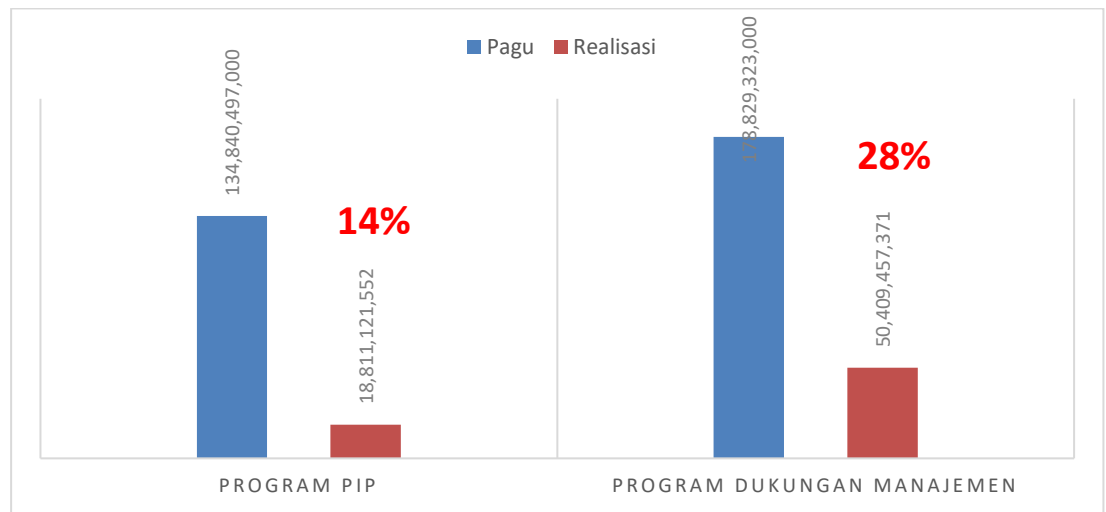
Realisasi Anggaran hingga 31 Maret 2024 (sumber: aplikasi SAKTI) adalah:

Realisasi Anggaran Total:



Gambar 3.1 Realisasi Anggaran Total

Realisasi anggaran per program:



Gambar 3.2 Realisasi Anggaran per Program

Adapun realisasi anggaran berdasarkan unit kerja adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 1. Realisasi Anggaran berdasarkan Unit Kerja

NO	UNIT KERJA	PAGU	REALISASI	PERSENTASE REALISASI	SISA DANA
Sekretariat Utama		178,829,323,000	50,409,457,371	28.19%	128,419,865,629
1	Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat dan Administrasi	30,000,000,000	3,136,000,448	10.45%	26,863,999,552
2	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	118,353,252,000	41,070,063,118	34.70%	77,283,188,882
3	Biro Perencanaan dan Keuangan	11,726,071,000	3,456,311,470	29.48%	8,269,759,530
4	Biro Hukum dan Organisasi	10,500,000,000	1,466,832,058	13.97%	9,033,167,942
5	Biro Pengawasan Internal	3,000,000,000	260,351,000	8.68%	2,739,649,000
6	Pusat Data dan Informasi	5,250,000,000	1,019,899,277	19.43%	4,230,100,723
Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan		57,423,191,000	5,342,213,410	9.30%	52,080,977,590
1	Direktorat Hubungan antar Lembaga dan Kerja Sama	6,529,038,000	1,500,443,158	22.98%	5,028,594,842
2	Direktorat Sosialisasi,	33,894,153,000	3,339,898,659	9.85%	30,554,254,341



LAPORAN CAPAIAN
PROGRAM & KEGIATAN
TRIWULAN I TAHUN 2024

NO	UNIT KERJA	PAGU	REALISASI	PERSENTASE REALISASI	SISA DANA
3	Komunikasi, dan Jaringan Direktorat Pembudayaan	17,000,000,000	501,871,593	2.95%	16,498,128,407
Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi		8,850,000,000	1,735,675,585	19.61%	7,114,324,415
1	Direktorat Analisis dan Sinkronisasi	4,150,000,000	840,587,244	20.26%	3,309,412,756
2	Direktorat Advokasi	2,850,000,000	477,701,454	16.76%	2,372,298,546
3	Direktorat Pelembagaan dan Rekomendasi	1,850,000,000	417,386,887	22.56%	1,432,613,113
Deputi Bidang Pengkajian Materi		10,750,000,000	2,418,550,235	22.50%	8,331,449,765
1	Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	3,850,000,000	641,692,410	16.67%	3,208,307,590
2	Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila	3,450,000,000	1,098,181,116	31.83%	2,351,818,884
3	Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila	3,450,000,000	678,676,709	19.67%	2,771,323,291
Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan		40,642,676,000	7,243,313,848	17.82%	33,399,362,152
1	Direktorat Perencanaan, Standardisasi Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	9,367,676,000	1,345,767,071	14.37%	8,021,908,929
2	Direktorat Penyelenggaraan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	17,500,000,000	3,724,002,387	21.28%	13,775,997,613
3	Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	13,775,000,000	2,173,544,390	15.78%	11,601,455,610
Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi		17,174,630,000	2,071,368,474	12.06%	7,398,706,332
1	Direktorat Pengendalian	4,956,512,000	862,920,420	17.41%	4,093,591,580
2	Direktorat Evaluasi	3,827,338,000	522,223,248	13.64%	3,305,114,752
3	Direktorat Pengukuran Pelembagaan Pancasila	8,390,780,000	686,224,806	8.18%	7,704,555,194
TOTAL		313,669,820,000	69,220,578,923	22.07%	236,744,685,883

BAB IV EVALUASI DAN UPAYA PERBAIKAN

Bab ini merupakan hasil evaluasi terhadap kendala-kendala yang dihadapi unit kerja dalam rangka mencapai sasaran program dan kegiatan. Terhadap kendala tersebut dilakukan upaya tindak lanjut. Usulan rekomendasi merupakan upaya perbaikan guna peningkatan kinerja di waktu mendatang. Kendala dan tindak lanjut atau rekomendasi atau usulan perbaikan dikelompokkan per sasaran program, yaitu:

1. Kendala dan rekomendasi terwujudnya hubungan antar lembaga, kerja sama, sosialisasi, komunikasi dan jaringan, serta pembudayaan PIP

Kendala dan faktor penghambat pelaksanaan program, yaitu:

Tabel 4. 1. Kendala dan Tindak Lanjut terwujudnya hubungan antar lembaga, kerja sama, sosialisasi, komunikasi dan jaringan, serta pembudayaan PIP

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase penilaian atas efektivitas HAL dan kerja sama dalam rangka pengarusutamaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti	1. Masih Kurangnya SDM 2. Beluma adanya unit kerja yang fokus pada perencanaan tindak lanjut kerjasama 3. Belum optimalnya penyusunan rencana aksi atas kerja sama yang telah ditandantangani 4. Belum optimalnya pemanfaatan sarana komunikasi antar lembaga 5. Belum adanya sistem informasi kerjasama	1. Memaksimalkan SDM yang tersedia. 2. Menyusun Perencanaan Kerjasama Per Tahun yang ditetapkan oleh Kepala BPIP sesuai Perban 6 Tahun 2021. 3. Melakukan sinkronisasi berupa penyusunan peluang rencana aksi kerja sama antara internal BPIP dengan mitra kerja BPIP. 4. Membentuk Forum Koordinasi/komunikasi Kerjasama lintas Kementerian / Lembaga. 5. Membuat Sistem Informasi Manajemen Kerjasama.

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase rekomendasi kerja sama dan hubungan antar lembaga tinggi negara, Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah dan organisasi sosial politik serta komponen masyarakat lainnya bidang prioritas yang ditindaklanjuti	1. Belum adanya kesepahaman dalam melakukan mekanisme penyusunan naskah kerja sama 2. Belum adanya sinkronisasi antara program BPIP dengan unit kerja teknis pelaksana 3. Belum adanya tanggung jawab dari pengurus kerja sama dalam menyusun rencana aksi 4. Belum adanya anggaran yang dapat memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang pra dan pasca penyusunan kerja sama	1. Menyusun NSPK terkait petunjuk teknis mekanisme penyusunan naskah kerja sama. 2. Penyusunan perencanaan terpadu yang melibatkan seluruh Unit kerja teknis pelaksana 3. Memfasilitasi pertemuan antara pengusul dengan mitra kerja sama BPIP 4. Perlunya anggaran yang dapat mendukung pelaksanaan pra dan pasca kerja sama
Persentase rekomendasi kerja sama dan hubungan antar lembaga tinggi negara, Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah dan organisasi sosial politik serta komponen masyarakat lainnya bidang non prioritas yang ditindaklanjuti	1. Belum adanya kesepahaman dalam melakukan mekanisme penyusunan naskah kerja sama 2. Belum adanya sinkronisasi antara program BPIP dengan unit kerja teknis pelaksana 3. Belum adanya tanggung jawab dari pengurus kerja sama dalam menyusun rencana aksi 4. Belum adanya anggaran yang dapat memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang pra dan pasca penyusunan kerja sama	1. Menyusun NSPK terkait petunjuk teknis mekanisme penyusunan naskah kerja sama. 2. Penyusunan perencanaan terpadu yang melibatkan seluruh Unit kerja teknis pelaksana 3. Memfasilitasi pertemuan antara pengusul dengan mitra kerja sama BPIP 4. Perlunya anggaran yang dapat mendukung pelaksanaan pra dan pasca kerja sama
Persentase konten sosialisasi PIP yang ditindaklanjuti	1. Belum adanya penyusunan dan kajian komprehensif tentang materi Sosialisasi PIP 2. Jumlah personil pendukung terbatas	1. Perlu dilakukan kajian komprehensif tentang strategi komunikasi dengan melibatkan pakar, praktisi, dan akademisi, serta publik 2. Diperlukan penambahan jumlah sumber daya manusia administrasi dan kegiatan teknis.

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase strategi komunikasi terhadap isu PIP yang ditindaklanjuti	1. Belum adanya kajian komprehensif tentang strategi komunikasi PIP 2. Belum adanya instrument khusus untuk mengetahui jangkauan pemberitaan, jangkauan program radio, dan rating program BPIP pada media televisi 3. Jangka waktu kontrak yang panjang pada pelaksanaan kegiatan di media online 4. Jumlah personil pendukung terbatas	1. Perlu dilakukan kajian komprehensif tentang strategi komunikasi dengan melibatkan pakar, praktisi, dan akademisi, serta publik 2. Belum adanya instrument khusus untuk mengetahui jangkauan pemberitaan, jangkauan program radio, dan rating program BPIP pada media televisi 3. Dilakukan beberapa mekanisme/tahapan kontrak secara termin 4. Diperlukan penambahan jumlah sumber daya manusia yang membantu pelaksanaan administrasi dan kegiatan teknis.
Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan jaringan yang diselesaikan	Proses pemindahan POK	Kegiatan teknis yang berkaitan dengan Pengembangan Jaringan dilakukan mekanisme pengajuan kepada unit kerja Direktorat Sosialisasi dan Komunikasi
Persentase penilaian atas efektivitas pembudayaan nilai Pancasila	1. Sangat minimnya anggaran dibanding dengan pencapaian <i>output</i> kinerja 2. <i>Refocusing</i> dan pagu blokir anggaran 3. Kurangnya SDM pada direktorat	Selalu menyampaikan pentingnya keberpihakan pada proses pembudayaan nilai Pancasila yang langsung ke masyarakat kepada unit kerja yang berwenang mengalokasikan anggaran dan juga SDM
Jumlah dokumen kebijakan strategis dan program teknis pemantapan pranata	1. Sangat minimnya anggaran dibanding dengan pencapaian <i>output</i> kinerja 2. <i>Refocusing</i> dan pagu blokir anggaran 3. Kurangnya SDM pada direktorat	1. Selalu menyampaikan pentingnya keberpihakan pada proses pembudayaan nilai Pancasila yang langsung ke masyarakat kepada unit kerja yang berwenang mengalokasikan anggaran dan juga

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
		SDM 2. Melaksanakan FGD secara daring dan luring dan melaksanakan studi literasi dan kunjungan lapangan
Jumlah dokumen kebijakan strategis dan program teknis inovasi pembudayaan PIP	1. Dalam pelibatan unsur seniman, budayawan dan pelaku kebudayaan dibutuhkan kerja sama dan kesepahaman terhadap penokohan masing-masing pakar dalam birokrasi administrasi keuangan 2. Kurang disejajarkannya kelompok pencipta karya seni budaya dibanding dengan kelompok akademisi dan pakar lainnya 3. <i>Refocusing</i> dan pagu blokir anggaran 4. Kurangnya SDM pada direktorat	1. Perangkulkan kepada tokoh seni budaya tetap dilaksanakan dengan keterbatasan yang ada 2. Selalu menyampaikan pentingnya keberpihakan pada proses pembudayaan nilai Pancasila yang langsung ke masyarakat kepada unit kerja yang berwenang mengalokasikan anggaran dan juga SDM.
Jumlah kelompok target yang melaksanakan aktualisasi Pancasila setelah pembudayaan	Pengukuran efektifitas dari kelompok target yang melaksanakan aktualisasi	Meminta pokmas untuk memberikan respon melalui form isian setelah proses pembudayaan di akhir tahun

Rekomendasi guna perbaikan dan peningkatan kinerja program, yaitu:

- a) Penyusunan NSPK dalam bentuk Peraturan Badan yang diturunkan dalam Petunjuk Teknis terkait dengan kerja sama pembinaan ideologi Pancasila.
- b) Menyusun program/kegiatan dalam kaitan optimalisasi kerjasama PIP dalam rangka efektivitas kerjasama PIP;
- c) Mengusulkan kegiatan yang dituangkan dalam bentuk perencanaan kegiatan pra dan pasca kerja sama PIP untuk memfasilitasi efektivitas dari suatu kerja sama;

- d) Dilakukan koordinasi antara Kedeputian I BPIP dengan Kedeputian lain BPIP untuk penguatan kembali ruang lingkup dari Nota Kesepahaman atau Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati agar mudah dipahami dan dapat di implementasikan dalam kegiatan nyata;
- e) Dilakukan peninjauan/evaluasi terhadap nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama yang telah ditanda tangani yang sudah lewat masa berlakunya agar seluruh kegiatan kerja sama dapat dilaksanakan dengan optimal.
- f) Penyusunan rencana kerja yang sesuai dengan prioritas kerja Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama;
- g) Perlunya tersusun arah kebijakan dan peta jalan (roadmap) Pembinaan Ideologi Pancasila dalam rangka pelaksanaan Sosialisasi dan Pengembangan Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila;
- h) Melakukan evaluasi dan peninjauan ulang terhadap target kinerja khususnya dalam segi efektivitas program Sosialisasi dan pengembangan Komunikasi berbasis elektronik berdasarkan Rencana Strategis BPIP tahun 2020-2024;
- i) Perlunya penyusunan alur Proses Bisnis Direktorat Sosialisasi dan Komunikasi secara komprehensif guna menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik;
- j) Perlunya standardisasi materi serta koordinasi peningkatan sinergitas bersama Kementerian/Lembaga yang telah bekerja sama dengan BPIP guna pelaksanaan Sosialisasi maupun Pengembangan Komunikasi secara tepat dan efektif;
- k) Peningkatan kapabilitas pegawai di lingkungan Direktorat Sosialisasi dan Komunikasi dalam rangka pemenuhan dan pencapaian *Output* Kerja serta *Outcome* Kinerja;
- l) Penguatan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Sosialisasi dan Komunikasi yang memerlukan sinergitas dan gotong royong antar unit kerja di lingkungan BPIP;

- m) Proses pengajuan anggaran yang disesuaikan dengan kegiatan serta kebutuhan secara efisien. Perlu menyusun pedoman umum pelaksanaan pembudayaan Pancasila.
- n) Perlu membuat pengorganisasian, fasilitasi dan komunikasi dalam penanganan bencana alam maupun bencana sosial;
- o) Perlu disusun penyelenggaraan pembinaan Desa Berdikari Pancasila melalui program KKN di perguruan tinggi secara nasional;

2. Kendala dan rekomendasi tindak lanjut terwujudnya internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, apresiasi, dan pengawasan regulasi.

Kendala dan faktor penghambat pelaksanaan program, yaitu:

Tabel 4. 2. Kendala dan Tindak Lanjut terwujudnya internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi dan pengawasan regulasi

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Jumlah rekomendasi arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi pancasila di bidang hukum, advokasi dan pengawasan regulasi yang ditindaklanjuti	Belum adanya dasar hukum dalam pelaksanaan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi dan pengawasan regulasi dalam bentuk Peraturan Badan	Draft arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi dan pengawasan regulasi yang telah disusun oleh Kedeputian bidang hukum, advokasi dan pengawasan regulasi diserahkan kepada biro hukum untuk ditindaklanjuti
Persentase rekomendasi hasil analisis dan penyalarsan peraturan perundang-undangan terhadap nilai-nilai Pancasila	Belum adanya dasar hukum dalam pelaksanaan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi dan pengawasan regulasi dalam bentuk Peraturan Badan	Draft arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi dan pengawasan regulasi yang telah disusun oleh Kedeputian bidang hukum, advokasi dan pengawasan regulasi diserahkan kepada biro hukum untuk ditindaklanjuti

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persetase rekomendasi hasil internalisasi dan institusionalisasi Pancasila dalam kebijakan dan regulasi yang ditindaklanjuti	1. Belum adanya penguatan kelembagaan BPIP dalam bentuk Undang-Undang; 2. Belum adanya SOP dan Pedoman kriteria dalam melakukan analisis dan penyeselarasan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan sehingga tidak ada keseragaman dalam implementasi pada program dan kegiatan masing-masing bidang di direktorat. 3. Belum terstrukturnya penyelenggaraan Penyeselarasan baik ditingkat pusat maupun di daerah	1. Perlu penguatan kelembagaan BPIP dengan mengupayakan agar RUU BPIP dibahas pada tahun 2024; 2. Perlu pembuatan SOP dan pedoman kriteria kinerja penyeselarasan rancangan peraturan perundang-undangan. 3. Perlu adanya kesepakatan konseptual antar stakeholder penyelenggara penyusunan peraturan perundang-undangan
Persentase rekomendasi advokasi PIP yang ditindaklanjuti	1. Belum adanya pedoman baku terkait penanganan penyelesaian masalah dan kendala PIP mengakibatkan kurang maksimalnya Advokasi PIP khususnya dalam pola kelola, tahapan dan metode pelaksanaan; dan 2. Belum adanya kelembagaan BPIP di daerah mengakibatkan terhambatnya penanganan, penyelesaian dan penanggulangan masalah dan kendala PIP yang membutuhkan pendampingan dan pendekatan secara intens, masive dan komprehensif.	1. Penyusunan Pedoman Baku terkait penanganan penyelesaian masalah dan kendala PIP; 2. Meningkatkan Kerjasama BPIP dengan mitra Pembinaan Ideologi Pancasila baik di Pusat ataupun di Daerah.

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Jumlah rekomendasi hasil penyelarasan rancangan kebijakan dan regulasi serta hasil kajian kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang ditindaklanjuti	1. Rekomendasi hasil internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila provinsi/K/L tidak semata-mata ditindaklanjuti dikarenakan memerlukan mekanisme tersendiri dalam merevisi atau mencabut peraturan perundang-undangan 2. Tahapan penyusunan Laporan Rekomendasi belum menerapkan tahapan-tahapan sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi terhadap Kebijakan dan Regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.	1. Perlu dilakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi atas rekomendasi hasil kajian Regulasi dan Kebijakan yang bertentangan dengan Pancasila 2. Kajian Regulasi dan Kebijakan selalu berpedoman pada Standar Operational Prosedur (SOP) yang berdasarkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi terhadap Kebijakan dan Regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.
Persentase rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila yang ditindaklanjuti	Belum sinerginya unit kerja Direktorat Analisis dan Penyelarasan dengan Direktorat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi dalam hal Hasil Kajian Peraturan Perundang-undangan yang diwujudkan dalam Rekomendasi Regulasi yang bertentangan dengan Nilai-nilai Pancasila.	Kajian Peraturan Perundang-Undangan dan Penyusunan rekomendasi hendaknya menjadi tugas dan fungsi unit Kerja Direktorat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi

Rekomendasi guna perbaikan dan peningkatan kinerja program, yaitu:

- a) Untuk melaksanakan perpanjangan tugas Deputy bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi sebagaimana diatur dalam organisasi dan tata kerja, perlu disusun arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang Hukum,

Advokasi dan Pengawasan Regulasi dalam bentuk Peraturan BPIP;

- b) Perlu adanya penyempurnaan tata laksana guna mendukung pelaksanaan tugas analisis dan penyelarasan di Direktorat Analisis dan Penyelarasan;
- c) Mendorong peningkatan pelaksanaan Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila pada Kementerian/Lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya dan Purna Paskibraka Duta Pancasila;
- d) Mendorong disusunnya Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai dasar atas kerjasama kajian advokasi pembinaan ideologi Pancasila dengan mitra Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- e) Mendorong penyusunan pedoman pelaksanaan advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila berupa Peraturan Badan;

3. Kendala dan rekomendasi tindak lanjut terwujudnya perumusan arah kebijakan, pengkajian, dan standardisasi materi PIP.

Kendala dan faktor penghambat pelaksanaan program, yaitu:

Tabel 4. 3. Kendala dan Tindak Lanjut terwujudnya perumusan arah kebijakan, pengkajian, dan standardisasi materi PIP

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase hasil kajian PIP yang dimanfaatkan	Masukan terhadap draf 3 (tiga) buku direktorat PM PIP	1. Menyelesaikan draf 3 (tiga) buku direktorat PM PIP berdasarkan masukan dari pimpinan 2. Penyusunan Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila PAUD s.d SMA Bersama Kemendikbud 3. Penyusunan draf materi PIP bagi Diplomat 4. Penyusunan draf Perban Hakim, Kepala Daerah, ASN, TNi dan

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
		Polri 5. Penyusunan materi PIP Paskibraka dan Duta Pancasila
Persentase rekomendasi kajian kebijakan PIP yang ditindaklanjuti	- Adanya perubahan <i>timeline</i> penyelesaian dokumen kebijakan yang mengikuti agenda dan kebijakan pimpinan; - Pelibatan <i>stakeholder</i> lintas K/L dalam pelaksanaan kajian yang memerlukan jangka waktu koordinasi yang cukup panjang; - Pengelolaan jurnal yang melibatkan beberapa <i>stakeholder</i> di luar BPIP, sehingga diperlukan manajemen <i>timeline</i> kegiatan yang baik. - Kurangnya SDM yang memiliki kualifikasi dalam pengelolaan Jurnal Ilmiah (keterampilan IT). - Dokumen otentik yang diperoleh direktorat pengkajian kebijakan PIP merupakan dokumen <i>second handed</i>.	- penyelesaian dokumen kebijakan yang mengikuti agenda dan kebijakan pimpinan; - Mengefektifkan pembahasan substansi dalam setiap pertemuan antar <i>stakeholder</i> - Mengintensifkan komunikasi dengan <i>stakeholder</i> terkait untuk mengikuti <i>timeline</i> yang telah disepakati - Mengusulkan penambahan SDM yang memiliki keahlian dalam pengelolaan Jurnal Ilmiah (keterampilan IT) - Diperlukan pengkajian yang lebih lanjut oleh direktorat pengkajian kebijakan PIP dengan melibatkan lembaga-lembaga yang memiliki akses terhadap naskah-naskah otentik
Persentase NSPK tentang standardisasi materi, bahan ajar dan metode PIP yang ditindaklanjuti	Masukan terhadap draf 3 (tiga) buku direktorat PM PIP	- Menyelesaikan draf 3 (tiga) buku direktorat PM PIP berdasarkan masukan dari pimpinan - Penyusunan Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila PAUD s.d. SMA - Penyusunan draf Perban Hakim, Kepala Daerah, ASN, TNI dan Polri - Penyusunan materi PIP Paskibraka dan Duta Pancasila

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase rekomendasi kajian implementasi PIP yang ditindaklanjuti	1. Kualitas SDM yang dibutuhkan belum memenuhi kualifikasi bidang keilmuan dalam melakukan tugas dan fungsi pengkajian implementasi PIP - Keterbatasan anggaran dalam melaksanakan identifikasi nilai Pancasila dan pengkajian implementasi PIP dalam kebijakan, program, dan kegiatan pada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan Duta Pancasila 2. Belum terlembagakannya Pancasila sebagai perwakilan yang melakukan fungsi Pembinaan Ideologi Pancasila di seluruh wilayah Indonesia menyebabkan tidak maksimalnya dalam pengkoordinasian pengkajian implementasi PIP dan tugas lainnya - Perubahan kebijakan pimpinan yang menyebabkan adanya penyesuaian output sehingga harus dilakukan Kembali identifikasi dan pelaksanaan tahapan kegiatan.	1. Dibutuhkan perencanaan yang matang, konsistensi dan integritas dalam menghadapi segala resiko perubahan kebijakan. - Menyampaikan Usulan Penambahan anggaran Direktorat 2. Bekerjasama dengan seluruh stakeholder (lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan Duta Pancasila Purnapaskibraka Indonesia dalam pembinaan ideologi Pancasila) 3. Melakukan swakelola dengan pusat-pusat kajian Pancasila

Rekomendasi guna perbaikan dan peningkatan kinerja program yaitu:

- a) Menyusun prioritas kegiatan didasarkan pada ketersediaan anggaran agar unit kerja tetap dapat melaksanakan kegiatan secara maksimal;
- b) Komitmen bersama antar unit kerja dalam mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan dalam bentuk laporan keuangan maupun laporan kegiatan.
- c) Percepatan penyelesaian materi dasar PIP menjadi syarat utama untuk pencapaian tujuan dan indikator kegiatan. Selain itu dalam penyusunan standardisasi materi, bahan ajar dan metoda aparatur negara harus dapat mempertimbangkan metoda pengajaran dengan melihat obyek sasaran aparatur, sehingga dalam penyusunannya sesuai dengan metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan audience dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi dan bersifat kekinian guna menyeimbangkan pengaruh informasi yang dominan dikuasai oleh arus informasi global.

4. Kendala dan rencana tindak lanjut terselenggaranya Diklat PIP bagi aparatur negara, lembaga pendidikan/keagamaan formal, dan lembaga pendidikan nonformal dan informal.

Kendala dan faktor penghambat pelaksanaan program, yaitu:

Tabel 4. 4. Kendala dan Tindak Lanjut terselenggaranya Diklat PIP bagi aparatur negara, lembaga pendidikan/keagamaan formal, dan lembaga pendidikan nonformal dan informal

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase hasil perencanaan dan pengembangan Diklat PIP yang ditindaklanjuti	Gotong royong dalam pengembangan kebijakan/regulasi, pembangunan jejaring kerja, serta pengelolaan sumber daya nasional dalam mendukung penyelenggaraan Diklat PIP secara instansional yang terstandar belum optimal.	Melakukan komunikasi strategis secara internal dan eksternal untuk mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan dalam penerapan strategi pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja
Persentase Tenaga Pendidik dan Pelatih Diklat PIP yang Bersertikat	Masih menunggu proses rekam jejak peserta sertifikasi pengajar Diklat PIP oleh Badan Intelegen Negara (BIN) atas 677 orang calon pengajar Diklat PIP yg telah lulus asesmen sesuai dengan Berita Acara Asesmen dari Tim Asesor Sertifikasi.	Berkoordinasi dengan BIN untuk mempercepat proses rekam jejak peserta sertifikasi pengajar Diklat PIP 677 yang telah lulus Asesmen Sertifikasi Pengajar Diklat PIP.
Persentase NSPK Akreditasi Penyelenggara Diklat PIP yang ditindaklanjuti	Keputusan Kepala BPIP Nomor 65 tahun 2023 tentang pedoman akreditasi penyelenggara Diklat PIP belum diketahui oleh seluruh K/L/instansi terkait di tingkat pusat dan daerah.	Melakukan diseminasi Keputusan Kepala BPIP Nomor 65 tahun 2023 tentang pedoman akreditasi penyelenggara Diklat PIP dengan mengundang K/L/instansi terkait di tingkat pusat dan daerah..
Persentase pemanfaatan standarisasi dan kurikulum Diklat PIP	Terbatasnya jumlah sumber daya manusia dalam melakukan penyusunan, pengembangan, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator kegiatan program dan indikator kinerja kegiatan.	Memaksimalkan jumlah SDM yang tersedia untuk mencapai indikator kinerja kegiatan sebanyak 7 NSPK dan menyampaikan kepada Biro Umum dan SDM untuk dilakukan penambahan SDM di Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum yang memiliki kualifikasi dan kompetensi khususnya dalam hal standarisasi dan kurikulum Pendidikan dan pelatihan.

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase Pendidikan dan Pelatihan PIP yang memanfaatkan standarisasi dan kurikulum Diklat PIP	Penyelenggaraan Diklat PIP dan Diklat bagi Pengajar Diklat PIP belum secara optimal sesuai dengan Keputusan Kepala BPIP No 34 Tahun 2021 dan Keputusan Kepala BPIP No 35 Tahun 2021.	Melakukan koordinasi internal dan menyampaikan hasil evaluasi hasil Diklat PIP dan Diklat bagi Pengajar Diklat PIP kepada Direktorat Penyelenggaraan Diklat
Persentase tenaga pengajar Diklat PIP yang tersertifikasi.	Belum tersosialisasinya peraturan Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 65 Tahun 2023 Tentang Pedoman Akreditasi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Pedoman Sertifikasi Penceramah/ Fasilitator dan Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	1. Melakukan komunikasi serta bekerjasama Direktorat Perencanaan Diklat dalam rangka penyelesaian dokumen Cetak Biru Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila 2. Melakukan komunikasi strategis dengan kementerian dan lembaga dalam rangka penerapan kebijakan strategis dan program teknis terkait pelaksanaan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila secara nasional
Persentase Peserta Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang kompetensinya meningkat	Kendala teknis berupa tidak stabilnya jaringan internet pada lokasi pelaksanaan Diklat bagi Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang mengakibatkan peserta kehabisan waktu pengerjaan soal pre-test dan post-test yang diberikan	1. Melakukan survei serta pengecekan bandwidth wifi di lokasi pelaksanaan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila 2. Melakukan penambahan bandwidth wifi di lokasi pelaksanaan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila
Persentase peserta Diklat PIP yang melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di komunitasnya	Penyampaian laporan aktualisasi dari lulusan diklat terlambat disampaikan	1. Koordinasi intensif dengan para lulusan diklat melalui para penanggung jawab laporan 2. Usulan penambahan alokasi anggaran untuk

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase Peserta Diklat PIP yang kompetensinya meningkat		penyelenggaraan Diklat PIP; 3. Kerja sama penyelenggaraan diklat dengan Kementerian/Lembaga/Instansi, baik Pusat dan Daerah melalui mekanisme <i>resource sharing</i>
Persentase Purna Paskibraka yang menjadi Duta Pancasila	1. Belum begitu atensi terhadap tugas Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, di tahun 2023 ada 4 provinsi. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022, Paskibraka bertugas melaksanakan penaikan dan penurunan bendera pada Hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus tahun berjalan dan melaksanakan penaikan dan penurunan bendera pada Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni. Setelah melakukan kedua tugas tersebut, Paskibraka baru bisa disebut sebagai Purnapaskibraka. Purnapaskibraka harus mendapatkan diklat pembinaan ideologi Pancasila dan lulus dalam diklat tersebut agar bisa diangkat menjadi PDP. 2. Purnapaskibraka sebelum Tahun 2022 masih banyak yang belum mengikuti Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila 3. Ada beberapa Kab/Kota yang tidak memiliki PDP	1. BPIP melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam memastikan setiap perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kab/Kota dan Provinsi melakukan tugasnya dalam menyelenggarakan program Paskibraka pada Hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus dan pada Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni. 2. BPIP melakukan diseminasi khususnya kepada Kab/Kota dan Provinsi yang masih belum melaksanakan tugas pada tanggal 1 Juni 3. BPIP bekerjasama dengan Kesbangpol dalam menghimpun data Purnapaskibraka sebelum Tahun 2022 yang belum mendapatkan diklat Pembinaan Ideologi Pancasila 4. BPIP bekerjasama dengan Kesbangpol dalam melakukan pemantauan terhadap Purnapaskibraka yang mengikuti diklat Pembinaan Ideologi Pancasila agar bisa mengikuti diklat dengan fokus dan serius.

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
	disebabkan Purnapaskibraka yang mengikuti diklat Pembinaan Ideologi Pancasila tidak fokus sehingga tidak lulus menjadi PDP.	

Penyelenggaraan Diklat PIP pada Triwulan I tahun 2024 menghadapi kendala-kendala dari aspek dukungan regulasi/kebijakan, keterbatasan sumber daya, sehingga perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2024 dengan melakukan komunikasi strategis dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal BPIP dalam rangka kolaborasi/gotong royong dalam:

- Akselerasi pelaksanaan kegiatan dan kepatuhan terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan;
- Pengembangan dan penerapan kebijakan strategis dan program teknis untuk mewujudkan gotong royong kolaboratif, integratif, dan sinergis dalam pemanfaatan sumber daya (SDM, finansial, sarana prasarana, data informasi) antara BPIP dengan lembaga negara, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Diklat PIP yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional bagi aparatur negara, orsospol, dan komponen masyarakat lainnya;
- Pembangunan dan penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi Diklat PIP berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan Diklat PIP dan pelaksanaan PIP dalam Diklat calon Paskibraka;
- Akselerasi pelaksanaan kegiatan dan kepatuhan terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan

- e) Pembangunan sarana dan prasarana pelaksanaan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila sesuai standard dan kebutuhan
- f) Pengembangan sistem dan metode pelaksanaan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila berbasis teknologi informasi dan komunikasi
- g) Fasilitasi pelaksanaan akreditasi penyelenggara Diklat PIP serta sertifikasi penceramah/fasilitator dan pengajar Diklat PIP untuk mendorong penyelenggaraan Diklat PIP secara instansional di lembaga negara, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah; dan
- h) Penyempurnaan Instrumen Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) yang terkait dengan penyelenggaraan Diklat PIP.

5. Kendala dan rencana tindak lanjut terlaksananya pengendalian dan evaluasi PIP

Kendala dan faktor penghambat pelaksanaan program, yaitu:

Tabel 4. 5. Kendala dan Tindak Lanjut terlaksananya pengendalian dan evaluasi PIP

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase Rekomendasi Hasil Pengendalian Kebijakan Strategis dan program Teknis PIP yang ditindaklanjuti	1. Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pengendalian PIP sedang dalam proses penyusunan; 2. Dokumen Arah Kebijakan PIP masih belum diundangkan dan Dokumen Peta Jalan PIP masih dalam proses penyusunan oleh Deputi Bidang Pengkajian Materi; 3. Penyusunan	1. Mempercepat proses penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pengendalian PIP; 2. Mendorong Deputi Bidang Pengkajian Materi untuk mengundang Dokumen Arah Kebijakan PIP dan Peta Jalan PIP; 3. Menjalankan proses Pengendalian PIP sebagai bahan penyusunan

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
	dokumen Pengendalian PIP sedang dalam proses pelaksanaan pengendalian (pengumpulan data).	dokumen Pengendalian PIP.
Persentase rekomendasi hasil pengendalian pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti	Pelaksanaan Pengendalian PIP belum selesai dilaksanakan sehingga Dokumen Rekomendasi belum dapat diselesaikan.	Pelaksanaan Pengendalian PIP akan terus dilaksanakan sehingga Rekomendasi dapat diselesaikan
Persentase Rekomendasi Evaluasi Pembinaan PIP yang ditindaklanjuti	1. Belum tersusunnya regulasi tentang Pedoman Evaluasi PIP 2. Masih perlunya pengembangan instrument Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila pada Pendidikan Pancasila dan Program Paskibraka 3. Masih perlunya pengembangan instrument pengukuran Media	1. Sedang disusun Pedoman Evaluasi PIP 2. Perlu adanya diskusi lanjutan untuk finalisasi instrument Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila pada Pendidikan Pancasila dan Program Paskibraka 3. Perlu adanya pemutakhiran instrumen pengukuran Media
Persentase Pengukuran Pelembagaan Pancasila yang ditindaklanjuti	1. Keterbatasan jumlah SDM pada Direktorat Pengukuran Pelembagaan 2. Belum ada pedoman pengukuran Pelembagaan dan pengukuran IAP	1. Permintaan penambahan SDM 2. Melakukan koordinasi untuk melakukan penyusunan pedoman pengukuran pelembagaan dan pengukuran IAP
Persentase rekomendasi pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila yang ditindaklanjuti		

Rekomendasi peningkatan atau perbaikan sasaran program terlaksananya pengendalian dan evaluasi PIP adalah:

- Perlu penguatan produk hukum untuk optimalisasi pengendalian pembinaan ideologi Pancasila, evaluasi pembinaan ideologi Pancasila dan pengukuran pelembagaan pancasila;
- Penyelesaian Pedoman Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila, Pedoman Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Pengukuran Pelembagaan Pancasila;
- Perlu dilakukannya finalisasi pemutakhiran instrumen alat ukur Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila, untuk Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Program Prioritas;
- Pengambilan sampel atau responden dalam survey dengan mempertimbangkan keterwakilan dari jumlah populasi yang ada;
- Peningkatan kualitas SDM dengan pendidikan dan pelatihan;
- Perlu penambahan SDM dengan keahlian bidang Statistisik.

6. Kendala dan rencana tindak lanjut terlaksananya Dukungan Manajemen

Tabel 4. 6. Kendala dan Tindak Lanjut terlaksananya Dukungan Manajemen

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase pemenuhan dokumen perencanaan sesuai standar	Keterlambatan penyampaian dokumen usulan revisi anggaran dari unit kerja sehingga menghambat penerbitan dokumen revisi anggaran.	Perlu diadakan rapat bersama unit kerja tata cara revisi anggaran
Persentase laporan keuangan yang tepat waktu keuangan	laporan keuangan 2023 audited sedang dalam proses penyusunan, kemarin terhambat akibat maintenance aplikasi SAKTI	Melakukan komunikasi dengan pihak terkait, seperti Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Sistem Informasi Teknologi Perbendaharaan, dan Badan Pemeriksa Keuangan
Persentase pemenuhan dokumen laporan kinerja sesuai standar	Penyampaian Laporan dari unit kerja melebihi waktu yang telah ditetapkan sehingga memperhambat dalam penyusunan laporan kinerja	Mengadakan rapat kepada unit kerja untuk menentukan penanggung jawab dalam penyusunan

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
		laporan kinerja
Persentase rancangan produk hukum yang ditindaklanjuti	1. Belum terpenuhinya penyelesaian Prosun Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPIP Nomor 92 Tahun 2022, sebagai target produk hukum Tahun 2023 2. Penyampaian rancangan produk hukum dari unit kerja terkait belum sesuai dengan format baku produk hukum BPIP 3. Penetapan produk hukum BPIP, yang tidak melalui proses penyusunan produk hukum yaitu melalui review BHO	1. Akan Menyampaikan nota dinas kepada unit kerja pemrakarsa untuk mengingatkan target penyelesaian Prosun Tahun 2024 2. Menyampaikan nota dinas kepada seluruh unit kerja mengenai format baku produk hukum 3. Melakukan dokumentasi dan pengarsipan
Persentase rekomendasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi yang ditindaklanjuti	1. Belum dilakukan evaluasi kelembagaan. 2. Melakukan pengkajian mengenai rencana pembentukan unit kerja untuk pendidikan dan pelatihan PIP. 3. Melakukan evaluasi SOP yang terintegrasi dengan proses bisnis. 4. Dalam menaikkan Indeks Nilai RB dalam melakukan koordinasi antar unit kerja terkendala karena tingginya pekerjaan pada unit kerja terkait.	1. Sudah dilakukan koordinasi dengan Kementerian PANRB dan saat ini sedang menyusun indikator yang disesuaikan dengan Permen PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi pemerintah. 2. Sudah dilakukan koordinasi dengan LAN dan Kedeputian bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB. mengenai rencana pembentukan unit kerja untuk pendidikan dan pelatihan PIP. 3. Melakukan koordinasi antar unit kerja untuk melakukan evaluasi SOP dan proses bisnis. 4. Melakukan koordinasi yang

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
		intensif dengan menunjuk PIC untuk rencana aksi yang telah dibuat pada masing-masing unit kerja.
Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan kerumahtanggaan, layanan pengelolaan BMN, dan layanan manajemen SDM	1. Luas Area Gedung yang terbatas sehingga kurang mendukung untuk dilakukan penempatan sesuai dengan unit kerja; masing-masing; 2. Salah satu indikator dalam indeks pengelolaan aset adalah mengenai pengelolaan Barang Milik Negara dalam bentuk penghapusan yang menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak. 3. Luas Area Gedung Kantor yang terbatas sehingga sedikit menghambat proses Pemeliharaan dan Revitalisasi Gedung Kantor Yang Digunakan BPIP dalam hal peletakan bahan-bahan bangunan 4. Proses perencanaan pengadaan masih bersifat mendadak sehingga menggunakan manual dan tidak melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dapat berdampak pada Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) 5. Masih adanya beberapa kebijakan internal yang harus dipenuhi terkait dengan kebijakan reward and punishment bagi pegawai di lingkungan BPIP serta belum adanya system informasi yang menggambarkan pemetaan talenta di lingkungan BPIP dan perlu diperbaikinya indicator penilaian system merit internal BPIP 6. Masih adanya beberapa kebijakan internal yang harus dipenuhi terkait dengan kebijakan reward	1. Menggunakan ruang kerja dengan konsep co-working space memanfaatkan jadwal perjalanan dinas unit kerja; 2. Melakukan Penghapusan Barang Milik Negara yang telah dalam kondisi rusak berat untuk menunjang Pendapatan Negara Bukan Pajak berupa penerimaan Pendapatan dari Penjualan peralatan dan mesin 3. Pemeliharaan tetap terlaksana namun tidak dapat dilakukan pada saat jam kerja dikarenakan terbatasnya lahan untuk meletakkan bahan-bahan; 4. Perlu komitmen Bersama antara Unit Kerja, PPK, PPBJ, dan Pokja Pemilihan; 5. Perlu adanya komitmen penerapan sistem merit di lingkungan BPIP dengan mulai melakukan pemetaan talenta pegawai yang didukung dengan sistem informasi yang mumpuni sehingga proses penerapan manajemen talenta bisa dilakukan;

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
	and punishment bagi pegawai di lingkungan BPIP serta belum adanya system informasi yang menggambarkan pemetaan talenta di lingkungan BPIP dan perlu diperbaikinya indikator penilaian system merit internal BPIP 7. Layanan yang diberikan kepada pegawai memiliki ketergantungan pada Instansi lain, sehingga masih belum optimal 8. Anggaran yang dikelola belum mampu mengakomodir kegiatan prioritas, misalnya: Seleksi terbuka 2 jabatan Deputy dan 4 JPT-Pratama yang bersamaan dengan pelaksanaan Penerimaan Calon PNS dan Calon PPPK	6. Perlunya dukungan dan komitmen dari semua pihak terhadap proses penyelenggaraan manajemen ASN yang sesuai dengan NSPK 7. Dilakukan Koordinasi dengan instansi terkait untuk meningkatkan layanan SDM kepada pegawai 8. Dilakukan koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan untuk pengalokasian tambahan anggaran
Persentase kepuasan unsur pimpinan terhadap dukungan layanan keprotokolan dan administrasi yang diberikan	Kompetensi SDM Biro masih rendah;	Peningkatan Kompetensi SDM melalui Diklat Kompetensi atau Bimbingan Teknis
Nilai indeks keterbukaan informasi publik BPIP	Kurangnya SDM yang memiliki keahlian di bidang dimaksud	Mengajukan permintaan SDM
Nilai pengawasan kearsipan	Pengawasan Kearsipan Internal, masih banyak Unit Kerja yang belum melakukan pengelolaan arsip Aktif pada Unit Kerja dengan Baik, hal tersebut karena BPIP belum memiliki SDM Kearsipan yang focus untuk melakukan Pengelolaan arsip, dan BPIP belum memiliki NSPK Kearsipan yang menjadi syarat pelaksanaan kearsipan Internal	Pengawasan Kearsipan telah dilakukan oleh Tim Pengawasan Kearsipan Internal pada bulan April 2023, dan pelaksanaan Pengawasan Eksternal telah dilaksanakan pada bulan Mei 2023. pada tanggal 12 Juli 2023 akan dilakukan Verifikasi pengawasan Internal untuk memperoleh 40% Nilai Pengawasan Kearsipan yang akan dikeluarkan oleh Arsip Nasional pada bulan Agustus/September

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
		2023.
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	1. Pengangka Masih adanya denda keterlambatan yang belum dibayarkan oleh Pihak Penyedia untuk temuan atas Pemeriksaan LK BPIP Tahun 2020; 2. Penyusunan HPS, Proses Pengadaan Langsung dan Pembayaran Biaya Konsumsi pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Sebesar Rp30.681.818 Tidak Sesuai Ketentuan; 3. Dan pengamanan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Belum Optimal.	1. Merekomendasikan penerbitan Surat Penagihan kepada pihak penyedia 2. Telah merekomendasikan kepada Sekretaris Utama untuk memerintahkan PPK supaya membuat HPS berdasarkan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Memorandum Kepala Nomor 1231/PW/08/2022/BPIP perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2022; 3. Telah terdapat dokumen listing Data BMN Intrakomptabel s.d. 31 Des 2022 yang nantinya di pemantauan BPK berikutnya diserahkan kembali.
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	1. Belum ada SK dan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE; 2. Belum ada SK dan pedoman atau dokumen tentang manajemen SPBE; 3. Belum memiliki Portal CSIRT BPIP; 4. Belum memiliki portal layanan Satu Data.	1. Perlu koordinasi dan sinergi antar unit kerja dalam pemenuhan eviden yang diperlukan sesuai dengan indikator dari pengampu (unit kerja); 2. Perlu ada dokumen dan turunan kebijakan berupa SK Kepala dalam penerapan

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
		Arsitektur dan Peta Rencana SPBE di lingkungan BPIP; 3. Perlu disusun SK dan pedoman dokumen tentang manajemen SPBE, saat ini telah memiliki 4 (empat) manajemen SPBE, sedang 4 (empat) manajemen lainnya sedang berproses penyusunan; 4. SK Tim CSIRT sudah ada, dan segera berkoordinasi dengan BSSN untuk pengembangan portal CSIRT dan persiapan Lounching Tim CSIRT; 5. Portal Satu Data BPIP sedang berproses pengembangan, diharapkan pada semester II bisa diimplementasikan
Nilai tingkat Maturitas SPIP (Skala 1 s.d. 5)	1. Keterbatasan SDM Teknis 2. Teknologi yang terus berkembang dengan cepat.	1. Perlu penambahan SDM Teknis 2. Perlu melakukan pengembangan kompetensi SDM

Rekomendasi peningkatan atau perbaikan sasaran program terlaksananya pengendalian dan evaluasi PIP adalah:

- Perlu adanya penguatan area perbaikan melalui koordinasi antar unit kerja dan/atau unit organisasi di lingkungan BPIP serta penguatan kompetensi APIP dalam rangka penilaian SPIP selaku tim penjamin kualitas;
- Pada tindak lanjut dari temuan BPK perlu adanya kolaborasi antar unit kerja di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

- c) Perlu peningkatan koordinasi, komunikasi dan perhatian yang lebih dari para pengelola Keuangan (PPK) dalam penyediaan data Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa serta TP3DN sehingga data yang didapat menjadi representatif dalam menghasilkan kualitas informasi yang dibutuhkan oleh BPKP untuk pelaporannya kepada Presiden RI;
- d) Perlu adanya Pembuatan Timeline yang jelas mengenai pelaksanaan Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas di BPIP sehingga sesuai dengan batas waktu penyampaian laporan hasil maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang ditentukan oleh BPKP serta Pelaksanaan monitoring dan pendampingan secara berkala oleh Biro Pengawasan Internal atas penyampaian data dukung SPIP Terintegrasi sehingga proses Penilaian Mandiri oleh Manajemen tidak mengalami kendala;
- e) Untuk meningkatkan kualitas penetapan tujuan, perlunya untuk BPIP melakukan monitoring beserta evaluasi secara berkala terhadap perencanaan kinerja sampai ke realisasi sehingga dapat memastikan Indikator Kinerja Utama, Sasaran Program, Target Kinerja mendukung Sasaran Strategis, Hal yang perlu dilaksanakan adalah melakukan dokumentasi secara lebih tertib terhadap pelaksanaan monitoring tersebut.
- f) kompetensi SDM Biro pada Layanan Protokoler masih rendah, menciptakan hambatan dalam memberikan layanan yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan tindakan lanjut yang terarah untuk meningkatkan kompetensi SDM tersebut. Prosesnya melibatkan identifikasi gap kompetensi secara mendalam, perancangan program pelatihan berbasis kompetensi, serta pemantauan progres dan dampak peningkatan kompetensi melalui evaluasi berkala.
- g) kompetensi SDM Biro pada Layanan Protokoler masih rendah, menciptakan hambatan dalam memberikan layanan yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan tindakan lanjut yang terarah

untuk meningkatkan kompetensi SDM tersebut. Prosesnya melibatkan identifikasi gap kompetensi secara mendalam, perancangan program pelatihan berbasis kompetensi, serta pemantauan progres dan dampak peningkatan kompetensi melalui evaluasi berkala.

- h) Pengelolaan arsip aktif pada beberapa Unit Kerja belum optimal, dan belum adanya NSPK Kearsipan sebagai syarat pelaksanaan kearsipan Internal. Oleh karena itu, tindak lanjut yang diusulkan mencakup identifikasi unit dengan performa kearsipan rendah, implementasi NSPK Kearsipan, serta evaluasi dampak pelatihan dan implementasi NSPK terhadap kinerja pengelolaan arsip aktif. Langkah-langkah tindak lanjut diarahkan pada penetapan jadwal rutin untuk pengawasan internal dan eksternal, dukungan tim pengawasan dengan pelatihan dan sumber daya yang diperlukan, serta analisis mendalam terhadap hasil pengawasan untuk perbaikan berkelanjutan. Rekomendasi melibatkan pembentukan tim internal untuk memastikan pengawasan berkelanjutan dan terintegrasi dalam sistem manajemen mutu.
- i) Unsur ketaatan pada peraturan yakni atas laporan BPK mengenai ketaatan terhadap peraturan antara kurun tahun 2018-2022 dengan rincian 5 temuan pada tahun 2019, 4 temuan pada tahun 2020, 9 temuan pada tahun 2021, 6 temuan pada tahun 2022, dengan penyelesaian berupa ruang lingkup temuan yang berulang.
- j) Salah satu unsur penilaian Manajemen Risiko Indeks yakni adalah penguatan kompetensi penjaminan mutu dan kualitas pelaksanaan MRI melalui pelaksanaan sertifikasi pengelola risiko lingkup BPIP dengan kompetensi pelatihan serta bimbingan teknis Manajemen Risiko sektor Publik baik melalui penyelenggaraan BPKP maupun internal BPIP.



- k) Keamanan Administrasi, berupa Aset BMN untuk diberikan nomor urut pendaftaran barang inventaris, serta kelengkapan dokumen Aset pinjam berupa Berita Acara Serah Terimanya



BAB V | PENUTUP

Kinerja BPIP harus lebih memberikan dampak dan manfaat dimasa-masa mendatang. Gerak langkah Aktualisasi Pancasila harus dapat sampai pada masyarakat, agar dapat memunculkan rasa percaya diri dan ketangguhan karakter dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Indikator kinerja BPIP harus dapat diukur agar Akuntabilitas Kinerja terjaga diiringi dengan pengelolaan anggaran yang makin bijaksana dan mengedepankan asas kepatutan.

SALAM PANCASILA!

Jakarta, April 2024

KEPALA,

YUDIAN WAHYUDI



**BADAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA**

